

Anatomi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Refleksi Pengelolaan Pendidikan di Bali

Oleh :

Dr. I Made Alit Mariana, dkk

Penerbit :

LPMP Provinsi Bali

Anatomi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Refleksi Pengelolaan Pendidikan di Bali

ANATOMI SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Refleksi Pengelolaan Pendidikan di Bali

Dr. I Made Alit Mariana, dkk

Diterbitkan oleh:

LPMP Provinsi Bali

Jl. Letda Tantular No. 14 Nitimandala Renon

Denpasar Timur

Denpasar

80234

Telp./Fax : 0361-225666/0361-246682

www.lpmpbali.or.id

email : lpmpbali@gmail.com

Penyunting : Dr. I Made Alit Mariana

Foto Cover : I Ketut Sumantara, S.Pd

Desain cover & layout : Agus Ryan

ISBN : 978-602-70237-0-3

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KETERANGAN COVER DEPAN

BAJRA SANDHI

MONUMEN Bajra Sandhi merupakan Monumen Perjuangan Rakyat Bali sebagai rasa hormat pada para pahlawan serta merupakan lambang pesemaian pelestarian jiwa perjuangan rakyat Bali dari generasi ke generasi dan dari zaman ke zaman sebagai lambang semangat untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari 17 anak tangga yang ada di pintu utama, 8 buah tiang agung di dalam gedung monumen, dan monumen yang menjulang setinggi 45 meter. Lokasi monumen ini terletak di depan Kantor Gubernur Kepala Daerah Provinsi Bali yang juga di depan Gedung DPRD Provinsi Bali Niti Mandala Renon tepatnya di Lapangan Puputan Renon.

Monumen ini dikenal dengan nama “Bajra Sandhi” karena bentuknya menyerupai bajra atau genta yang digunakan oleh para Pendeta Hindu dalam mengucapkan Weda (mantra) pada saat upacara keagamaan. Monumen ini dibangun pada tahun 1987, diresmikan oleh Presiden Megawati Sukarno Putri pada tanggal 14 Juni 2003. Tujuan pembangunan monumen ini adalah untuk mengabadikan jiwa dan semangat perjuangan rakyat Bali, sekaligus menggali, memelihara, mengembangkan serta melestarikan budaya Bali untuk diwariskan kepada generasi penerus sebagai modal melangkah maju menapak dunia di masa depan.

KEMBOJA

KEMBOJA atau **semboja** merupakan sekelompok tumbuhan dalam marga *Plumeria*. Bentuknya berupa pohon kecil dengan daun jarang namun tebal. Bunganya yang harum sangat khas, dengan mahkota berwarna putih hingga merah keunguan, biasanya lima helai. Bunga dengan empat atau enam helai mahkota bunga oleh masyarakat tertentu dianggap memiliki makna dan nilai tertentu.

Kemboja merupakan pohon yang sangat populer di Pulau Bali karena ditanam di hampir setiap pura serta sudut kampung, dan memiliki fungsi penting dalam kebudayaan setempat. Di beberapa tempat di Nusantara, termasuk Malaya, kemboja ditanam di pekuburan sebagai tumbuhan peneduh dan penanda tempat. Kemboja dapat diperbanyak dengan mudah, melalui stek batang. *Plumeria* saat ini populer digunakan sebagai tanaman hias *outdoor* awalnya diberbagai perumahan.

KETERANGAN COVER BELAKANG

Mendikbud: Prof. Dr. M. Nuh, DEA

Kepala BPSDMPK dan PMP : Prof. Dr. Syawal Gultom

Kepala LPMP Provinsi Bali : Dr. I Made Alit Mariana

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Kepala BPSDMPK & PMP, Kemdikbud	vi
Kata Pengantar Ka. LPMP Provinsi Bali	viii
EPILOG	1
PENDAHULUAN	3
MUTU PENDIDIKAN	7
Dr. I Made Alit Mariana	
- Mutu Pendidikan	7
- Sistem Pembelajaran	10
- Sistem Manajemen Sekolah	10
- Sistem Pemberdayaan Masyarakat	10
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	12
Dr. I Made Alit Mariana	
- SNP dan Sistem Pembelajaran	15
- Etos Kerja dan Kemampuan Profesional	17
- Pengelolaan Perubahan di Sekolah	21
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN	28
Dr. I Made Alit Mariana	
- Penjaminan Mutu Pendidikan	30
- Model Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan	35
- Protap Penjaminan Mutu pendidikan	36
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DI BALI	41
Dr. I Made Alit Mariana	
- Pendidikan di Provinsi Bali dalam Angka	41
- Profil Sekolah Berbasis Evaluasi Diri Sekolah (EDS)	42

KAPITA SELEKTA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

- Kurikulum Baru Harapan Baru 59
Ni Wayan Surasmini, S.Si., M.Pd
- Selamat Datang Kurikulum 2013 61
Dra. Ni Made Suciani, M.Pd
- Penjaminan Mutu Pembelajaran 63
Drs. I Made Suparma, M.Pd
- Membangun Prestasi Pendidikan, Menuju Bali
sebagai Tujuan Wisata Pendidikan 67
Dr. I Made Alit Mariana & Putu Ayu Ras00, S.Sos
- Penjaminan Mutu Pendidikan Dimulai dari Kepuasan Peserta Diklat:
Studi Kasus di LPMP Provinsi Bali 70
Ni Wayan Mudiarni, M.Pd
- Discrepancy Model Sebagai Alternatif Model Penjaminan Pelaksanaan
Pembelajaran Tema0k Terpadu Berbasis Pendekatan Sain0fik di SD 74
I Wayan Surata, S.Pd., M.Pd
- Integrasi Pembelajaran IPA dan IPS dengan Bahasa Indonesia di SD 78
Dra. Ni Wayan Murki, M.Pd
- Idiom Estetika dalam Pendidikan Postmodernisme 81
Drs. I Made Swastana, M.Pd
- Inovasi Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik 86
Dr. I Made Alit Mariana

KATA PENGANTAR

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Puji syukur kita sampaikan terhadap segala upaya dalam mengurai permasalahan pendidikan kita di Indonesia melalui berbagai cara, misalnya menyusun buku tentang “**Anatomi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan: Refeksi Pengelolaan Pendidikan Di Provinsi Bali**”. Sekecil apapun upaya mengembangkan alternatif solusi dalam pendidikan adalah signifikan, alih-alih mengkritik dan memaki-maki tanpa ada solusinya. Apabila sebagian besar sumber daya manusia dalam birokrasi dan teknokrasi berkontribusi konstruktif dalam mencari alternatif solusi terhadap masalah pendidikan, akan memudahkan Pemerintah dalam menentukan kebijakan dalam konteks nasional dan lokal, yang dengan wilayah NKRI memiliki keragaman yang luar biasa. Keragaman inilah yang membuat kita indah, tatkala seluruh masyarakat Indonesia dapat bersatu-padu dalam membangun bangsa ini.

Buku ini saya anggap salah satu buah karya dari hasil implementasi kebijakan dalam pendidikan secara berkesinambungan, dengan paradigma holistik fasilitasi institusi pendidikan agar mencapai dan melampaui Standar Nasional Pendidikan – *bhineka karya eka dharma*. Berbagai upaya kegiatan yang dilakukan atau *bhineka karya*, mulai dari pemetaan mutu pendidikan, pengembangan rencana program penjaminan mutu pendidikan, fasilitasi pengembangan sekolah dengan segala aspek standar pendidikannya, dan pengembangan sistem informasi pendidikan, serta pemantauan dan evaluasi pencapaian lembaga pendidikan, merupakan karya yang beragam sebagai kegiatan konstruktif. Semua rangkaian siklus kegiatan tersebut mengacu kepada “Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan” (SPMP), sebagai upaya sistematis dan terencana fasilitasi pengembangan sekolah sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan arah kebijakan pengembangan karakter bangsa sebagai bangsa yang unggul dalam belantara bangsa-bangsa di dunia atau *eka dharma*.

Masing-masing faset kegiatan dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dilaksanakan dengan porsi masing-masing kegiatan bergantung pada fokus kebijakan dalam tahun tersebut. Sehingga dengan demikian, program LPMP dari waktu ke waktu akan mengalami fluktuasi fokus kegiatan, artinya pada saat fokus implementasi kebijakan tentang pemetaan mutu pendidikan, dikembangkan program Evaluasi Diri Sekolah (EDS), sebagai program yang dominan. Pada saat fokus pada implementasi kurikulum hasil pengembangan, diprogramkan kegiatan fasilitasi dan pemberdayaan Pendidik dan

Tenaga Kependidikan (PTK) tentang kurikulum pendidikan yang dominan. Faset kegiatan yang lain dari siklus SPMP tetap dilaksanakan dengan volume kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sesuai dengan prinsip prioritas atau program unggulan.

Siklus penjaminan mutu pendidikan merupakan upaya bersama antara Kemdikbud (melalui Unit Pelaksana Teknis – UPT) dengan Pemerintah Daerah (melalui Dinas Pendidikan atau yang bertanggung di bidang pendidikan) yang harmonis, sehingga LPMP sebagai UPT Kemdikbud senantiasa menjalin hubungan serasi dengan Pemkab dan Pemprov dalam berbagai bidang. Harmoni hubungan antar lembaga pusat dan daerah merupakan kunci utama dalam melaksanakan tugas dan fungsi penjaminan mutu pendidikan. Sekolah sebagai entiti pendidikan merupakan subyek bersama pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaannya agar memperoleh capaian yang melebihi standar acuan, minimal mencapai standar.

Kita harapkan upaya seperti penyusunan buku sebagai upaya pendokumentasian berbagai upaya positif, berbasis akademik, kontekstual dalam membangun dunia pendidikan dengan segala permasalahannya dapat dilakukan lebih banyak lagi sebagai bahan pembelajaran perbandingan bagi yang lainnya. Indonesia kaya dengan keragaman, kita yakin pasti banyak lagi *best-practices* yang dimiliki sebagai bahan perbandingan bagi yang lainnya.



KATA PENGANTAR

KEPALA LPMP PROVINSI BALI

Asung kerta waranugraha, puji syukur kami sampaikan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan YME atas perkenanNya kami dapat menyelesaikan buku **“Anatomi Penjaminan Mutu Pendidikan: Refleksi Pengelolaan Pendidikan di Bali”** sebagai upaya bersama seluruh staf Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Bali. Buku ini merupakan elaborasi terhadap *motto* kami, **“bhineka karya, eka dharma”** yang kami artikan sebagai upaya dan kegiatan yang beragam dalam pendidikan, tetapi semua itu mengacu kepada satu hal yaitu penjaminan mutu pendidikan. *Motto* ini kami buat sebagai upaya kami dalam memahami rangkaian kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang menjadi tugas dan fungsi LPMP. Fungsi fasilitasi yang kami emban merupakan tugas utama Kemdikbud dalam menghantarkan sekolah mencapai standar nasional pendidikan sebagai standar minimal pencapaian sekolah. Paradigma yang kami kembangkan ini menjadi salah satu referensi dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dan berbagai hal yang kami pikirkan, kami ucapkan, dan kami laksanakan (*tri kaya parisudha*) dijadikan sebagai dokumen dalam bentuk buku ini.

Dalam mengelaborasi dan mengimplementasikan tugas dan fungsi ini, langkah pertama adalah melakukan kolaborasi asimetris dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau lembaga yang bertanggungjawab dalam pembinaan pendidikan dan kebudayaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Kolaborasi yang kami lakukan dapat berupa Rapat Koordinasi, fasilitasi berbagai program Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota serta provinsi, dan kerjasama dalam peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di Provinsi Bali. Salah satu wujud kolaborasi mutualistik yang kami lakukan adalah menandatangani komitmen bersama antara LPMP Provinsi Bali dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten dan Kota se-Bali.

Dalam membangun kerjasama itu, kita rasakan sangat penting adanya dekomen acuan sebagai definisi kerja bersama dalam meyakinkan berbagai pihak bahwa penyelenggaraan pendidikan oleh sekolah di berbagai jenjang pendidikan mengacu kepada suatu Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dengan demikian, *hierarchie* penulisan buku ini dimulai dari makna dan komponen dari mutu pendidikan secara umum dan secara khusus. Mutu pendidikan inilah menjadi tujuan bersama berbagai lembaga pendidikan di daerah, sehingga diperlukan sinergitas antar lembaga. Kajian berikutnya adalah SNP yang dijadikan sebagai acuan normatif dalam mengembangkan

sekolah yang difasilitasi oleh berbagai *stake-holder* pendidikan. Posisi masing-masing standar dalam paradigma penjaminan mutu pendidikan dielaborasi sebagai acuan dalam memetakan fokus fasilitasi berbagai *stake-holder* dalam penyelenggaraan pendidikan oleh sekolah.

Selanjutnya dibahas tentang penjaminan mutu pendidikan sebagai tugas dan fungsi yang dimiliki LPMP dalam konteks kondisi dan budaya di provinsi Bali. Berbagai sumber dijadikan sebagai acuan, berupa regulasi dalam pendidikan, kajian budaya lokal, dan lokasi geografis serta populasi PTK, dalam mengembangkan paradigma Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP). Untuk itu, diperlukan langkah pendahuluan menjajagi selama satu tahun tentang kondisi lokal di Provinsi Bali sebelum mendokumentasikan secara sistematis.

Sebagai bahan refleksi, diambilkan dari berbagai bahan kajian, misalnya hasil Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dengan segala kelemahan dan kebaikannya, pencapaian nilai EBTANAS Murni (NEM) yang dicapai peserta didik di Bali, berbagai kajian yang dilakukan oleh Widyaiswara LPMP provinsi Bali dalam memfasilitasi PTK di Bali, dan berbagai upaya inovasi dalam mengemban tugas penjaminan mutu pendidikan. Bahan refleksi penyelenggaraan pendidikan mungkin belum mencerminkan seluruh dinamika dan romantika di Bali, tetapi ini langkah awal dalam membangun keberanian melihat secara obyektif pencapaian dalam bidang pendidikan di Bali.

Kami menyadari betul buku ini sangat jauh dari sempurna, sehingga tegur sapa, kontribusi konstruktif, dan pandangan akademis dan praktis terhadap buku sangat ditunggu demi perbaikannya. Tidaklah berlebihan kami sampaikan banyak terima kasih kepada yang Terhormat Kepala Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali, Kepala Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten dan Kota se Bali, beserta jajarannya yang secara *lascarya*-konstruktif-bersama-sama mengedukasi masyarakat Bali melalui dunia pendidikan. Semoga upaya sistematis dan secara sadar ini dapat dilanjutkan dengan lebih inovatif dan efektif dapat dibangun bersama dengan melibatkan lebih banyak lagi pemangku kepentingan yang berkaitan. Smoga!!!

Denpasar, 12 Desember 2013



Dr. Made Alit Mariana
196001241985031001



Cogito Ergo Sum, pernyataan seorang filsuf Perancis untuk menyatakan keberadaan seseorang dibuktikan dengan fakta bahwa ia bisa berpikir sendiri dan tetaplah berpikir. **Aku berpikir, maka aku ada.**

--- Rene Descartes ---

EPILOG

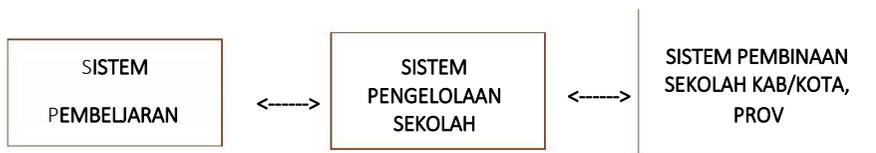
PENDIDIKAN, disadari dan diakui bersama, merupakan prediktor dominan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang handal di masa mendatang; dengan demikian, lembaga pendidikan menjadi pilar utama dalam membentuk manusia yang bermutu. Untuk itu segala model pengelolaan lembaga pendidikan (*baca: sekolah*) hendaknya menjadi perhatian bersama, ketaatan mengacu kepada regulasi yang ada. Kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, dan membangun karakter peserta didik sesuai dengan nilai yang dianut bangsa Indonesia. Jadi pendidikan menjadikan manusia yang senantiasa berpikir dalam menghadapi kehidupannya, berkebudayaan – mengerahkan daya upaya yang berbudi (luhur) – kegiatan kebaikan hidup dan kehidupan, seperti dikemukakan oleh filosof Rene Descartes.

Dalam uraian berikut, akan dibahas enam kelompok bahasan, meliputi: (1) makna mutu pendidikan, (2) Standar Nasional Pendidikan (SNP), (3) pemetaan mutu pendidikan, (4) makna Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), (5) model fasilitasi dan pembinaan sekolah dan (6) refleksi pengelolaan pendidikan di Bali. Mutu pendidikan masih aktual didefinisikan sebagai acuan strategis dalam menganalisis model penjaminan mutu pendidikan dan model fasilitasi peningkatan mutu pendidikan itu sendiri. SNP merupakan acuan normatif yang bersifat dinamis dan menjadi instrumen esensial untuk menentukan pencapaian pengelolaan pendidikan dalam setiap jenjang persekolahan.

Pemetaan mutu pendidikan adalah proses menentukan posisi dan *profile* proses dan pencapaian pendidikan sebagai tanggung jawab moral dan formal dalam pengelolaan pendidikan. SPMP dapat didekati dengan pendekatan sistem dengan subsistemnya, meliputi: masukan (*input*), proses (*process*), keluaran (*output*), dan dampak (*outcome*). Dalam skala paling kecil, sistem pembelajaran terdiri atas: siswa, bahan ajar, Alat Peraga Pendidikan (APP), dll sebagai masukan. Pembelajaran efektif sebagai proses profesional (*professional intervention*) untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Pencapaian peserta didik dengan standar kompetensi lulusannya dapat dinyatakan sebagai keluaran, dan kinerja siswa dijadikan sebagai dampak pembelajaran secara keseluruhan. Dampak pembelajaran secara keseluruhan inilah yang mudah diamati oleh masyarakat luas dan dijadikan sebagai bahan membuat pengakuan terhadap penyelenggaraan pendidikan tersebut.

Sistem pembelajaran dapat menjadi subsistem dalam sistem manajemen sekolah nantinya, dengan alur sebagai berikut.



Berdasarkan uraian bahasan tersebut diharapkan kita memiliki *flatfom* yang sama dalam mengkaji model penjaminan mutu pendidikan, diantaranya: indikator sistem pembelajaran yang efektif; model pemetaan mutu pendidikan dalam tingkat pengelolaan sekolah; upaya dan program sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan secara berkesinambungan (CPD: *continuous professional development*); dan fasilitasi peningkatan kompetensi mutu pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) oleh para pemangku kepentingan dalam pendidikan.



PENDAHULUAN

BERBICARA tentang pendidikan, biasanya fokus diskusi mengarah kepada sekolah, sebagai penyelenggara pendidikan. Dalam memilih sekolah, sebagai orang tua siswa untuk anak sendiri biasanya memperhatikan beberapa hal, meliputi: sebagai tempat yang aman bagi siswa, tempat yang menyenangkan untuk belajar – diperlakukan baik oleh pendidik, tidak ada kenakalan oleh remaja lain (*bullied by other*), pencapaian peserta didik yang tinggi, adanya budaya belajar yang tinggi, adanya kesempatan siswa meraih pengakuan yang luas, dan pembelajaran menyenangkan, ... serta mungkin juga tentang kemampuan untuk membayar sekolah¹.

Sebagai guru, biasanya ada beberapa yang dipertimbangkan dalam memilih sekolah tempat bekerja dan mengajar. Hal ini, meliputi: adanya kesempatan untuk belajar kembali baik melalui sejawat maupun dari narasumber luar, otonomi yang diberikan dalam mengelola kelas, adanya dukungan tenaga administrasi sekolah dan kepala sekolah dalam melaksanakan pembelajaran, kesiapan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran, tidak banyak waktu digunakan untuk pertemuan para guru, dan diberdayakan secara optimal oleh kepala sekolah. Mungkin dapat memperpanjang lagi daftar faktor yang menjadi pertimbangan dalam memilih sekolah tempat bekerja Anda.

Fakta menunjukkan upaya perbaikan mutu pendidikan, dapat melalui perubahan evaluasi

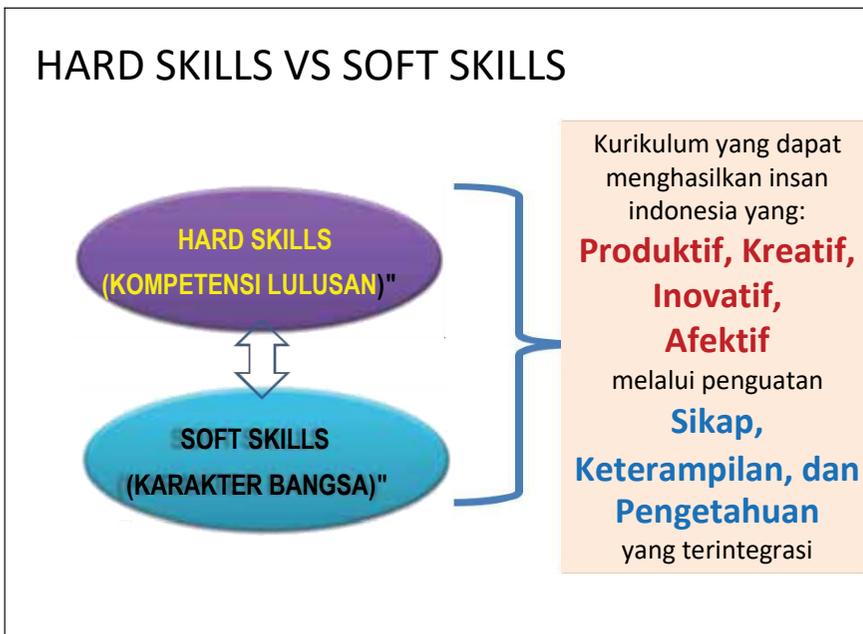
¹ Dalam kasus sekolah telah dibiayai penuh oleh Pemerintah, pertimbangan tentang kemampuan membayar pendidikan menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.

hasil belajar siswa. Pemberian evaluasi yang standar secara berkala membantu mengubah cara pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Danielson (2002: 7) menyatakan banyak daerah memerlukan penilaian yang standar untuk mengevaluasi pencapaian belajar siswa sebagai evaluasi terhadap pencapaian program sekolah; informasi hasil evaluasi ini tidak dipengaruhi oleh gender, etnis, dan status sosial ekonomi siswa, yang murni dapat mengidkasikan peran sekolah dalam pembelajaran untuk mencapai paling sedikit pencapaian dasar siswa.

Terhadap pencapai sukses siswa, mengacu kepada yang disampaikan Danielson (2002: 13), bahwa studi terhadap anak-anak Amerika, sukses itu diperoleh karena dia menguasai bahan ajar tersebut, sedangkan studi terhadap anak-anak dari negara lainnya, sukses diraih karena kerja keras dan faktor keberuntungan, sehingga dengan demikian, dapat dinyatakan pencapaian yang tinggi atau suksesnya atau keberhasilan dalam semua hal adalah hasil dari kerja keras, keberuntungan, dan kekayaan sumber belajar (*natural endowment*).

Ada baiknya kita tinjau regulasi yang kita miliki, yaitu Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003, dalam Pasal 1 (1) dinyatakan "*Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.*" Pesan yang tersurat dan tersirat dalam regulasi ini kita jadikan acuan filosofis dan normatif dalam penyelenggaraan pendidikan, baik pada tingkat pengambil kebijakan, maupun pada tataran pelaksana kebijakan dan para pengembang model penyelenggaraan pendidikan.

Usaha sadar dan terencana ini mengisyaratkan bahwa keterlibatan semua komponen lapisan masyarakat sangat signifikan dalam penyelenggaraan



Skema 1: Arah pendidikan hendaknya mencapai sesuai kompetensi lulusan (hard skills) dan pembentukan karkater bangsa (soft skills) agar terbentuk masyarakat yang memiliki kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor.

pendidikan. Untuk itu sangat penting dibuat sistem perencanaan yang terukur dan diusahakan agar memperoleh rekognisi dari representasi masing-masing lapisan masyarakat terhadap program yang dikembangkan sekolah.

Pesan yang tersurat dan tersirat dalam regulasi pendidikan tersebut, menghendaki agar kurikulum tidak lupa membawa pesan pencapaian kompetensi lulusan dan pembangunan karakter bangsa (*character building*). Pendidikan hendaknya menghantarkan peserta didik untuk mencapai kompetensi lulusan sesuai dengan kompetensi dasar yang diacu dalam pembelajaran (*hard skills*), dan terbangunnya integritas pribadi sebagai karakter bangsa (*soft skills*).

Penyelenggaraan pendidikan secara filosofis merupakan tanggungjawab seluruh masyarakat, artinya masyarakat berkepentingan untuk menjaga secara bersama-sama proses dan produk mutu pendidikan tersebut. Berdasarkan Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 35 ayat (3), pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Dalam hal ini **penjaminan mutu pendidikan** dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP). Dan, ... LPMP sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan yang punya wilayah kerja provinsi dan berada di bawah BPSDMPK & PMP mengimplementasikan sistem penjaminan mutu pendidikan dalam tataran provinsi masing-masing. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), diarahkan untuk meyakinkan semua pihak bahwa sekolah mencapai delapan SNP atau lebih baik.

Standar yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan itu adalah SNP (standar nasional pendidikan). Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi: (1). standar isi; (2). standar proses; (3). standar kompetensi lulusan; (4). standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5). standar sarana dan prasarana; (6). standar pengelolaan; (7). standar pembiayaan; dan (8). standar penilaian pendidikan. Untuk meyakinkan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan standar pendidikan nasional, diperlukan sistem penjaminan mutu pendidikan yang mampu secara tepat memetakan kondisi faktual lembaga penyelenggara pendidikan, memfasilitasi untuk peningkatan mutu pendidikan yang secara dinamis diperbaharui acuan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan kebijakan tersebut sesuai Pasal 2 Permen Kemdikbud No. 37 Tahun 2012 tentang LPMP, menyatakan LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal 3 menyatakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPMP menyelenggarakan fungsi: (a) pemetaan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah; (b) pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah; (c) supervisi satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional; (d) fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan; (e) pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan.

Fungsi utama yang diemban LPMP dalam implementasinya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, artinya LPMP dengan segala sumber daya yang dimilikinya dapat memberikan layanan yang sebesar-besarnya ditujukan kepada pemenuhan SNP₂ dan peningkatan mutu pendidikan serta pencapaian pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan. Pada sekolah yang memasang standar pelayanan minimal mengikuti sekolah unggul (dalam dan luar negeri), LPMP dapat memberikan

² Dalam beberapa kasus sekolah unggul, sekolah diharapkan dapat mencapai tidak hanya SNP yang merupakan standar minimal, tetapi melebihi SNP dengan mengacu kepada suatu standar internasional yang dijadikan konsensus sumber daya pendidikan sekolah tersebut dan para pemangku kepentingan sekolah tersebut.

layanan untuk mencapai standar tersebut. Dengan demikian, fungsi fasilitasi peningkatan mutu pendidikan yang diemban LPMP disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.

Model penjaminan mutu pendidikan disesuaikan dengan tatanannya, yaitu: *pertama*, pada tatanan pembelajaran, interaksi belajar-mengajar; *kedua*, pada tatanan sekolah – pengelolaan pendidikan di sekolah; *ketiga*, pada tatanan kabupaten dan kota serta provinsi – sinergi antar lembaga dan sekolah; *keempat*, pada tatanan nasional – koordinasi lembaga di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sinergi dengan lembaga di tingkat provinsi.

APA SPMP ITU?

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), merupakan proses sistimatis dan upaya sadar serta konsisten terus-menerus menentukan pencapaian standar pengelolaan pendidikan, dan diyakini memuaskan para pebelajar, orang tua pebelajar, sumber daya pendidikan sekolah, dan para pemangku kepentingan pendidikan. Standar pengelolaan pendidikan tersebut mengacu kepada delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai standar minimal. Artinya satuan pendidikan dan/atau pemangku kepentingan pendidikan terkait dapat membuat konsensus dan kebijakan untuk meningkatkan standar pendidikan yang lebih tinggi dengan tanpa mengurangi pengembangan rasa nasionalisme dan karakter bangsa Indonesia.

Upaya pengembangan kompetensi peserta didik untuk mencapai tujuan kurikuler (*hard skills*) dan pengembangan karakter bangsa (*soft skills*), dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dijadikan sebagai acuan normatif-akademis dalam SPMP.

MENGAPA SPMP?

SPMP mulai dikembangkan mulai tahun 2008 sebagai elaborasi dari UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengembangan SPMP dilakukan secara bertahap dan hati-hati dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu dan teknologi di tingkat global dan kondisi serta kebutuhan di tingkat nasional dan lokal serta sumber daya yang dimiliki.

Secara umum dapat dikemukakan, SPMP dikembangkan agar: *pertama*, sebagai acuan dalam memetakan mutu pengelolaan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota, sekolah dan pembelajaran; dan *kedua*, proses dan produk SPMP dapat meyakinkan bahwa pendidikan dan pembelajaran telah dan diupayakan secara terus-menerus memuaskan bagi peserta didik, orang tua siswa dan masyarakat, sumber daya pendidikan sekolah, dan para pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan; *ketiga*, menentukan model fasilitasi peningkatan kinerja sekolah, meliputi: sistem pembelajaran, manajemen berbasis sekolah, dan pemberdayaan masyarakat pendidikan dan masyarakat luas dalam pengelolaan pendidikan di sekolah.

APA TUJUAN SPMP DILAKSANAKAN?

Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan pada berbagai jenjang sekolah dilaksanakan adalah untuk memberikan acuan dan arah program dan kegiatan bagi para pelaksana, Pembina, pengembang pendidikan, dalam proses perencanaan hingga pemantauan pengelolaan pendidikan agar terpadu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan pada Sekolah menjadikan sekolah membangun suatu sistem yang mampu melakukan perbaikan secara terus-menerus.

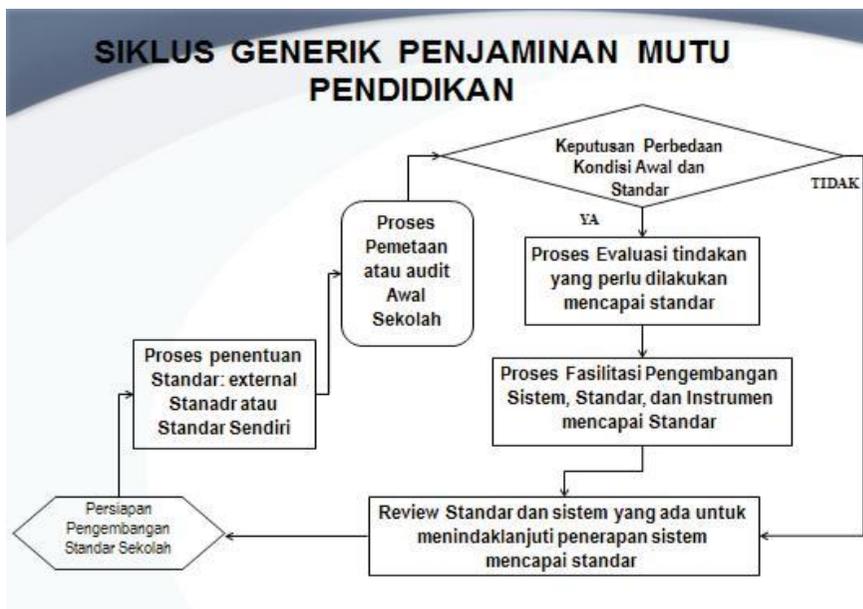
APA MANFAAT SPMP BAGI SEKOLAH?

Berdasarkan rumusan tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan SPMP, tentu proses dan produk SPMP hendaknya mengedukasi masyarakat luas dan sumber daya pendidikan sekolah serta peserta didik itu sendiri. Upaya mengedukasi masyarakat luas melalui SPMP mengingat SPMP meyakinkan semua pihak bahwa pengelolaan pendidikan dilaksanakan secara akuntabel, terukur, sistematis, tranfaran, dan menghargai otonomi sekolah serta mengacu kepada pengembangan peradapan.

Beberapa manfaat yang diperoleh sekolah dalam mengimplementasikan SPMP, yaitu ada empat hal. *Pertama*, memfasilitasi sekolah agar siap menjadi lembaga otonom, demokratis, dan akuntabel dalam perencanaan, implemetasi, dan pengendalian program sekolah mengacu kepada dan mencapai standar minimal, yaitu delapan SNP sebagai standar minimal.

Kedua, memfasilitasi sekolah dalam melaksanakan evaluasi diri sekolah (EDS) dan menyiapkan sekolah mencapai akreditasi yang tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional untuk Sekolah dan Madrasah. *Ketiga*, meningkatkan mutu layanan pembelajaran, profil belajar dan mengajar yang efektif, kreatif, dan menyenangkan peserta didik. *Keempat*, menginspirasi sumber daya pendidikan agar memiliki dorongan internal yang kuat, menjaga budaya mutu, dan senantiasa meningkatkan kemampuan professional secara berkesinambungan.

Skema 2: Siklus Generik Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan pada Suatu Organisasi, termasuk Sekolah (skema dimodifikasi dari model The Quality Assurance Steps, dalam buku Quality Assurance handbook, N.Idrus dkk, 2000: 10)



BAGAIMANA SPMP DI TERAPKAN

Pada dasarnya, sistem penjaminan mutu pendidikan (SPMP) terdiri atas empat tahap, yaitu *pertama*, perencanaan dan pengembangan standar pengelolaan, *kedua*, pemetaan dan audit kondisi pengelolaan, *ketiga*, analisis perbedaan antara kenyataan yang sedang terjadi dan standar yang ditentukan sebagai instrumen mutu, dan *keempat*, fasilitasi dengan berbagai tindakan sistematis dan terprogram untuk mencapai standar.

Skema 2 tersebut mengelaborasi keempat langkah dalam penerapan SPMP dalam suatu organisasi, sekolah. Langkah-langkah tersebut merupakan suatu siklus perbaikan pengelolaan secara terus-menerus dengan standar mutu yang dinamis. Dengan demikian diharapkan adanya sistem budaya mutu (*quality management system*) pada semua sumber daya manusia di dalam sekolah tersebut. Dengan adanya proses yang standar diharapkan terbentuknya produk yang standar juga. Dengan modal sistem ini dijadikan sebagai dasar melakukan *continuous professional development* (CPD).



MUTU PENDIDIKAN

UPAYA yang dilakukan dalam peningkatan mutu pendidikan telah, sedang, dan akan terus dilakukan oleh semua komponen masyarakat dengan cara dan pendekatan yang mungkin sama atau berbeda. ***Pendidikan tidak dapat terhenti, meskipun sejenak, karena hanya menunggu sistem, sarana, program, SDM yang sempurna.*** Usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan akan terus berjalan dan terus dilakukan. Dunia pendidikan adalah milik seluruh umat manusia. Dengan demikian, tidak ada monopoli suatu entitas (baca: institusi) pendidikan yang dapat mengatakan hanya menjadi wilayahnya. Pendidikan adalah wilayah universal, milik semua umat manusia.

Walaupun demikian, dalam melakukan pengembangan dan pembinaan serta inisiasi secara sistemik akan dilakukan terlebih dahulu oleh suatu institusi yang diberi tugas pokok dan fungsi yang disesuaikan dengan karakteristik bidang garapan ini, yaitu pendidikan. Dalam penyelenggaraannya, karena menjadi ketertarikan (baca: *milik*) semua masyarakat, diharapkan setiap saat masyarakat dapat “mengaudit” dan penyelenggaraannya dapat dipertanggungjawabkan secara aka-demis dan moral.

Dalam konteks peningkatan mutu pendidikan, institusi yang paling disoroti oleh semua

lapisan masyarakat, adalah *sekolah*. Konsensus nasional yang dituangkan dalam bentuk Kurikulum (dengan segala dinamika pengembangannya) merupakan salah satu acuan penyelenggaraan pendidikan (pembelajaran). Pengelolaan sekolah agar pembelajaran efektif dan mengakibatkan terjadinya belajar pada diri siswa, diterapkannya Manajemen Berbasis Sekolah (*school-based management*).

Sekolah sebagai organisasi memerlukan pengembangan, pendewasaan, dan penyesuaian terhadap perkembangan di dalam dan di luar organisasi. Dengan demikian memerlukan perubahan. Drucker (*dalam* Sonia Blanford, 1997: 175) menyatakan semua institusi yang bertumbuh berada dalam dua periode, yaitu saat ini dan di masa depan. Hari esok adalah dibuat pada masa kini. Pimpinan hendaknya mengelola keduanya, masa kini dan masa depan; secara sederhana tidak bisa kita katakan hari esok adalah lanjutan masa kini; hendaknya dikelola dengan perubahan, perubahan menentukan peluang dan perlakuan untuk persiapan masa depan.

Drucker menyampaikan pesan pentingnya perubahan untuk persiapan menghadapi masa depan berdasarkan kondisi saat ini, bahkan mutu pun mengalami perubahan seiring dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan dan kebutuhan masyarakat, dinamis. Sehingga mutu dan program untuk mencapai mutu dilihat sebagai sesuatu yang dinamik, sehingga memerlukan perubahan yang terencana dan merupakan upaya sistematis bersama-sama.

Batasan tentang mutu pendidikan mungkin agak beragam atau mungkin sama di antara kita. Permendiknas no. 63 tahun 2012, tentang penjaminan mutu pendidikan, pasal 1 (2) menyatakan, bahwa "mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat di-raih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional". Definisi ini perlu dielaborasi lebih rinci dan operasional pada jenjang sekolah.

Sebagai salah satu pandangan penulis ajukan, dalam melihat, mutu pendidikan, yaitu dari sisi *proses* pendidikan dan *produk* pendidikan (Alit Mariana, 2004). **Pertama, proses pendidikan**, yaitu upaya sistematis oleh institusi dan/atau perorangan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan konsensus nasional melalui Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 (pasal 4). Dalam konteks ini, paling sedikit meliputi: pengelolaan pembelajaran (*class-room management*), pengelolaan sekolah (*schools management*), dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam praktek dan analisisnya, pengelolaan sekolah menggunakan berbagai instrumen, antara lain, standar pelayanan mutu pendidikan. Standar pelayanan ini ditujukan kepada, meliputi: Kepala Sekolah, Guru-guru bidang studi, Guru Bimbingan dan Konseling, dan staf Tenaga Administrasi sekolah, serta Komite Sekolah. Standar kinerja keseluruhan komponen masyarakat pendidikan tersebut hendaknya dirumuskan dengan memperhatikan *matrik kompetensi*, meliputi: kualifikasi (jenjang pendidikan), pelatihan, pengalaman, dan keahlian, serta komponen lain yang dianggap prediktor suksesnya pendidikan. Dengan demikian, masing-masing (pejabat) unit kerja di sekolah akan terlihat kompetensinya dan jelas bila dibandingkan antara standar dan kompetensi staf/pejabat yang satu dengan yang lainnya.

Kedua, produk pendidikan, yaitu segala yang dihasilkan dalam pendidikan melalui persekolahan yang menjadi harapan masyarakat dan sesuai dengan konsensus nasional melalui Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003. Rumusan fungsi dan tujuan pendidikan nasional (ps 3, UU Sisdiknas 20/2003), yaitu: pendidikan nasional berfungsi *mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa*, bertujuan untuk *berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, se-hat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab*.

Hal tersebut (produk pendidikan) dapat dielaborasi, meliputi: yang paling luas dan selalu diawasi masyarakat adalah **kinerja siswa** (*life skills*), **keunggulan-keunggulan** (*comparative advantage*) yang dicapai siswa dan sekolah, dan **pencapaian siswa** (*achievement*) sesuai dengan prosedur tetap (protap) penyelenggaraan pendidikan, serta dokumen standar dan administratif yang sesuai. Di samping itu *profile* sistem pembelajaran, *profile* manajemen sekolah dan *profile* pemberdayaan masyarakat lingkungan juga merupakan produk pendidikan (Alit Mariana, M: 2004).



Skema 3: Model Indikator Keberhasilan Pengelolaan Pendidikan di Sekolah

1. Mutu pendidikan

Mutu pendidikan dapat dirumuskan terdiri atas mutu sekolah dan mutu peserta didik, baik lulusannya maupun yang sedang mengikuti pendidikan di sekolah tersebut, meliputi hal-hal berikut.

- Pencapaian siswa sesuai dengan standar formal tagihan dalam jenjang pendidikan tersebut, meliputi: test formatif, test sumatif, Ujian Akhir Sekolah, Ujian Akhir Nasional. Pencapaian siswa dapat juga mengacu sesuai dengan standar indikator internasional melalui *try-out* soal-soal TIMSS dan PISA.
- Keunggulan personal siswa dan/atau sekolah dalam berbagai peris-tiwa yang memperoleh pengakuan masyarakat luas. **Keunggulan** dapat berupa: **juara** lingkungan sekolah, juara sistem informasi sekolah yang memudahkan akses masyarakat luas dan alumni terhadap sekolah bersangkutan, juara lomba siswa (misalnya IMO, IBO, IPHO, IChO, dll), lomba kreativitas siswa, lomba prestasi guru, dan lomba lainnya. Di samping itu, keunggulan dapat berupa ke-berhasilan siswa **lulus seleksi masuk ke perguruan tinggi** yang berkualitas dan sukses menyelesaikan pendidikannya.
- Kinerja siswa (lulusan maupun yang masih di sekolah tersebut) dalam masyarakat yang ditandai dengan pengakuan masyarakat kerja dan lingkungan terhadap lulusannya, dalam bentuk kompetensi siswa yang langsung dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan lingkungannya. Kompetensi ini ditandai dengan berterimanya masyarakat terhadap lulusan sekolah bersangkutan. Kompetensi sebagai pencapaian siswa dapat pula mengacu kepada model pendidikan kecakapan hidup (*life skills*).

2. Sistem Pembelajaran

Model pembelajaran yang diikuti peserta didik hendaknya secara filosofis memberikan pencerahan, menyehatkan, menguatkan, dan mengobati, yaitu pembelajaran yang, meliputi:

- a. memberdayakan berbagai sumber belajar dalam mencapai kompetensi lulusan;
- b. meningkatkan partisipasi siswa dalam menginvensi secara kreatif berbagai sumber be-lajar untuk menemukan fenomena alam dalam mencapai kompetensi;
- c. suasana kondusif ditandai dengan adanya proses interaksi guru dan siswa dengan profil berpusat pada siswa, *joyful learning*; dan
- d. pembinaan siswa sebagai upaya bimbingan dan konseling bagi siswa sebagai pembi-naan budi pekerti yang tinggi bagi siswa.

3. Sistem Manajemen dan Administrasi Sekolah

Pengelolaan sekolah dilakukan menganut regulasi yang telah ditetapkan, sesuai dengan konsepsi terkini, dan consensus bersama sebagai elaborasi terhadap regulasi yang ada, meliputi:

- a. adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sekolah yang ditandai meningkatnya ki-nerja sekolah;
- b. Tim representatif pengembang dan pengambil keputusan sebagai salah satu wujud penerapan Manajemen Berbasis Sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan indikator keberhasilan sekolah;
- c. pemberdayaan sumber daya pendidikan (SDP) dalam melaksanakan rencana sekolah dengan pengelolaan dokumen sekolah, guru, dan siswa yang memudahkan seluruh civitas akademika dan masyarakat memperoleh informasi;
- d. transfaran-proporsional dalam pengelolaan sekolah yang merupakan wujud implemen-tasi demokrasi di sekolah yang ditandai dengan berbagai regulasi yang dikembangkan sekolah sebagai bentuk konsensus bersama untuk mencapai tujuan dan mentaatinya secara bersama-sama; dan
- e. adanya *system information management* (SIM) yang memungkinkan seluruh kompo-nen masyarakat sekolah dan masyarakat luas dapat mengakses informasi dan dokumen yang menunjukkan paradigma pengelolaan pendidikan di sekolah serta kualitas kinerja keluaran (*outcomes*) sekolah, sehingga dapat dengan mudah memberikan masukan kepada sekolah secara untuk penyempurnaannya.

4. Lingkungan Sekolah dan Sistem Pemberdayaan Masyarakat, meliputi:

- a. internalisasi berbagai sumber daya lingkungan sekolah dalam pengelolaan dan pengembangan sekolah secara profesional dan proporsional dalam hal pembangunan fisik sekitar sekolah yang serasi dan kegiatan lainnya yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (*sustainable development and environmental sound in harmony*);
- b. adanya forum pengembangan sekolah yang secara periodik sebagai wahana bertemu antar berbagai komponen tenaga kependidikan dan guru sebagai upaya memperoleh masukan yang konstruktif bagi manajemen sekolah; dan
- c. peran aktif Komite Sekolah dalam program pengembangan sekolah untuk meningkatkan kinerja sekolah dan aktivitas lain yang menunjang citra sekolah sebagai pusat keung-gulan di lingkungannya;

Beberapa kondisi sekolah dan efektifitas penyelenggaraannya dapat dirumuskan sebagai berikut (<http://www.isbe.state.il.us/EFAB/Survey/DefineEffectiveness.pdf>).

Sekolah dikatakan efektif:

- a. siswa pada setiap tingkat siap mengikuti tingkat selanjutnya atau kesiapan mengikuti jenjang karir;



Skema 4:
Model
Pengembangan
Sekolah

- efektivitas dapat diukur pada pencapaian siswa melalui perbaikan secara terus-menerus, perbaikan yang jelas dalam kurun waktu tertentu adanya membandingkan sebelum dan sesudah perbaikan program;
- efektivitas ditentukan berdasarkan konsensus bersama terhadap keseluruhan kinerja oleh *dinas* kabupaten/kota dan orang tua siswa;
- menghasilkan lulusan sesuai dengan keinginan masyarakat luas, *tidak hanya* prestasi berupa skor ulangan di sekolah;
- kemampuan mencapai hasil yang diinginkan secara ekonomis, peningkatan pembiayaan diikuti dengan kemajuan sesuai standar yang telah ditetapkan;
- efektivitas berdasarkan pada pencapaian tujuan dan kemajuan-kemajuan ke arah yang ditetapkan.”

Jadi, **mutu pendidikan** secara keseluruhan dapat dikemukakan ba-tasan, paling sedikit ada dua hal kelompok besar. *Pertama*, yaitu proses pe-nyelenggaraan pendidikan. Proses pendidikan dapat berupa pelayanan prima yang ditunjukkan oleh sekolah sebagai penyelenggara pendidikan agar siswa dapat belajar dengan efektif – mencapai kompetensi lulusan dan memperoleh pengakuan dari kalangan yang luas. *Kedua*, produk pendidikan sesuai dengan harapan masyarakat. Produk pendidikan dapat berupa kinerja siswa di ma-syarakat dan/atau kemampuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta pencapaian sesuai regulasi yang ditetapkan pemerintah den-gan memperoleh pengakuan secara luas. *Ketiga*, dampak system pendidikan adalah terbentuknya masyarakat yang tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih sesuai dengan kebutuhan Negara dan bangsa.

Standar kompetensi lulusan merupakan bagian dari kemampuan yang harus dimiliki peserta didik untuk digunakan baik melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi maupun kompetensi dalam kecakapan hidup. Kecakapan hidup (*life skills*) merupakan bekal peserta didik untuk melakukan kehidupan sehari-hari secara memadai dan adaptif.



STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

BERDASARKAN regulasi dalam pendidikan, yaitu UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional Pasal 35 (1,2,3), dinyatakan bahwa: Standar nasional pendidikan ter-diri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala; Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan; Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

Lebih lanjut tentang SNP dielaborasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 1 (1) menyatakan bahwa Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya satuan pendidikan atau sekolah atas konsensus bersama antara pengelola sekolah, masyarakat, dan pemangku kepentingan dapat mengembangkan kriteria sekolah unggul sebagai acuan dalam pengembangan sekolah. Delapan standar tersebut sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2005, yaitu sebagai berikut.

1. **Standar kompetensi lulusan** adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejurumannya.

2. **Standar isi** adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/ akademik.
3. **Standar proses** adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Proses pembelajaran pada

KUALIFIKASI PENDIDIK			
JENJANG	KUALIFIKASI	PENDIDIKAN	SERTIFIKAT
PAUD	DIII/S1	Pendidikan PAUD, pendidikan lain, psikologi	profesi guru PAUD
SD/MI	DIII/S1	Pendidikan SD, pendidikan lain, psikologi	profesi guru SD/MI
SMP/MTS	DIII/S1	Pendidikan sesuai mapel yg diajarkan	profesi guru SMP
SMA/MA	DIII/S1	Pendidikan sesuai mapel yg diajarkan	profesi guru SMA
SDLB/SMP LB/SMALB	DIII/S1	program pendidikan khusus, Pendidikan sesuai mapel yg diajarkan	profesi guru SDLB/SMPLB/S MALB
SMK	DIII/S1	Pendidikan sesuai mapel yg diajarkan	profesi guru SMK

Skema 5: Kualifikasi PTK dalam jenjang sekolah

satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif (siswa-sumber belajar-guru), inspiratif (membangun rasa ingin tahu peserta didik), menyenangkan, menantang (*problem-based learning*), memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

4. **Standar pendidik dan tenaga kependidikan** adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar

dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: Kompetensi pedagogik; Kompetensi kepribadian; Kompetensi profesional; dan Kompetensi sosial.

5. **Standar sarana dan prasarana** adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
6. **Standar pengelolaan** adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
7. **Standar pembiayaan** adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
8. **Standar penilaian pendidikan** adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Delapan standar nasional pendidikan (SNP) disamping sebagai arah pengelolaan pendidikan di sekolah, juga merupakan acuan normatif dalam sistem penjaminan mutu pendidikan di berbagai jenjang. System penjaminan mutu dimulai dari sistem pembelajaran oleh guru mata pelajaran, pengelolaan sekolah oleh kepala sekolah, pembinaan sekolah di jenjang kabupaten dan kota oleh Disdik, dan pembinaan sekolah pada jenjang provinsi oleh lembaga yang bertanggungjawab tentang pendidikan tingkat provinsi.

SNP yang diajukan acuan dalam penyelenggaraan sistem penjaminan mutu pendidikan mulai dari sistem pembelajaran sampai dengan jenjang pembinaan pendidikan di provinsi seperti dalam skema berikut.

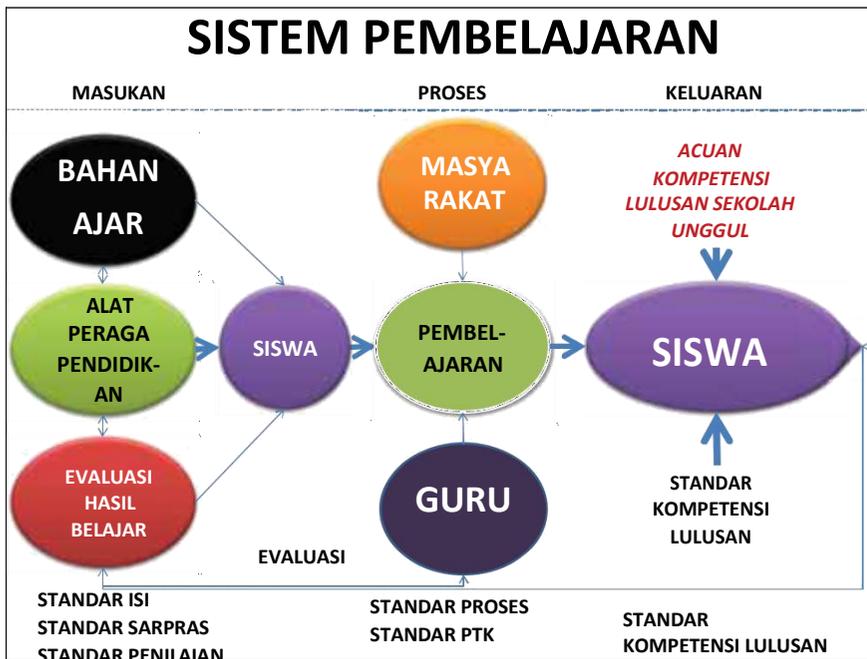
Skema 6: Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Acuan Penjaminan Mutu Pendidikan Pada berbagai jenjang untuk mencapai Tujuan Pendidikan Nasional



Pada tingkat sistem pembelajaran, terlibat di dalamnya guru mata pelajaran, pengawas sekolah, dan kepala sekolah. Ketiga komponen ini mengambil peran masing-masing untuk meyakinkan pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan untuk mencapai kompetensi dasar. SNP yang bekerja didalam sistem pembelajaran, meliputi: standar isi (bahan ajar), standar proses (pembelajaran yang mencerdaskan), standar penilaian (evaluasi hasil belajar), standar sarana dan prasarana (alat peraga pendidikan – APP), standar kompetensi guru (guru yang berkompeten dan berkinerja tinggi), dan standar kompetensi lulusan (pencapaian hasil belajar peserta didik).

SNP DAN SISTEM PEMBELAJARAN

SNP yang bekerja dalam sistem penjaminan mutu pendidikan pada jenjang sistem pembelajaran dapat direpresentasikan seperti berikut.



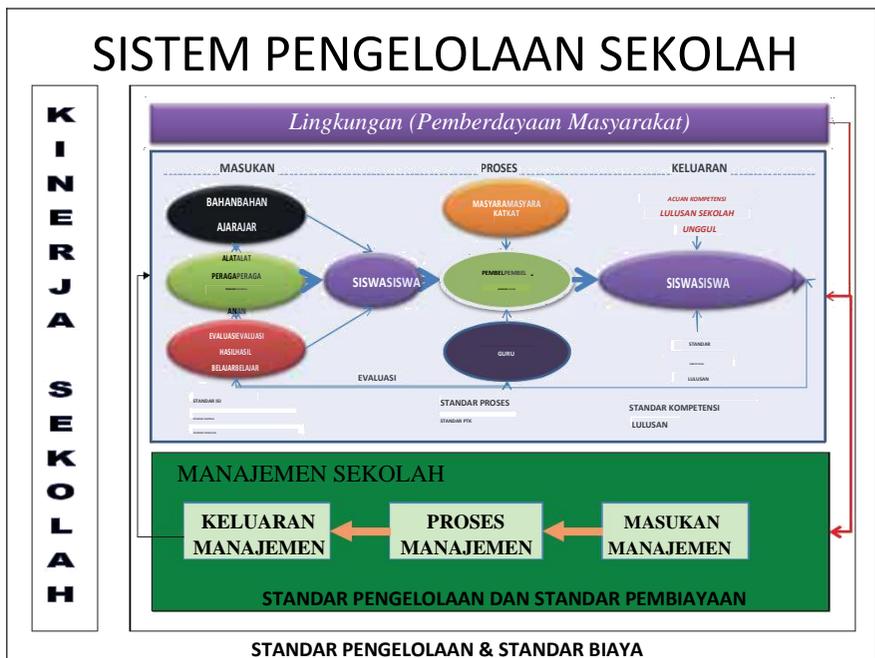
Skema 7: SNP yang bekerja sebagai acuan dalam melaksanakan sistem pembelajaran sesuai mata pelajaran di sekolah oleh guru mata pelajaran

Pada sistem pembelajaran, peran guru sangat sentral dalam menciptakan suasana belajar. *Guru mempunyai peran penting dalam melaksanakan kurikulum untuk mencapai kompetensi lulusan.* Kompetensi guru adalah bagian dari variable yang mempengaruhi kinerja pembelajaran, di samping bahan ajar, APP, dan alat evaluasi. Kurikulum dalam makna luas mencakup segala hal yang berhubungan dengan pembelajaran agar peserta didik dapat belajar. Dengan demikian, kurikulum dapat diartikan sebagai instrument dinamis yang dijadikan acuan dalam pengelolaan pendidikan, harus mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu dan teknologi. Kreativitas adalah salah satu kata kunci bagi guru dalam menciptakan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan.

Penjaminan mutu pendidikan pada jenjang sekolah, berupa pengelolaan sekolah yang di dalamnya bekerja sistem pembelajaran. Artinya, semua standar yang bekerja untuk sistem pembelajaran juga diacu dalam pengelolaan sekolah. Disamping itu, adanya standar lain yang bekerja, yaitu standar pengelolaan serta standar pembiayaan menyebabkan pada jenjang pengelolaan sekolah, proses penjaminan mutu pendidikan dilakukan. dengan demikian, delapan standar nasional pendidikan (SNP) menjadi tolok ukur kinerja sekolah. Instrumen pemetaan mutu sekolah diantaranya evaluasi diri sekolah (EDS) yang secara terus-menerus dikembangkan seiring dengan dinamika perkembangan kebutuhan dan ilmu dan teknologi.

Keseluruhan komponen SNP yang menjadi acuan dalam penjaminan mutu pendidikan dalam konteks pengelolaan sekolah merupakan basis pemetaan mutu pendidikan. Peta mutu pendidikan yang diperoleh merupakan bahan strategis dalam menentukan model fasilitasi peningkatan mutu pendidikan. Model penjaminan mutu pendidikan pada jenjang sistem pengelolaan sekolah dapat direpresentasikan seperti berikut.

Skema 8: SNP sebagai acuan mutu dalam pengelolaan sekolah, dan prediktor kinerja sekolah unggul sekolah secara menyeluruh



Pembinaan sekolah pada jenjang kabupaten dan kota serta provinsi berbasis pada hasil pemetaan mutu pendidikan pada jenjang sekolah, yang dalam pengambilan data implementasi SNP, menggunakan instrumen EDS dan instrumen lainnya yang relevan. Koordinasi pemetaan mutu pada tahap ini, melibatkan institusi yang diberi wewenang dan tanggung jawab oleh regulasi baik di tingkat kabupaten dan kota, maupun pada jenjang provinsi, dengan LPMP sebagai unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di provinsi. Penjaminan mutu pendidikan pada jenjang nasional, dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan (PPMP), BPSDMPK & PMP, Kemdikbud.

Dengan demikian, sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 3, bahwa Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

ETOS KERJA DAN KEMAMPUAN PROFESIONAL

Upaya pengembangan kemampuan profesional guru, secara terus-menerus dilakukan setelah calon guru keluar dan lulus dari lembaga *pre-service*. Peristiwa pembinaan kemampuan profesional dalam menunjang tugas sehari-harinya disebut *in-service education and training* (in-set) atau diklat (pendidikan dan latihan). Upaya in-set dilanjutkan dengan *on-service*, yaitu pembinaan lanjutan terhadap guru di tempat bertugas sehari-hari dalam menerapkan inovasi yang dibahas dalam diklat. Berbagai lembaga pemerintah dan non pemerintah melakukan tugas untuk memberikan pembinaan berkelanjutan terhadap Guru.

Program pembinaan lembaga tersebut biasanya mengatasmakan kebutuhan profesional guru yang bersangkutan dan/atau proyeksi kebutuhan guru di masa depan. Sebagai guru yang kebutuhan profesionalnya induksi dan ekstensi, yaitu pementapan diri dalam tugas profesinya untuk meningkatkan kepercayaan diri, salah satu materi yang diperlukan adalah "Etos Kerja dan Kemampuan Profesional Guru".

Materi ini merupakan suatu tinjauan ilmiah, yaitu proses deduksi (bersandarkan pada pre-mis-premis yang ada) dan induksi (mempertimbangkan fakta empiris yang diperoleh dalam pengalaman melaksanakan diklat), serta abduksi (proses deduksi dan induksi secara bersama-sama) untuk memperoleh semacam generalisasi.

Ada pandangan yang berbeda secara ekstrem tentang tugas kependidikan (bukan mengajar) yang dilakukan oleh seseorang yang disebut guru itu. Salah satu pandangan menyatakan seseorang dapat melakukan tugas guru bila seseorang menguasai substansi materi yang akan diajarkan. Pandangan yang lain menyatakan tanpa memahami aspek kependidikan seseorang belum profesional melakukan tugas kependidikan (untuk tingkat dasar dan menengah).

Kedua pandangan tersebut dapat kita katakan saling melengkapi satu dan yang lainnya. Seseorang tidak mungkin melakukan tugas mengajar jika dia tidak mengetahui apa yang akan diajarkan, atau paling tidak, tidak mengetahui arah/mengarahkan siswa dalam belajar. Pembelajaran juga tidak akan berjalan optimal kalau tidak memperhatikan bagaimana cara siswa belajar, apa yang terjadi dalam diri siswa, bagaimana pebelajar mengkonstruksi pengetahuan dalam struktur kognitifnya, dan bagaimana pencapaian belajar.

Untuk memahami kedua pandangan tersebut, ada disiplin ilmu yang secara sistematis memberikan pengalaman dan pemahaman tentang kemampuan profesional seorang guru. Maka-lah ini tidak membahas secara mendalam disiplin ilmu ini, tetapi mencoba mengembalikan atau menentukan kembali atau mereview kontrak intelektual antara guru dengan siswa terhadap suatu bangunan bahan ajar tematik dan terpadu.

Upaya profesional tersebut ini dengan pendekatan, meliputi: sensasi (fenomena alam dan/atau fenomena pembelajaran, persepsi (tentang penjelasan fenomena itu), keyakinan terhadap adanya fenomena tersebut, dan aksi profesional terhadap keyakinan pembelajaran yang terbaik. Berdasarkan keyakinan tentang bahan ajar, cara siswa membangun pengetahuan, dan penciptaan lingkungan belajar yang kondusif ini, seseorang akan bertindak sesuai dengan keyakinan yang telah diarahkan dengan adanya persepsi yang benar terhadap suatu fenomena-fenomena tersebut. Hal ini diharapkan guru melaksanakan pembelajaran yang terbaik, mengaktifkan peserta didik secara mental dan fisik yang optimal, penguasaan bahan ajar yang memadai, proses pendidikan yang profesional, berdasarkan kesadarannya yang mendalam, bukan sebagai suatu keterpaksaan. Diklat atau fasilitasi yang membangun pemahaman, memantapkan kesadaran, menginspirasi,

dan mengarahkan peserta diklat agar melaksanakan pembelajaran yang ter- baik inilah disebut sebagai intervensi profesional dalam fasilitasi peningkatan kemampuan profesional guru. Dengan demikian, standar diklat akan men- jadi sangat strategis; diklat yang terstandar baik proses maupun muatan dan fasilitatornya diharapkan menjamin dibangunnya produk diklat yang standar pula dan meningkatkan kemampuan profesional guru. Semoga!

Kegiatan yang membuat seseorang belajar memerlukan suatu desip- lin ilmu, agar dapat melaksanakan tugas secara sistematis dan logis yang disebut profesi. Suatu kinerja yang memperoleh pengakuan yang luas sesuai dengan kemunitasnya dan masyarakat luas.

Profesi merupakan bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan ke- ahlian (keterampilan, kejuruan, dsb) tertentu sehingga mempunyai kompe- tensi (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Profesi adalah deklarasi, pengakuan tentang keyakinan ..., termasuk cabang belajar atau sains (*The New Oxford Encyclopedic Dictionary*, 1991: 1348). Pendidikan keahlian ini dapat saja diikuti seseorang secara formal dalam lembaga persekolahan. Atau dapat juga dipelajari secara otodidak (belajar sendiri) yang pencapaiannya berupa kinerja yang dapat diakui oleh masyarakat profesional dan masyarakat luas (tanpa perlu ada perjanjian terlebih dahulu antar masyarakat).

Profesionalisme dapat dikatakan sebagai mutu, kualitas, dan tindak- tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional (me- miliki keahlian). Hal ini ditandai dengan adanya standar atau jaminan mutu seseorang dalam melakukan suatu upaya profesional. Jaminan mutu ini dapat saja dalam kalangan terbatas – di lingkungan profesi – atau dapat juga dalam lingkungan yang luas – oleh masyarakat umum membuat penilaian terhadap kinerjanya.

Skema 9: Proses filosofis membangun keyakinan dan pengetahuan sebagai basis melaksanakan pembelajaran yang penuh kesadaran



Etos kerja merupakan semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keya- kinan seseorang (dalam hal ini kelompok guru). Etos kerja seorang profesional guru, adalah selalu membangun suasana ilmiah, memberikan kesempatan kepada siswa belajar dengan berbagai sumber belajar, dan membangun mak- na baik melalui interaksi sosial maupun interkasi personal serta menginter-

nalisis cara pengetahuan diperoleh, substansi ilmu pengetahuan bahan ajar, dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari.

Skema 9 memperlihatkan proses terbentuknya suatu keyakinan terhadap suatu hal (ciri profesional), yang merupakan prediktor seseorang bertindak sesuai dengan keinginannya yang mencerminkan seseorang yang melek sains dan teknologi. Skema ini disarikan dari *buku The Philosophy of Mind: An Introduction* oleh Peter Smith dan O.R. Jones dan disesuaikan dengan arah pendidikan sains.

Sebagai petugas profesional dalam pendidikan, yaitu mengarahkan siswa kepada tujuan pendidikan, membentuk masyarakat yang sadar/literasi sains dan teknologi (LST). Dengan demikian, siswa diberi kesempatan untuk membentuk persepsi tentang fenomena yang dipelajarinya dan proses pembuatan penjelasan terhadap fenomena alam.



Skema 10: berbagai prediktor membangun kinerja pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar

Pemberian sensasi atau membangun suasana yang menciptakan bangkitnya sensasi peserta didik adalah untuk merangsang emosi atau membuat terjaga emosi siswa terhadap suatu fenomena alam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini diharapkan dapat mengkativitasi konsepsi siswa yang relevan dalam memori atau struktur kognitifnya agar siap mengkaji dan membangun persepsi ilmiah berikutnya dan meletakkannya informasi baru dalam pengetahuan yang telah dimilikinya secara bermakna.

Persepsi merupakan deskripsi dan pola (fenomena alam) yang dibuat sesuai dengan kaedah keilmiah (melalui prosedur ilmiah) yang merupakan explanasi terbuka dan dinamis (ilmiah) suatu fenomena alam di alam terbuka penuh tahasia inidalam alam pikiran pebelajar. Persepsi seseorang terhadap suatu hal, merupakan pencerminan pemahaman seseorang tentang hal tersebut, sebagai hasil proses belajar. Biasanya persepsi dibangun seseorang dengan menggunakan cara sendiri dan susuna kalimat sendiri dengan makna yang sama.

Keyakinan (*belief*) yang terjadi dan dibangun secara aktif menjadi kesan dan arahan seseorang dalam melakukan suatu upaya sistematis (baca: profesional). Untuk selanjutnya keyakinan ini akan sangat mewarnai tindakan (perilaku) seseorang dalam melakukan tugas-tugas profesional baik secara sadar maupun tidak sadar, yang disebut guru yang intuitif. Artinya, persepsi dan keyakinan terhadap prediktor pendidikan (pebelajar, bahan ajar, suasana belajar, dll) telah menjadi “milik” dalam hidupnya, sehingga dalam melaksanakan tugas profesional tidak *textbooks thinking*, tetapi persepsi ilmiahnya menjadi kesatuan dalam kehidupannya. Dan ..., profesi guru hendaknya menjadi panggilan (tidak hanya untuk mencari nafkah) dalam hidupnya, sebagai sesuatu yang mestinya dilakukan sebaik-baiknya.

Dengan demikian, guru senior (dalam persepsi, keyakinan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan disiplin profesinya) akan bertindak secara intuitif (disiplin ilmu sebagai miliknya) dalam mengemban tugas profesinya, meskipun dalam situasi dan kondisi belum ideal atau lengkap keseluruhannya. Dengan demikian kinerja pembelajaran mempunyai makna pedagogis dan strategis bagi pembentukan kompetensi siswa dan juga membangun karakter peserta didik. Pendidikan tidak boleh terhenti meskipun sarana dan prasarana serta sistem pendidikan belum sempurna, pendidikan harus terus dilaksanakan dalam kondisi bagaimanapun.

Kemampuan profesional guru ditandai dengan kompetensi, yaitu sebagai berikut. Kompetensi guru berikut dikutip dari buku *Learning to Teach Science: Activities for Student Teachers and Mentors*, Martin Monk & Justin Dillon: 1995.

Paling sedikit kemampuan profesional guru, meliputi pengetahuan tentang: pendidikan (pengajaran) materi subjek, pengelolaan kelas, kurikulum, materi subjek, terjadinya belajar pada siswa, konteks pendidikan (sosial, budaya, isu, dll), dan landasan filosofis pendidikan. Hal ini sejalan dengan empat kompetensi pendidikan sesuai dengan SNP.

Kompetensi ini merupakan standar minimal profesi guru. Dengan demikian pembentukan persepsi diarahkan kepada hal-hal tersebut di atas, yaitu: pemahaman tentang cara membela-jarkan siswa, pengelolaan kelas (kecenderungan pendekatan), memahami kurikulum, memahami materi subjek yang akan diajarkan, memahami siswa dan cara mereka belajar, memahami konteks pendidikan (budaya, sosial, isu, gender, dan organisasi sekolah), memahami latar belakang falsafah, sejarah dan arah pendidikan.

Kompetensi guru ini akan mempengaruhi kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. Kinerja pembelajaran dapat digambarkan pada SKEMA 10.

Keyakinan seorang guru yang dipengaruhi oleh kompetensi tersebut, mempengaruhi kinerja pembelajaran dan pada gilirannya mempengaruhi kesempatan siswa menginternalisasi hakekat . Kompetensi tersebut dapat dikelompokkan menjadi kemampuan profesional dan kemampuan sosial.

Etos kerja merupakan semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang dalam mengemban tugas sebagai guru , yaitu membangun suasana ilmiah, dan membangun makna melalui interaksi sosial dan personal, memberi kesempatan siswa menginternalisasi cara diperoleh, substansi ilmu pengetahuan alam, dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari.

Kemampuan profesional sebagai mutu, kualitas, dan tindak-tanduk suatu profesi atau orang yang memiliki keahlian, ditandai adanya standar atau jaminan mutu seseorang dalam melakukan suatu upaya profesional. Jaminan mutu ini berupa kompetensi sebagai guru , meliputi: pengetahuan tentang: pendidikan (pengajaran) materi subjek, pengelolaan kelas, kurikulum, materi sub-jeK, terjadinya belajar pada siswa, konteks pendidikan (sosial, budaya, isu, dll), landasan filosofis pendidikan . Keseluruhan ini bermuara pada kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran atau transaksi intelektual antara guru dan siswa.

1 Proses Kinerja Pembelajaran dan Pencapaian Siswa. Faktor sumber belajar, kurikulum, dan kesejahteraan tenaga kependidikan mempengaruhi kemampuan profesional dan sosial guru, ... dan ini mempengaruhi keyakinan guru terhadap implementasi pengetahuan dan keterampilan dalam tugas. Pada gilirannya dalam melaksanakan tugasnya, akan dipengaruhi juga kinerja pembelajarannya yang ditandai dengan aktivitas guru dan aktivitas siswa. Pengalaman belajar siswa mempengaruhi pencapaian dan kinerja siswa dalam masyarakat.

Kinerja siswa sebagai insan yang LST adalah dapat menerapkan konsep dasar dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan proses ilmiah dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari, dan dapat menempatkan konteks dalam sosial budaya.

KOMPETENSI GURU IPA

- Pemahaman tentang pembelajaran materi IPA (fisika, kimia, biologi) atau bahan ajar.
- Pemahaman tentang pengelolaan dan pengorganisasian kelas.
- Pemahaman tentang kurikulum.
- Pemahaman tentang bahan ajar (IPA: fisika, kimia, biologi).
- Pemahaman tentang siswa dan cara mereka belajar.
- Pemahaman konteks pendidikan (budaya, masyarakat, isu, jender, pengelolaan sekolah)
- Pemahaman tentang arah pendidikan, tujuan & nilai, dan falsafahnya).

Skema 11:
Kompetensi operasional guru IPA yang berkaitan langsung dengan kinerja pembelajaran

PENGELOLAAN PERUBAHAN DI SEKOLAH

Ada baiknya kita tinjau acuan standar dalam melihat upaya pengelolaan perubahan di sekolah, yaitu UU NO 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Enam prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan (ps 4, UU Sisdik-nas NO 20/2003), yaitu sebagai berikut.

- (1) Diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa.
- (2) Diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multifungsi.
- (3) Diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Dari UU Sisdiknas tersebut dapat kita hubungkan dengan semacam elaborasi agak teknis dengan pandangan yang disampaikan oleh para ahli, misalnya Wohlstetter & Mohrman.

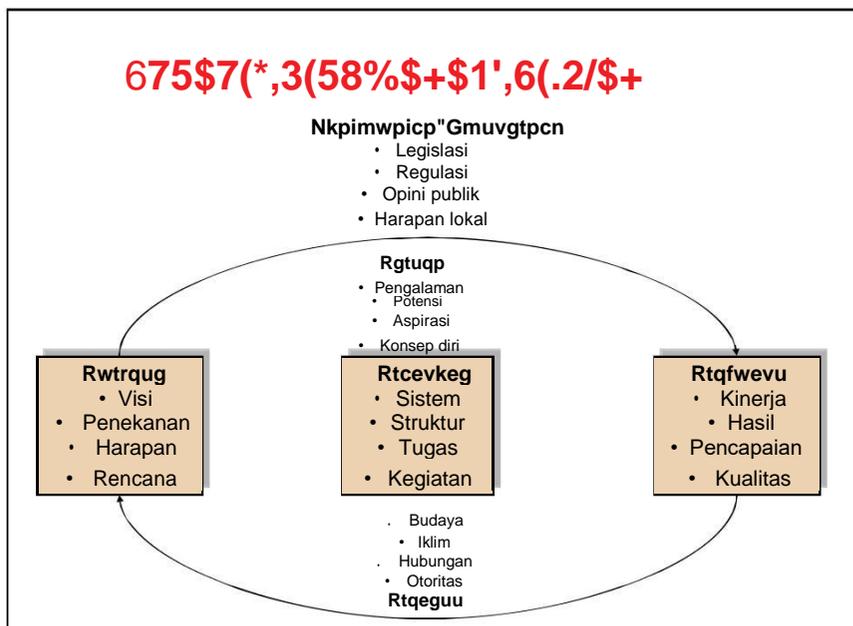
Wohlstetter & Mohrman, (1996) menyarankan enam strategi agar pengelolaan sekolah dapat berjalan secara efektif (melalui manajemen berbasis sekolah) dan mencapai tujuan.

Anatomi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Refleksi Pengelolaan Pendidikan di Bali

- (1) *Disperse power throughout the school organization so that many stake-holders participate in decision-making.* Berbagi gagasan dan pandangan sehingga sebagian besar para “pemilik” sekolah punya kekuasaan dalam pengambilan keputusan sebagai keputusan organisasi dan sebagai komitmen bersama.
- (2) *Make professional development an ongoing, school-wide activity.* Biarkan terus berjalan pengembangan kemampuan profesional seluruh komponen tenaga kependidikan melalui berbagai kegiatan, dan kegiatan profesional sekolah sesuai dengan standar minimal.
- (3) *Disseminate information broadly so that SBM (schools-based management) participants can make informed decisions about the school organization and all stakeholders are kept informed about school performance.* Laksanakan dan gunakan informasi yang relevan sebagai bahan pengambilan keputusan dan dengan demikian para “pemilik” sekolah selalu memegang teguh kinerja yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (4) *Frequently reward individual and group performance on progress toward school goals.* Sebagai wujud adanya perhatian yang serius dari para pengambil keputusan, secara periodik (sering-sering) memberikan penghargaan terhadap kinerja yang baik dan luar biasa (outstanding) dan sebagai upaya untuk menimbulkan kemajuan sesuai dengan tujuan sekolah.
- (5) *Select principals who can lead and delegate.* Kepala sekolah hendaknya dapat menjadi pemimpin dan manajer serta dapat mendelegasikan tugas-tugas secara tepat guna.
- (6) *Adopt a well-defined vision for curriculum and instruction to direct reform efforts.* Ambil dan gunakan visi yang rumusnya – dari manapun datangnya – yang baik untuk muatan kurikulum dan pembelajaran untuk mengarahkan upaya reformasi di sekolah.

Skema 12: Strategi Pengelolaan Perubahan di Sekolah yang Memungkinkan Adanya Peningkatan Mutu Pendidikan



Menurut Whitaker (1995: 112), *framework* dan strategi perubahan di sekolah, dalam bentuk peta konseptual sangat penting sebagai instrumen analisis, yaitu sebagai berikut. Pertama, *Person*, meliputi: pengalaman, potensi, aspirasi, dan konsep diri. Sumber Daya Manusia hendaknya mempunyai potensi (*learning > changing*) sehingga dapat mengelola perubahan itu sendiri (tidak tergilas oleh perubahan tersebut). Konsep diri dan aspirasi seseorang mengarahkan perubahan itu sendiri dan akan terakselerasi dengan adanya pengalaman (sehari-hari dan pendidikan). Sebagai instrumen analisis terhadap aspek *person* dapat menggunakan pertanyaan berikut.

1. *Bagaimana pengalaman kehidupan peserta didik, staf, dan guru di sekolah?*
2. *Dengan cara bagaimana mereka respek terhadap aspirasi individual?*
3. *Bagaimana kenyamanan kerja pribadi diusahakan oleh sekolah?*

Kedua, *purpose* meliputi: visi, penekanan, harapan, perencanaan. Visi merupakan arah ke-majuan suatu organisasi yang memungkinkan organisasi itu belajar dan untuk itu setiap personal hendaknya dapat belajar. Visi dielaborasi menjadi penekanan (*intentions*) atau dapat juga diartikan sebagai misi. Misi atau penekanan merupakan elaborasi visi yang telah memasukkan unsur harapan masyarakat luas dan masyarakat sekolah. Misi ini dijadikan panduan dalam merumuskan rencana kegiatan sekolah dalam mencapai tujuan. Sebagai instrumen analisis terhadap aspek *purpose* dapat menggunakan pertanyaan berikut.

1. *Apa tujuan yang diinginkan dan dirumuskan sekolah yang merupakan konsensus bersama?*
2. *Apa visi di masa mendatang yang ingin dicapai secara individual dan organisasi secara keseluruhan?*
3. *Bagaimana visi, misi, dan rencana program dicapai dan menjadi kepedulian bersama?* Ketiga,

practice, meliputi: sistem, struktur, tugas pokok, dan kegiatan. Kepedulian kita pada tindakan sebagai transfer dari aspek tujuan. Dalam mencapai tujuan, struktur yang ada hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dan misi. Tujuan memberikan arah dalam setiap tindakan yang dilakukan secara bervariasi: dalam struktur dan sistem, distribusi sumber daya, kurikulum muatan lokal, alokasi jumlah rombongan belajar siswa, jadwal kegiatan, dan peranan khusus dari masing-masing staf di sekolah. Sebagai instrumen analisis aspek *practice* dapat menggunakan pertanyaan berikut.

1. *Apa latihan yang esensial dilakukan sekolah untuk meraih visi dan melaksanakan program?*
2. *Bagaimana struktur, prosedur, dan sistem yang berhubungan dengan perencanaan agar efektif dan efisien?*
3. *Bagaimana tugas-tugas dan kegiatan ditentukan dan dikerjakan bersama sebagai komitmen bersama?*

Keempat, **products**, meliputi: kinerja (*outcomes*), hasil (*results*), pencapaian, dan mutu atau kualitas. Dalam tahap ini memperhatikan penilaian terhadap hasil akhir dan pencapaian. Sekolah yang produktif yaitu berhasil membawa peserta didik mencapai tujuan dan perubahan pada diri partisipan (siswa). Jadi, dalam menentukan produk, faktor penentuan *outcomes* dan pengukuran kualitasnya sangat penting. Sebagai instrumen analisis aspek *products* dapat menggunakan pertanyaan berikut.

1. *Dengan cara bagaimana komitmen yang telah dirumuskan ditinjau-ulang secara periodik?*
2. *Bagaimana prosedur pengukuran produk, kinerja, dan kemajuan yang dapat dijadikan sebagai umpan balik dalam proses manajemen?*
3. *Bagaimana hubungannya dengan rencana? Bagaimana produk dapat dijadikan sebagai umpan balik terhadap sistem yang ada untuk mencapai peningkatan mutu?*

Kelima, **process**, meliputi: budaya, iklim kerja, hubungan, otoritas atau kekuasaan. Cara seseorang berinteraksi satu dengan yang lainnya merupakan proses untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, hal ini berkaitan erat dengan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut masyarakat setempat, selain isi materi yang mesti disampaikan dalam proses (kegiatan). Pengembangan bu-

daya dan iklim kerja hendaknya dilihat sebagai penekanan yang nantinya dituangkan kedalam visi sekolah. Sebagai instrumen analisis aspek process dapat menggunakan pertanyaan berikut.

1. *Dengan cara apa budaya organisasi, iklim, dan etos kerja membentuk bagian yang eksplisit dari rencana pengembangan, pengambilan keputusan, dan pengembangan kemampuan profesional?*
2. *Dengan cara apa sekolah dapat menjadikan sekolah sebagai organisasi belajar dalam kon-teks pengembangan staf untuk peningkatan mutu?*
3. *Dengan cara bagaimana kegiatan tersebut mendorong kerja kelompok dalam mengem-bangkan keterampilan dari suatu pengelolaan kolaboratif yang kompak?*

Faktor lain selain kelima tersebut di atas adalah lingkungan eksternal, meliputi: legislasi, regulasi, opini publik, dan harapan masyarakat setempat. Faktor eksternal ini seringkali merupakan intervensi politis, berupa peraturan dan penafsirannya serta opini masyarakat luas (teru-tama oleh orang yang berpengaruh) dan sangat menentukan arah pendidikan, meskipun berbeda dengan visi yang dirumuskan sekolah. Dalam hal ini, kemampuan masyarakat pendidikan (Kepala Sekolah dan Komite Sekolah serta guru) dalam meyakinkan para stakeholder ini menjadi hal yang sangat penting. Sebagai instrumen analisis aspek lingkungan eksternal dapat menggunakan per-tanyaan berikut.

1. *Kekuatan apa saja yang sedang mempengaruhi di sekolah, bagaimana hal ini diterima, apakah dikomunikasikan dengan masyarakat di luar sekolah khususnya kepada stakeholder?*
2. *Seberapa jauh rentang ekspektasi yang dituangkan dalam rencana tindakan untuk meraihnya?*
3. *Bagaimana sekolah melihat hal tersebut di atas dihubungkan dengan akselerasi perubahan yang diinginkan?*

Segala upaya yang dilakukan dalam pengelolaan pendidikan di sekolah pada hakekatnya adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan kebutuhan bangsa. W Edward Deming (dalam Sallis: 1993 46) menyarankan 14 hal yang mesti diperhatikan untuk meningkatkan mutu dalam hal pengelolaan pendidikan di sekolah, yaitu sebagai berikut.

1. Ciptakan kejelasan tujuan perbaikan pelayanan (proses) dan produk, dengan merumuskan arah yang mempunyai daya saing agar berkesinambungan.
2. Adopsi filosofi yang baru, yaitu cara kerja yang benar dan mengubahnya kearah "organisasi tidak dapat berkompetisi bila serba tertunda, adanya kekeliruan, bahan yang tidak berguna, dan produk yang salah".
3. Hilangkan ketergantungan pada harapan yang berlebihan untuk mencapai kualitas. Manaje-men sebaiknya menyiapkan staf (melalui diklat) teknis yang diperlukan untuk pemantauan dan pengembangan kualitas dirinya.
4. Hentikan tindakan pemberian penghargaan berdasarkan harga. Harga tidak ada maknanya tanpa adanya ukuran mutu terhadap produk yang diperoleh dan/atau dihasilkan.
5. Perbaiki secara ajeg sistem layanan dan produksi untuk meningkatkan mutu dan produkti-vitas dan mengurangi biaya yang tidak perlu.
6. Budayakan adanya pelatihan dalam tugas, kerugian yang terbesar bagi manajemen adalah kegagalan menggunakan kecakapan staf secara optimal.
7. Budayakan kepemimpinan, tugas manajemen bukan supervisi tetapi kepemimpinan, arti-nya arahkan kepemimpinan kepada peran pemimpin yang mendorong perbaikan proses dalam produksi untuk memperoleh hasil dan layanan yang lebih baik.
8. Hilangkan rasa takut dalam bekerja, sehingga setiap orang dapat bekerja secara efektif.
9. Carikan dan temukan solusi setiap masalah yang ada di antara unit kerja secara tuntas.
10. Hilangkan slogan, target, dan pajangan tentang produk baru tanpa adanya panduan dalam mengerjakannya secara lebih baik.

11. Hilangkan standar kerja yang hanya menentukan angka-angka, mutu tidak diukur hanya ber-konsentrasi pada keluaran, hanya pada tataran angka-angka mengarahkan pada pemengga-lan mutu itu sendiri yang tidak proporsional.
12. Hilangkan masalah di antara orang-orang dan tumbuhkan rasa kebanggaan terhadap teman sekerja.
13. Budayakan program pendidikan dan peningkatan diri, sebagian besar orang tahu hal yang harus dikerjakan, staf yang berpendidikan lebih baik akan lebih menentukan peningkatan mutu.
14. Tempatkan setiap orang di dalam organisasi secara tepat yang memungkinkan adanya transformasi.

Keseluruhan pandangan para ahli tersebut pada dasarnya mengarahkan kepada adanya rumusan arah dan tujuan, rencana tindakan dan strategi mencapai tujuan, kerja kelompok, kapa-sitas personal yang memadai, dan adanya kebanggaan akan tugas pada masing-masing unit kerja yang diembannya.

Pemerintahan otonomi daerah (Kabupaten atau Kota) mengendalikan sekolah agar terjadi pembelajaran di sekolah. Masyarakat sekolah terdiri atas: Kepala Sekolah, Guru, Staf Administrasi Sekolah, Orang Tua Siswa, dan Komite Sekolah, dan Siswa. Keterlibatan semua komponen secara sinergi memungkinkan para stakeholders meningkatkan rasa memiliki dan akuntabilitas kinerja sekolah.

Agar sekolah dapat melaksanakan pengelolaan secara terakunkan, *people at the school site must have "real" authority over budget, personnel and curriculum*, (Wohlstetter & Mohrman, 1996). Otoritas ini digunakan untuk mengelola perubahan, yang pada gilirannya mempengaruhi proses pembelajaran, dan mutu pendidikan dapat meningkat sesuai dengan harapan masyarakat yang dituangkan kedalam visi, misi, tujuan, dan strategi suatu rencana tindak sekolah.

Berdasarkan proses induktif dan deduktif terhadap pengelolaan sekolah dapat dikemukakan beberapa tantangan yang mungkin mengemuka dalam pengelolaan pendidikan di masa depan, yaitu sebagai berikut. *Pertama*, kemampuan masyarakat sekolah untuk meyakinkan masyarakat luar sekolah tentang paradigma yang digunakan dalam mengelola sekolah hendaknya semakin kuat. Hal ini diakibatkan karena tingkat pendidikan masyarakat secara perlahan meningkat yang pada gilirannya kemampuan 'mengaudit' penyelenggaraan pendidikan semakin tinggi.

Kedua, kemampuan memberdayakan secara optimal sumber daya yang dimiliki sekolah dan ada di sekitar sekolah sebagai pendorong kemajuan sekolah. Pengenalan siswa terhadap potensi lingkungan semakin diperlukan dan sekolah hendaknya memberikan pengalaman dan mengkaji tentang potensi di sekitarnya. *Ketiga*, pemberdayaan sumber daya manusia yang ada di sekolah dan masyarakat sekitar sekolah yang peduli dengan pengembangan pendidikan. Di antara masyarakat sekitar pasti ada yang peduli dan kemampuan lebih tentang lingkungannya, memanfaatkan SDM di sekitar baik dalam bentuk pemikiran maupun dalam bentuk materi dan jasa.

Keempat, dimasa mendatang (saat ini sedang terjadi) informasi tidak dapat dibendung, kemampuan memperoleh informasi sangat diperlukan, sehingga sekolah dapat memberikan pelayanan yang demokratis kepada siswa dalam memperoleh informasi. Kelima, setelah kecakapan memperoleh informasi dimiliki siswa, masalah berikutnya adalah upaya (kecakapan) menyeleksi informasi yang relevan dengan kebutuhan agar waktu dan energi tidak tersita banyak dalam mengelola informasi (melalui internet). Dengan adanya "banjir" dari segala penjuru, menyebabkan batas wilayah negara (dalam layanan informasi) tidak tampak lagi.

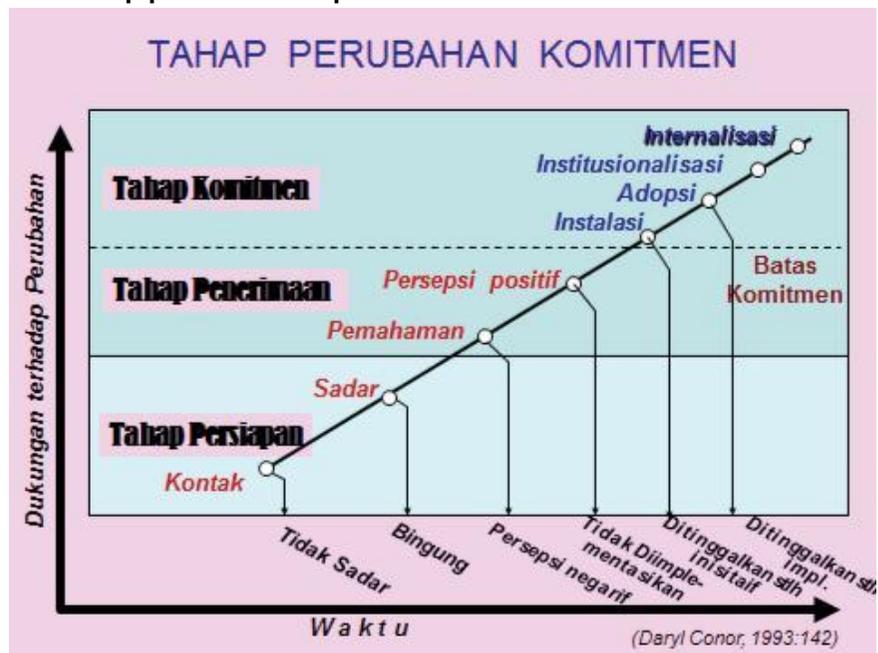
Pengelolaan perubahan di sekolah merupakan upaya mengarahkan perubahan dalam bentuk suatu rencana tindakan sekolah sesuai dengan batasan mutu pendidikan dengan memperhatikan seluruh komponen masyarakat sebagai prediktor dominan mencapai tujuan pendidikan. Dengan kompetensi kepala sekolah yang memadai, guru-guru yang loyal dan berkompeten, staf

yang kolaboratif, dan masyarakat yang peduli dan kooperatif serta adanya regulasi yang memadai mudah-mudahan penyelenggaraan pendidikan dapat terlaksana sesuai dengan harapan dan dapat dipertanggungjawabkan se-cara akademis dan moral.

Beberapa tahapan yang biasanya dilalui dalam menerapkan perubahan atau inovasi dalam suatu organisasi atau sekolah, yaitu tiga tahap. Daryl R Conner (1992: 148) menyatakan, *pertama*, tahap persiapan penerapan, *Kedua*, tahap penerimaan program, dan *ketiga*, tahap membangun komitmen. Conner mencoba membuat korelasi antara tingkat dukungan terhadap perubahan dan perkembangan waktu dalam implementasi standar atau suatu program inovatif.

Tahap pertama: Persipan

Skema 13: Tahap perkembangan perubahan komitmen dalam menyiasati adopsi dalam organisasi



- Kontak, pada tahap ini anggota institusi baru dikenalkan dengan program inovatif atau standar pelayanan, sehingga mungkin banyak yang belum sadar akan pentingnya standar tersebut.
- Sadar, anggota organisasi sadar akan pentingnya standar pelayanan, tetapi masih bingung akan pentingnya dan cara menerapkannya.

Tahap kedua: Penerimaan

- Pemahaman, tahap ini peserta sedang membangun pemahaman yang komprehensif terhadap standar, sehingga masih ada yang punya persepsi negatif dalam tahap ini.
- Persepsi positif, peserta dan staf dapat memahami pentingnya standar, hanya belum bisa mengimplementasikannya.

Tahap ketiga: Komitmen

- Instalasi, standar telah dijadikan sebagai program kerja dalam pengelolaan organisasi, hanya saja dalam pelaksanaan tidak dijadikan sebagai acuan, atau ditinggalkannya.
- Adopsi, standar telah menjadi program dan siap dilaksanakan bersama-sama dalam organ-isasi, tetapi masih ada yang kurang peduli dalam pelaksanaannya.
- Institusionalisasi, standar dan program perubahan pengelolaan dan pelayanan telah menjadi keharusan dilaksanakan oleh seluruh staf organisasi.
- Internalisasi, standar telah menjadi budaya bagi semua staf sekolah, sehingga terbangun sistem budaya mutu secara bersama-sama. Pada tahap ini budaya untuk mencapai standar merupakan kesadaran kolektif dalam membudayakan mutu layanan sekolah.

Semua tahapan yang diajukan Conner dalam membangun komitmen itu, dapat juga kita gunakan sebagai instrumen untuk menentukan kinerja lembaga dalam menerapkan standar, sebagai proses penjaminan mutu pendidikan di sekolah.

Peran Kepala Sekolah sangat strategis dalam menciptakan iklim belajar di sekolah tersebut. Pengalaman menunjukkan, pemahaman Kepala Sekolah terhadap pendidikan, manajerial, dan kepemimpinan dapat dikatakan sebagai prediktor keberhasilan menerapkan standar dalam pengelolaan sekolah. Pemahaman tentang pendidikan, meliputi kurikulum, bahan ajar, pembelajaran, dan evaluasi. Smith & Piele (2006: 43) menyatakan tindakan esensial yang dilakukan sebagai pimpinan, meliputi: menentukan petunjuk dan arahan, mengembangkan kemampuan anggota, *pioneering change*, dan menetapkan lingkungan kerja yang sistematis. Pemberian tugas yang jelas memungkinkan anggota dapat melaksanakan sesuai dengan petunjuk dan bahkan lebih, sebagai suatu standar. PKB terhadap seluruh staf memungkinkan segala delegasi dapat dilaksanakan sesuai dengan standar, sehingga secara periodik adanya audit kompetensi anggota dalam mengemban tugas profesional tersebut. *Pioneering change*, memberikan tanda adanya standar yang bersifat dinamis yang dicapai dan setiap anggota dan setiap orang menjadi pioner melakukan perubahan menuju standar tertentu. Kesenjangan antara keadaan saat ini dengan standar yang ditetapkan, memerlukan perubahan, perubahan dikendalikan oleh Kepala Sekolah. Anggota yang belajarnya lebih besar daripada perubahan, maka dia dapat mengelola perubahan tersebut. Tetapi bila belajar lebih kecil daripada perubahan, orang tersebut tergilas oleh perubahan atau dia tidak mampu mengikuti perkembangan. Lingkungan kerja yang memiliki iklim akademis, membuat anggotanya secara personal terus-menerus belajar, sebagai profesional. Suasana akademis yang dibangun di sekolah, juga menciptakan suatu belajar bagi siswa secara nyaman dengan keteladanan para guru.

Seluruh suasana kondusif yang diciptakan sekolah, produktif bagi siswa dan gurunya, sumber belajar yang relevan dan dukungan iklim akademis dari berbagai komponen masyarakat, menciptakan sistem budaya mutu (*quality management system*). Sistem yang mapan yang diciptakan dalam pengelolaan pendidikan di sekolah, merupakan sistem penjaminan mutu pendidikan.



SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

SETIAP kegiatan yang dilakukan oleh suatu entiti tertentu, disadari atau tidak, akan tetap diperhatikan oleh berbagai pihak, sedikit atau banyaknya pemerhati berkaitan erat dengan seberapa banyak masyarakat terpengaruhi dengan kegiatan tersebut. Berkaitan dengan mutu pendidikan, hampir semua lapisan masyarakat akan terperanguhi dengan aktivitas pendidikan, sehingga akan berdampak luas setiap kali upaya pendidikan dilakukan, berkaitan dengan sistem dan mutu. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan merupakan acuan dalam menyelenggarakan penjaminan mutu pendidikan yang dilakkan oleh LPMP dan lembaga lainnya. Pasal 1 (2) menyatakan bahwa *penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan*. Kegiatan sistemik dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang berpola, menyeluruh, dan ber-dampak luas dengan memperhatikan aspek masukan, proses, keluaran dan dampaknya sebagai suatu sistem – dalam hal ini berdampak meningkatkan kecerdasan bangsa. Sebagai suatu system, penjaminan mutu pendidikan memiliki acuan normative, yaitu mengacu kepada standar standar nasional pendidikan (SNP).

Menurut PP nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dinyatakan bahwa “Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu pemerintah daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam **berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan**. Jadi LPMP di tingkat provinsi diharapkan secara proaktif mengembangkan SPMP untuk mencapai SNP yang berbasis pada budaya mutu, sumber daya lingkungan, dan keunggulan lokal.

Makna membantu Pemerintah Daerah dalam penjaminan mutu pendidikan, yaitu secara proaktif memberikan masukan model pembinaan terhadap upaya pengelola sekolah dalam mencapai SNP melalui berbagai bentuk kegiatan, sebagai siklus penjaminan mutu pendidikan. Beberapa kegiatan dalam penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan LPMP, terdiri atas: perencanaan program penjaminan mutu pendidikan, pengembangan sistem informasi proses dan hasil pemetaan mutu pendidikan, analisis dan pemetaan mutu pendidikan¹, fasilitasi sekolah untuk pencapaian SNP, audit kinerja sekolah, dan fasilitasi “remedial” pengembangan sekolah mencapai SNP.

Tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa Indonesia sebagaimana dicita-citakan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pasal 2 (1)). Lebih lanjut dalam pasal ini menyatakan tujuan antara penjaminan mutu pendidikan adalah terbangunnya SPMP, meliputi:

1. terbangunnya **budaya mutu** pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal;
2. **pembagian tugas dan tanggung jawab** yang jelas dan proporsional dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah;
3. ditetapkannya secara nasional **acuan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan** formal dan/ atau nonformal;
4. **terpetakannya secara nasional mutu pendidikan** formal dan nonformal yang dirinci menurut provinsi, kabupaten atau kota, dan satuan atau program pendidikan;
5. terbangunnya **sistem informasi mutu pendidikan** formal dan nonformal **berbasis teknologi informasi dan komunikasi** yang andal, terpadu, dan tersambung yang menghubungkan satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah.

Paradigma penjaminan mutu pendidikan yaitu: *pertama*, pendidikan untuk semua (PUS) yang bersifat inklusif dan tidak mendiskriminasi peserta didik atas dasar latar belakang apapun; *kedua*, pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik yang memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi insan pembelajar mandiri yang kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan; dan *ketiga*, pendidikan untuk perkembangan, pengembangan, dan/atau pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, penjaminan mutu pendidikan dilakukan atas dasar prinsip: *pertama*, keberlanjutan; *kedua*, terencana dan sistematis, dengan kerangka waktu dan target-target capaian mutu yang jelas dan terukur dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan nonformal; *ketiga*, menghormati otonomi satuan pendidikan formal dan nonformal; *keempat*, memfasilitasi pembelajaran informal masyarakat berkelanjutan dengan regulasi negara yang seminimal mungkin; dan *kelima*, SPMP merupakan sistem terbuka yang terus disempurnakan secara berkelanjutan.

LPMP sebagai UPT Kemdikbud yang berkedudukan di setiap provinsi mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan membantu pemerintah daerah meyakinkan bahwa penyelenggaraan pendidikan dalam satuan pendidikan telah sesuai regulasi dan diarahkan sesuai

¹ Pemetaan mutu pendidikan dilakukan, antara lain melalui evaluasi diri sekolah (EDS), Uji Kompetensi Guru (UKG), Penilaian Kinerja Guru (PKG), dan penggunaan instrument lainnya untuk menentukan profile sekolah (termasuk profile pembelajaran) sebagai prediktor dalam mencapai SNP.

dengan standar nasional pendidikan dan secara sistematis melakukan penyempurnaan model SPMP. Konsep SPMP bersifat dinamis, dilakukan penyempurnaan secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan. Implementasi SNP dapat dikatakan sebagai pengendalian secara menyeluruh, baik masukan, proses, dan keluaran serta dampak untuk menjadikan dan meyakinkan semua pihak bahwa pendidikan sebagai upaya mencedardakan bangsa.

Skema 14: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SNP) sesuai dengan Permendiknas No. 63 Tahun 2012



Sesuai dengan pasal 5 Permen Dikbud No. 37 Tahun 2012 tentang LPMP, menyatakan distribusi tugas masing-masing unit kerja di LPMP sebagai berikut.

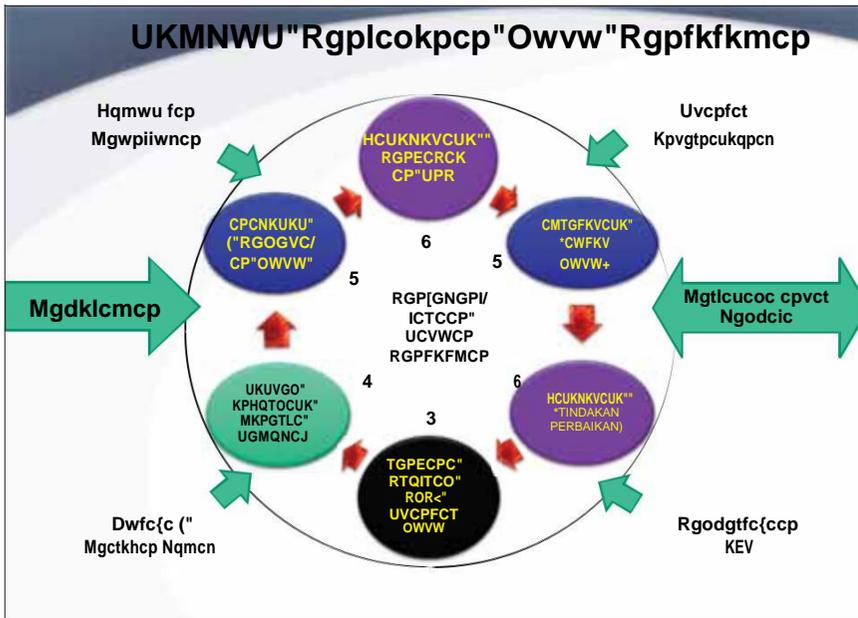
1. **Subbagian Umum** mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan LPMP. Unit kerja ini tidak lagi sebagai pendukung, tetapi mengambil peran signifikan dalam sistem penjaminan mutu pendidikan.
2. **Seksi Sistem Informasi** mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah. Sistem informasi dikembangkan agar memudahkan dalam pengelolaan informasi dan dapat secara optimal memberikan input dalam sistem penjaminan mutu pendidikan.
3. **Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi** mempunyai tugas melakukan pemetaan mutu dan supervisi satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional. Pemetaan mutu pendidikan memegang peranan penting sebagai basis dalam kegiatan peningkatan mutu pendidikan selanjutnya.

2 Uraian tugas dan fungsi masing-masing unit kerja di LPMP dapat dinyatakan merupakan komponen generik siklus penjaminan mutu pendidikan, sebagai wujud elaborasi dan implementasi dalam kegiatan untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan.

4. **Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan** mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan kerja sama peningkatan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional. Berdasarkan peta mutu pendidikan dan/atau fokus pembinaan PTK, fasilitasi untuk peningkatan mutu pendidikan untuk mencapai tujuan pembinaan dan kebijakan sebagai fokus dalam pembinaan PTK.

Siklus penjaminan mutu pendidikan yang terdiri atas komponen generik tersebut bersifat dinamis, seperti skema 14. Dalam tataran satuan pendidikan, implementasi SPMP akan menggunakan dan dibantu berbagai instrumen mulai dari perencanaan program, pengembangan sistem informasi, analisis dan pemetaan mutu, fasilitasi pencapaian standar, tindakan fasilitasi perbaikan pencapaian, dan kembali ke komponen awal, perencanaan program.

Penyelenggaraan penjaminan mutu, mengakomodasikan juga berbagai faktor, selain SNP, diantaranya: pemberdayaan ICT, fokus kegiatan dan keunggulan yang dikembangkan sekolah, budaya dan kearifan lokal serta lingkungan, kerjasama antar lembaga, dan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

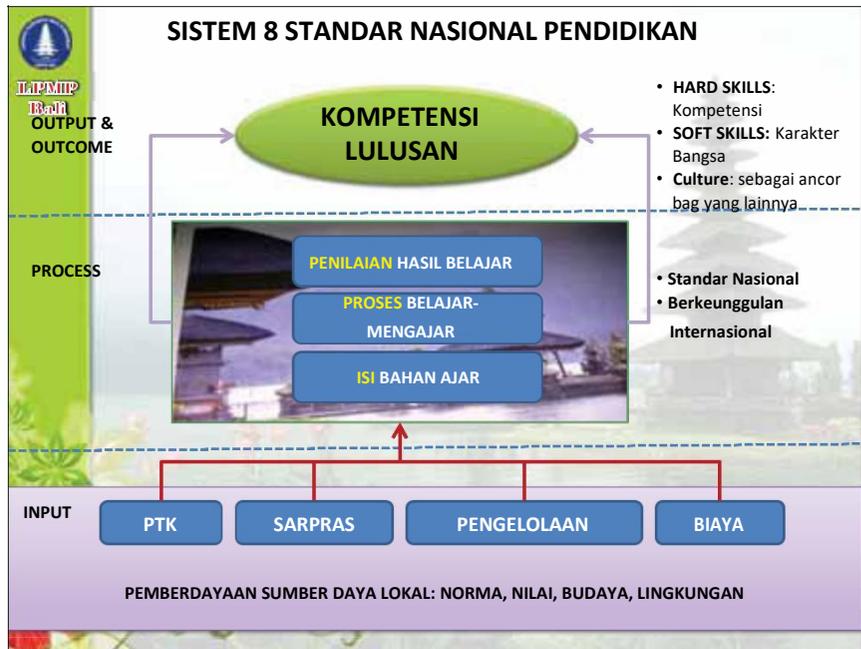


Skema 15: Siklus Penjaminan Mutu Pendidikan sebagai siklus generik yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)

Semua upaya penyelenggaraan pendidikan pada setiap satuan pendidikan dan upaya pengendaliannya melalui SPMP pada dasarnya adalah untuk membangun lulusan yang terdidik, unggul, dan berkarakter sesuai dengan budaya bangsa. Sehingga setiap tahap keseluruhan sistem yang dilalui mengacu kepada standar yang ditetapkan. Berikut adalah model penerapan standar pada berbagai tahap dalam penyelenggaraan pendidikan. Pada tahap masukan, dapat kita identifikasikan beberapa SNP yang dapat dijadikan sebagai komponen utama, meliputi: standar biaya, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, dan ... mungkin juga perlu mempertimbangkan standar kompetensi lulusan.

Pada tahap proses pendidikan, beberapa SNP yang dominan bekerja: standar isi (kurikulum sebagai acuan pembelajaran), standar proses (pembelajaran yang efektif dan menyenangkan), standar penilaian (sesuai dengan pendekatan) mengaku kepada Kompetensi Inti (KI) 1: spriritualitas, KI 2: sosial, KI 3: kompetensi bahan ajar (pengetahuan), dan K4: keterampilan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk keluaran siswa adalah standar kompetensi lulusan.

Skema 16: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan untuk pencapaian Standar Nasional Pendidikan dalam mencapai masyarakat dan bangsa delapan besar dunia< sesuai dengan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.



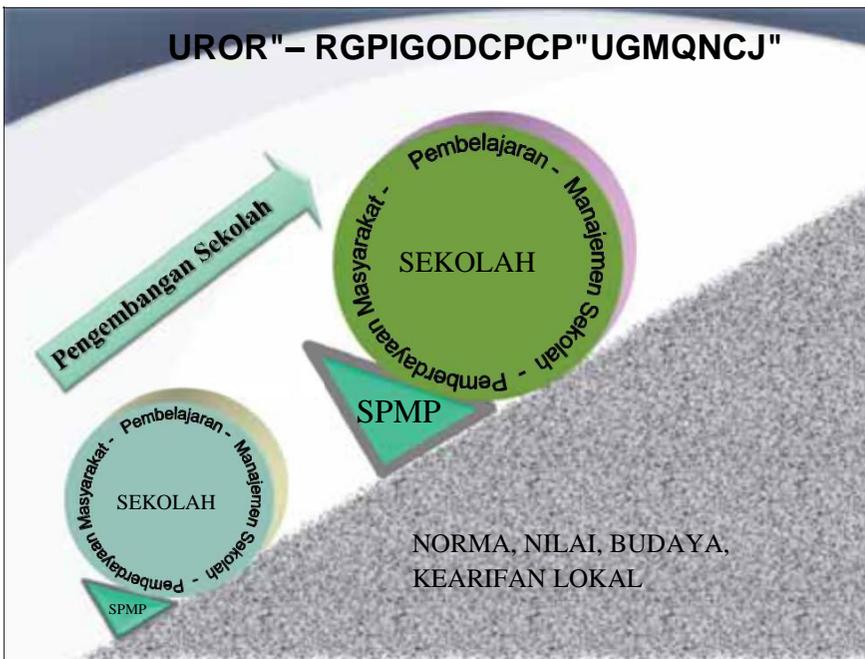
Di ujung penyelenggaraan pendidikan pada sekolah, dijaga menggunakan standar kompetensi lulusan, berupa pencapaian lulusan dan kinerjanya. Pada tahap proses pembelajaran, bekerja beberapa acuan dalam bentuk standar, yaitu: standar isi, berupa bahan ajar sesuai kurikulum; standar proses, profile pembelajaran yang efektif; dan pada tahap masukan yang harus dipertimbangkan, yaitu: standar PTK, kompetensi dan integritas probadinya; standar sarana dan prasarana, antara lain ruangan kelas dan perlengkapan, alat peraga pendidikan; dan standar biaya, berupa kesiapan anggaran untuk mendukung pembelajaran efektif. Dengan demikian, produk pendidikan kita memperoleh pengakuan dari kalangan yang laus, *stake-holder* pendidikan, masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, dan lembaga pendidikan selanjutnya. Jadi, hasil pendidikan di berbagai jenjang persekolahan dapat diuji oleh semua komponen tersebut di atas sebagai bentuk pengakuan terhadap mutu pendidikan.

Pembenahan sistem pendidikan pada dasarnya adalah membangun masyarakat bangsa yang memiliki keunggulan dan mampu berkolaborasi dengan bangsa lain di dunia. Keunggulan yang dimiliki dielaborasi ke dalam kompetensi lulusan atau *hard skills*, sesuai dengan bidang materi subjek atau bidang keahlian yang ditekuninya. Disamping itu, sebagai identitas suatu bangsa, masyarakat yang terdidik melalui suatu sistem pendidikan diharap-

kan membangun karakter bangsa (*soft skills*) yang membekali untuk senantiasa dapat berkolaborasi dalam tatanan global dan lokal untuk kesejahteraan umat manusia. *Hard skills* dan *soft skills* diharapkan terakomodasi secara bermakna (*meaningfull learning*), di kaitkan dengan kebudayaan yang telah dimiliki masyarakat Indonesia³. Keseluruhan tatanan sistem pendidikan tersebut dituangkan kedalam suatu kurikulum yang dijadikan sebagai acuan penyelenggaraan satuan pendidikan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran. Sehingga dengan demikian, pengembangan kurikulum senantiasa dilakukan secara periodic sebagai upaya mengakomodasikan kemajuan ilmu, teknologi, dan kebudayaan, serta kebutuhan masyarakat.

Pembelajaran yang dilakukan (standar proses, standar isi, standar evaluasi) hendaknya mengarahkan terjadinya pembelajaran efektif, pembelajaran yang mampu mencapai tujuan pendidikan. Pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa hal yang mengacu kepada standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar biaya, dan standar sarana dan prasarana. Sistem penjaminan mutu pendidikan dalam tataran satuan pendidikan meyakinkan sekolah mengacu SNP dan mampu menggunakannya untuk pengembangan sekolah.

Upaya pengembangan sekolah sesuai dengan konsensus para pemangku kepentingan di sekolah tersebut, akan menggunakan SPMP sebagai pengungkit agar pengembangan sekolah ke arah kemajuan dan konsensus masyarakat.



Skema 17: SPMP berperan strategis dalam menjaga keutuhan dan keajegan upaya pengembangan penyelenggaraan sekolah untuk mencapai tujuan.

SPMP bertindak sebagai "pengungkit dan penganjel" bola pengembangan sekolah agar terus berkembang menuju ke yang lebih maju ses-uai harapan. Agar SPMP dapat bekerja secara signifikan mendongkakan laju pengembangan sekolah, paradigma dan instrumen yang ditentukannya selalu dikembangkan sebagai suatu instrumen dinamis pengembangan

³ Proses akomodasi informasi dan konsep baru pada pengetahuan lama mengikuti teori belajar J. Peaget, dan diharapkan terjadi proses belajar bermakna mengikuti teori Gagne, informasi baru diakomodasikan secara bermakna dengan konsep yang telah dimiliki peserta didik.

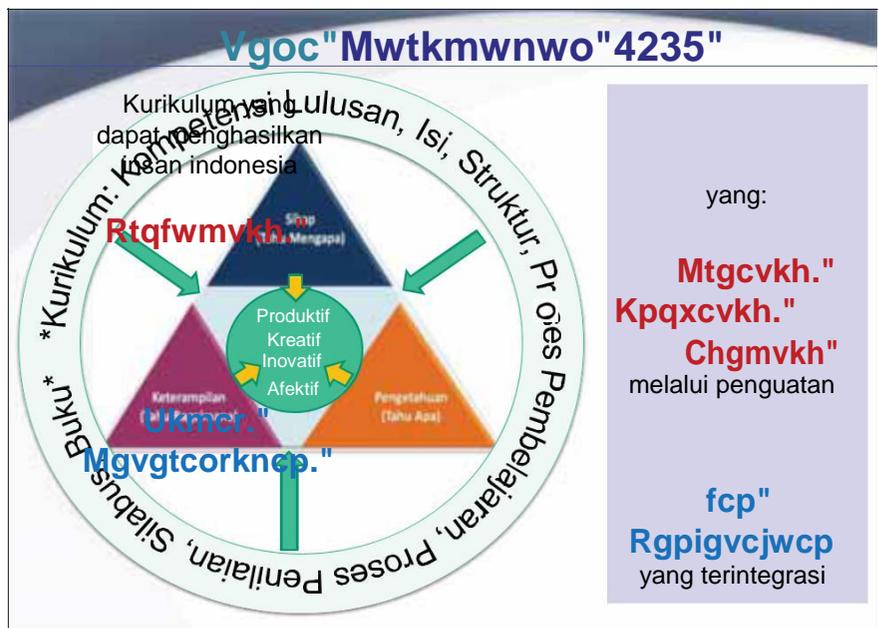
sekolah. Dengan demikian, SPMP baiknya dijadikan sebagai budaya mutu, suatu kebiasaan dari seluruh sumber daya pendidikan di sekolah tersebut, menyelesaikan tugas profesinya berdasar pada mutu proses dan produknya serta batas waktu yang ditentukan.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) sebagai salah satu kompo-nen standar nasional pendidikan, diyakini secara luas sebagai prediktor domi-nan dalam pencapaian SNP yang lainnya dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sehingga, upaya peningkatan kompetensi dan kinerja PTK akan menjadi sasaran utama dalam fasilitasi peningkatan mutu pendidikan.

Berbagai model fasilitasi dikembangkan dalam mencapai standar yang telah ditetapkan sebagai konsesus bersama komponen masyarakat pendid-dikan. Masing-masing model fasilitasi peningkatan kompetensi dan kinerja sangat erat berkaitan dengan kondisi entiti (*existing condition*) yang menjadi subjek peningkatan kinerja dan kondisi lingkungan (sosiologis) masyarakat sekitarnya. Hal ini sangat erat kaitannya dengan asumsi dalam *andragogy*

– pembelajaran orang dewasa, yaitu kesiapan belajar yang bersangkutan. Se-bagai muatan dari fasilitasi peningkatan kinerja sekolah, diantaranya materi subjek yang menjadi mata pelajaran di sekolah dan berbagai sumber bala-jarnya, model dan teori belajar, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan kurikulum pendidikan di berbagai jenjang pendidikan. Joyce dan Weil (1980) menyatakan *model of teaching is a pattern that can be used to shape cur-riculums (long-term courses of studies), to design instructional materials, and to guide instruction in the classroom and others settings*. Hal ini mengisyaratkan bahwa model belajar yang dikembangkan merupakan pola yang dipilih dalam menerjemahkan kurikulum dalam kontek pembelajaran, me-nyusun bahan ajar, memilih pendekatan dan metode dalam pembelajaran sesuai dengan karakteristik mata pelajaran.

Skema 18: Tema Kurikulum 2013 yang dikembangkan dari model KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), dengan memasukkan model tematik-integratif dalam pembelajaran dan pembahasannya.



4 Skema ini diambil dari bahan sosialisasi Kurikulum 2013 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan digunakan juga oleh Tim Pengembang Kurikulum Pendidikan Nasioanal.

Aspek yang dikembangkan dalam pembelajaran – sebagai “roh” kurikulum – meliputi: aspek pengetahuan (tahu tentang materi subjek yang dibahas - *cognitive*), aspek sikap (tahu mengapa melatih sesuatu – *affective*), aspek keterampilan (tahu bagaimana menggunakan alat dan bahan – *psychomotor*), dan aspek kompetensi spiritualitas peserta didik. Hal ini diterjemahkannya ke dalam kurikulum sebagai Kompetensi Inti (KI) menjadi empat KI.

Pembelajaran yang dilaksanakan dengan menerapkan aspek tersebut secara terpadu, terpadu pada aspek ranah pembelajaran dan terpadu pada aspek berbagai disiplin ilmu, tematik-integratif. Dengan demikian, diharapkan kurikulum tersebut menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, melalui penguatan sikap, psikomotor, dan pengetahuan.

Dengan demikian upaya fasilitasi peningkatan mutu secara serentak pada tahap pembelajaran tematik-integratif, pada tahap pengelolaan sekolah sesuai SNP, dan tahap pengembangan sekolah sesuai fokus dan keunggulan internasional.

MODEL FASILITASI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan (FPMP) merupakan komponen utama yang mesti dilaksanakan oleh satuan pendidikan atau lembaga dalam standar yang telah ditetapkan. Berbagai model FPMP dapat ditentukan sebagai pendekatan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai pilihan dalam pengembangan lembaga pendidikan, yang dalam konteks pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dinyatakan sebagai pengembangan keprofesionalan berkelanjutan (PKB). PKB dapat dilakukan secara kumulatif dan alternatif oleh institusi nasional (dalam bentuk bintek untuk mencari model regulasi), lembaga di tingkat provinsi – LPMP dan Dinas Pendidikan Provinsi, lembaga di tingkat kabupaten dan kota - Dinas Pendidikan kabupaten dan kota, sampai dengan sekolah itu sendiri. Untuk itu perlu pemetaan tingkat kedalaman dan jenis bahan kajian dalam forum fasilitasi tersebut.

Penelitian ke arah hubungan antara mutu pengembangan profesional, seperti program induksi, dan kemampuan guru semakin banyak dilakukan. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya *continuous professional development* (CPD) atau pengembangan keprofesionalan berkelanjutan (PKB) bagi para PTK semakin disadari sebagai upaya hulu dalam peningkatan mutu pendidikan, dan dianggap sebagai strategi kunci gerakan reformasi dalam dunia pendidikan. Program pengembangan kemampuan profesional, termasuk pengembangan kurikulum sekolah, menggunakan pengetahuan tentang belajar keterampilan baru para pendidik dan transformasi cara berpikir serta keyakinan yang mendalam tentang belajar dan mengajar (Loucks-Horsley (et.al): 2010, 69).

Pandangan tersebut semakin relevan bila mempertimbangkan bahwa guru seorang profesional, guru hendaknya melihat sekolah sebagai arena kerja dan juga tempat belajar. Drucker (1997: 185) menyatakan dalam konteks CDP (*continuing professional development*) pengembangan diri dan pengembangan staf merupakan prasyarat penting untuk pengelolaan yang efektif dan sekolah yang efektif. Jadi untuk memfasilitasi peningkatan kemampuan profesional guru dan staf sekolah, CPD menjadi hal yang sangat penting untuk diimplementasikan. Bahan ajar dalam CPD menyesuaikan dengan hasil pemetaan dan audit awal terhadap kemampuan profesional guru dan staf.

Pengelolaan PKB yang efektif dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut, seperti dikemukakan oleh Loucks-Horsley (et.al) halaman 68.

1. Dirancang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran siswa.
2. Mengacu kepada model pembelajaran yang efektif, aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan.
3. Dirancang agar guru memperoleh kesempatan membangun pembelajaran yang konten dan aspek pedagoginya sesuai dan ada kesempatan merefleksikannya.
4. Berbasis pada hasil penelitian (PTK) dan memperhatikan pembelajaran orang dewasa.
5. Memberikan kesempatan kepada peserta (guru) berkolaborasi dengan rekan sejawat dan para ahli (narasumber) untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya.

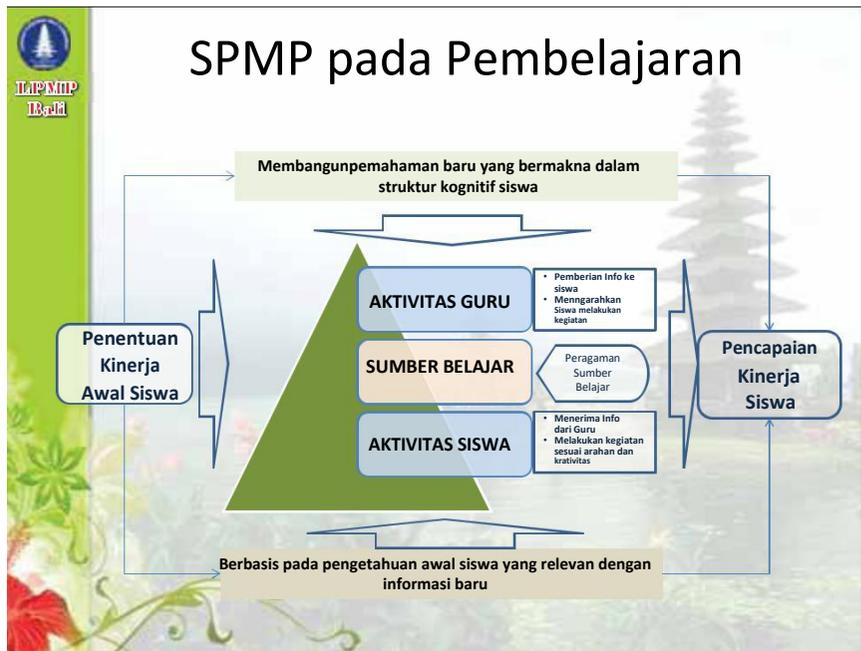
6. Dimotivasi para guru untuk terus menerus mengembangkan keprofesian-alannya dan memberdayakannya dalam peran kepemimpinan (*leader-ship role*).
7. Dihubungkan dengan bagian lain dari system pendidikan.
8. Dilakukan evaluasi dan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan.

Berdasarkan beberapa premis dalam pengelolaan PKB tersebut di atas, diharapkan pembelajaran yang dilakukan dapat menciptakan suasana belajar bagi siswa dan dengan pemcapaian yang tinggi.

PROTAP PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Penjaminan mutu pendidikan merupakan proses siklus, artinya adanya kesinambungan dari proses awal sampai dengan akhir, dan kembali lagi ke siklus awal dengan dinamika bobot proses dan produk setiap siklus berikutnya lebih baik dari siklus sebelumnya. Dengan demikian, ada yang menyatakan siklus penjaminan mutu dimulai dari akhir dan berakhir di awal, artinya hasil akhir proses SPMP digunakan sebagai masukan awal dalam pengembangan program SPMP berikutnya.

Skema 19: SPMP pada jenjang Pembelajaran akan dijaga oleh Guru Senior sesuai dengan Bidang Studi atau yang khusus ditugaskan

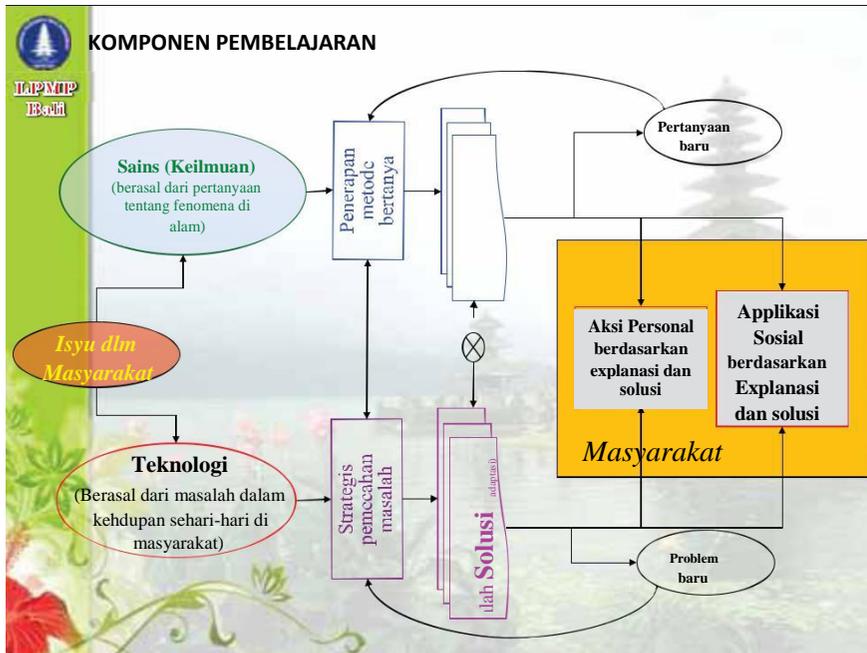


Matrik Protap SPMP berikut terdiri atas sembilan kegiatan yang secara paralel dan/atau masing-masing kemungkinan dilakukan oleh Dinas yang mengurus pendidikan di tingkat provinsi, Dinas yang mengurus pendidikan di tingkat kabupaten dan kota, LPMP, dan/atau sekolah. Sumber informasi yang digunakan dalam kegiatan tersebut dapat berasal dari dokumen yang dimiliki sekolah atau instansi lain tentang pengelolaan pendidikan, dan dapat berasal dari hasil observasi factual di tempat kegiatan dilaksanakan.

Pada tingkat pembelajara, guru menentukan pemahaman awal peserta didik dan memberikan intervensi professional melalui proses pendidikan ser-ta menentukan pencapaian hasil belajarnya (*instructional effects dan nur-*

turants effects). Proses pembelajaran merupakan interaksi antara guru, siswa, dan sumber belajar. Pembelajaran dapat berupa pembahasan satuan tema dan/atau topik tertentu sesuai dengan Kompetensi Dasar yang ada dalam kurikulum. Personel yang berperan dalam melaksanakan penjaminan mutu pada tataran ini, Kepala Sekolah dapat menentukan guru senior atau guru berkinerja terbaik dalam jenjang sekolah dasar atau guru senior atau guru berkinerja terbaik pada mata pelajaran bersangkutan untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK.

Komponen generik dalam pembelajaran yang membangun karakter (kompetensi spiritual dan sosial) sebagai komponen *soft skills* dan memanfaatkan kecakapan (kompetensi pengetahuan dan penerapan dan keterampilan) sebagai bagian *hard skills*, antara lain sebagai berikut.



Skema 20:
Komponen generik Pembelajaran: aspek sains (mata pelajaran – tema), teknologi, dan masyarakat sebagai representasi dari proses pembelajaran yang mencerahkan dan menginspirasi

Setiap tema atau suatu satuan bahan ajar memiliki empat aspek kompetensi inti, sehingga pembelajaran yang tematik-terpadu menghendaki pendidik yang mampu menunjukkan isyu yang berkaitan dengan tema dan peserta didik diberi kesempatan untuk berlatih menentukan alternative solusi dalam permasalahan yang bersumber pada isyu tersebut. Solusi yang dicari siswa berbasis pada pengetahuan yang dipelajarinya. Dengan demikian setiap pembelajaran akan menginspirasi dan merangsang kreativitas serta mencerahkan peserta didik secara optimal peran dirinya dalam sekolah, masyarakat, dan keluarga.

Penentuan kinerja awal peserta didik dapat dilakukan guru melalui berbagai cara, diantaranya: ujian awal dengan *pre-test*, *outentic assessment* dengan memberikan kesempatan siswa ke fenomena alam yang sebenarnya dan menentukan pemahamannya, atau tanya-jawab dengan mencari tahu pemahaman komponen kunci kompetensi dasar yang akan dipelajari. Berdasarkan

5 Kompetensi inti sesuai dengan lampiran Permen Dikbud 67, 68, 69, 70 tahun 2013, meliputi: 1). Kompetensi Inti-1 (KI-1) sikap spiritual; 2). Kompetensi Inti-2 (KI-2) sikap sosial; 3). Kompetensi Inti-3 (KI-3) pengetahuan; dan 4). Kompetensi Inti-4 (KI-4) keterampilan.

Anatomi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Refleksi Pengelolaan Pendidikan di Bali

pencapaian siswa ini, pembelajaran dilaksanakan dengan membahas KD yang baru tersebut. Pembelajaran terhadap KD baru diharapkan dapat dibangun peserta didik dengan mengasimilaskannya dengan pemahaman (konsep) awal siswa secara bermakna (ingat teori belajar *constructivism*).

Interaksi pembelajaran, dapat dianalisis dengan menentukan aktivitas guru dan aktivitas siswa. Aktivitas guru, meliputi: guru memberikan informasi ke siswa tentang konsep, (teori, kaedah, formula, hukum) dan guru mengarahkan siswa ke sumber belajar melalui arahan kegiatan, (proses ilmiah), mengaplikasikannya, dll. Guru dapat bertindak yang menyebabkan siswa pasif atau guru dapat menyampaikan informasi yang memungkinkan peserta didik aktif meniru para ilmuwan. Secara kuantitatif dan kualitatif diperoleh rekaman kinerjanya dalam pembelajaran.

Aktivitas siswa, meliputi: mencatat informasi yang diberikan guru sebagai bekal dalam melaksanakan proses ilmiah dan aktivitas siswa melakukan proses ilmiah meniru ahlinya dalam mengungkap “rahasia” alam dan sosial. Beberapa catatan khusus yang ditemui dalam pembelajaran juga menjadi bahan analisis profile pembelajaran. Aktivitas siswa ini merupakan reaksi terhadap arahan dan kinerja yang ditamikan guru dalam pembelajaran.

Adanya aktivitas tertentu yang dapat dijadikan sebagai prediktor penerapan pembelajaran yang menginspirasi dan efektif serta inovatif sangat perlu diperoleh melalui instrumen observasi pembelajaran. Hal ini perlu ditekankan mengingat rentang siswa aktif (*student-centered learning*) relatif lebar, se-

PROSEDUR TETAP PROGRAM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH

TAHAP KEGIATAN	SUMBER DATA		PELAKSANA ¹				PEMANTAU*				KETERANGAN
	DOKUMEN	OBSERVASI	1	2	3	4	1	2	3	4	
1. <i>Capacity Building</i> dan Penyusunan program penjaminan mutu pendidikan di lembaga (sekolah)	Program Kerja Tahunan atau Rencana kegiatan dan filosofis serta focus program	Pemahaman SDM lembaga terhadap visi, misi, program, dan tugas individual	V	V	V	-	V	V	V	-	Sesuai dengan keperluan: kesamaan visi dan misi, kompetensi, kesadaran, dan motivasi pencapaian optimal SDM
2. Penganalisan profile Lembaga (sekolah)	Laporan EDS dan berbasis instrumen lain yg relevan	Profile lembaga yang ditunjang pencapaian setiap unit kerja di dalamnya	-	-	V	V	-	-	-	-	Rekap dan profile serta klarifikasi kondisi faktual lembaga (sekolah) sbg basis penentuan gap dgn kondisi ideal
3. Pengkajian sistem informasi data sekolah	ICT Sekolah	System On-line, kelengkapan informasi, dan kemudahan akses info	-	-	V	V	-	-	V	V	Audit terhadap penggunaan system dan aplikasi yang dibangun sekolah
4. Pengevaluasian dan pengukuran kinerja sekolah sesuai 8 SNP	Instrument EDS dan lainnya	Sesuai format dan instrumen	-	-	-	V	V	V	V	-	Pendampingan pengisian instrument EDS dan lainnya
5. Analisis dan pemetaan mutu pendidikan	Hasil EDS	Kesesuaian dengan potensi daerah	V	V	V	-	-	-	-	-	Intrapolasi dan verifikasi hasil EDS
6. Lokakarya <i>update</i> penyusunan profile kinerja sekolah dalam pencapaian SNP	Rekap hasil evaluasi dan pengukuran	-	-	V	V	V	-	-	-	-	Peta mutu pendidikan dan profile sekolah
7. Program PKB berdasarkan profile pencapaian SNP	Kelemahan	Dirasakan kurang	V	V	V	V	-	-	-	-	Rencana perbaikan dan pengembangan serta pelaksanaan PKB memacu pencapaian standard atau lebih
8. Audit untuk kepentingan akreditasi dan evaluasi kinerja lainnya	Pedoman mutu dan laporan kegiatan	-	-	V	V	V	-	-	-	-	Sertifikasi dan pemetaan pencapaian 8 SNP
9. Penyampaian profile sekolah dan kinerja pencapaian sekolah	Hasil pemantauan dan evaluasi	-	-	V	V	V	-	-	-	-	Pengelolaan sekolah dan pembinaannya

6 Pelaksana dan Pemantauan: 1 = Dinas Pendidikan Provinsi, 2 = Dinas Pendidikan Kab/kota, 3 = LPMP, 4 = Sekolah

hingga munculnya tindakan aktif siswa baik pada tahap awal maupun optimal dapat dijadikan sebagai indikasi penerapan pembelajaran yang ideal tersebut.

Nengah Bawa Atmaja (210: 114) menyatakan pada umumnya orang Bali berprinsip, bahwa mereka selalu mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, *Dewa*, dan roh leluhur. Hal ini merupakan simbol *bhakti* mereka kepada-Nya. Hal ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam melihat budaya mutu dalam pendidikan sebagai bagian dari “persembahan” kita baik secara personal maupun secara bersama-sama. Dengan demikian, tidak ada kata tidak dalam melihat upaya pendidikan sebagai bagian dari persembahan dalam hidup kita yang singkat ini. Dengan senantiasa mempertahankan dan meningkatkan kompetensi spiritualitas dan secara terus-menerus mengikis dan mengendalikan keinginan penguasaan materi (materialistis), diharapkan budaya sistem penjaminan mutu pendidikan dapat diimplementasikan pada setiap individu dan sekolah sebagai organisasi belajar.

Prosedur tetap penjaminan mutu pendidikan, dapat digambarkan dalam matrik berikut. Prosedur tetap berikut merupakan elaborasi teknis untuk mencapai standar yang telah ditetapkan, baik proses maupun produk. Matrik berikut berisi: tahap kegiatan, sumber informasi (hasil observasi dan dokumen), institusi pelaksana pada masing-masing tahap kegiatan, institusi pemantau pada masing-masing tahap kegiatan, dan hal-hal yang belum tertampung pada kolom sebelumnya ditampung pada kolom terakhir, keterangan. Institusi pelaksana dan pemantau, terdiri atas: *Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/kota, LPMP, dan Sekolah.*

TAHAP KEGIATAN

1. Penyusunan program penjaminan mutu pendidikan
Program Penjaminan Mutu Pendidikan disusun dan dirancang baik oleh LPMP maupun oleh Sekolah yang bersangkutan, dijadikan sebagai acuan pengelolaan masing-masing kegiatan dalam mencapai tujuan pendidikan berdasarkan standar minimal yang telah ditetapkan dan dijadikan sebagai consensus sekolah.
2. Penganalisisan profile sekolah
Tahap berikutnya setelah mempunyai rencana PMP, menentukan kondisi kinerja sekolah awal. Untuk itu dilakukan penganalisisan terhadap laporan pemantauan dan evaluasi sebelumnya, sebagai “titik nol” atau patokan menentukan perkembangan kinerja sekolah.
3. Pengkajian sistem informasi data sekolah dan kandungan informasinya
Menginventarisasi dan mengadministrasikan berbagai informasi dan data yang relevan yang dimiliki sekolah sesuai dengan panduan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan. Pengelompokkan laporan pencapaian sekolah sebagai informasi dan data kinerja sekolah dan dokumen pendukung sebagai basis menentukan otentisitas laporan kinerja sekolah.
4. Pengevaluasian dan Pengukuran Kinerja Sekolah sesuai Delapan SNP
Berbagai instrument yang digunakan dalam menentukan kinerja sekolah, diantaranya: instrument EDS, hasil UKG, program PKB dan pencapaiannya, laporan hasil UN, dan instrument lainnya digunakan untuk menentukan kinerja sekolah yang bersangkutan. Instrument lainnya yang relevan dapat digunakan sebagai upaya mendukung dan meningkatkan validitas peta kinerja dan pencapaian sekolah menuju pemenuhan SNP.
5. Analisis dan Pemetaan Mutu Pendidikan
Informasi dan data yang relevan yang diperoleh melalui proses pemantauan dan evaluasi menggunakan instrument yang dikembangkan dianalisis untuk memperoleh gambaran kuantitatif dan kualitatif kinerja dan pencapaian sekolah. Hasil analisis terhadap informasi dan data kinerja sekolah dijadikan sebagai peta kinerja sekolah atau peta pencapaian delapan standard nasional pendidikan oleh sekolah.

6. Lokakarya penyusunan profile kinerja sekolah dalam pencapaian SNP
Profile dan peta sekolah berbasis delapan SNP yang diperoleh yang para pemantau dan evaluator diferivikasi oleh para pelaku dan pemangku kepentingan. Profile dan peta sekolah berbasis delapan SNP, dijadikan sebagai basis membuat profile dan peta sekolah dalam wilayah administrasi tertentu. Informasi dan data yang relevan yang diperoleh melalui proses pemantauan dan evaluasi menggunakan instrument yang dikembangkan
7. Program PKB Berdasarkan Profil Pencapaian SNP
Beberapa komponen SNP yang disimpulkan masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan dari profile dan kinerja sekolah, dijadikan sebagai obyek dalam program PKB. Program PKB untuk mendorong pemenuhan dan/atau melampaui SNP dapat dikelola oleh sekolah yang bersangkutan, dinas yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan di tingkat kabupaten dan kota, dinas yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan di tingkat provinsi, atau LPMP. Jadikan PKB sebagai dasar untuk menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana
8. Seminar dan Lokakarya Penyampaian Profil Sekolah dan Kinerja Pencapaian Sekolah
Dalam forum Seminar dan Lokakarya Penyampaian Profile Sekolah dan Kinerja Pencapaian Sekolah, merupakan arena untuk menentukan prediktor keberhasilan pencapaian standar yang telah ditentukan. Dalam forum ini juga merupakan ajang untuk mereview standar yang ada untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat luas. Dalam forum ini adalah sangat strategis untuk memperoleh pengakuan secara luas oleh berbagai *stake holder* terhadap sistem pengelolaan sekolah dan pencapaian yang diraihinya. Pengakuan diperoleh tentu dengan meyakinkan bahwa sekolah telah menerapkan standar pelayanan dan pencapaian tinggi terhadap pengelolaan sekolah, kinerja lulusan.



SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DI PROVINSI BALI

IMPLEMENTASI SPMP (Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan) di Provinsi Bali tentu memungkinkan adanya faktor konteks lokal dan menyesuaikan dengan beberapa variable yang mempengaruhi penerapan sistem tersebut. Diantaranya adalah populasi sekolah, populasi PTK, populasi masing-masing jenjang sekolah, dan persebarannya dalam kabupaten dan kota serta letak geografis subyek penjaminan mutu tersebut, di samping faktor budaya yang kuat mempengaruhi cara pandang masyarakat dalam kehidupan dan bekerja serta belajar.

Sebagai bahan awal dalam mempertimbangkan penerapan SPMP di Provinsi Bali, ada baiknya melihat statistik PTK dan persekolah di Provinsi Bali, yaitu dapat disajikan dalam profil PTK dan persekolahan serta aspek sosial budaya masyarakat Bali seperti berikut.

PROFIL SEKOLAH DI PROVINSI BALI

Untuk menunjukkan profil sekolah, digunakan beberapa informasi yang diharapkan dapat mempresentasikan mendekati kenyataannya, yaitu di samping hasil EDS (evaluasi diri sekolah) juga hasil UN (Ujian Nasional). Walaupun demikian, mungkin tidak dapat selengkap sempurna seperti dalam kenyataannya, digunakan berbagai informasi yang mewakili sekolah sebagai bahan analisisnya. Data berikut adalah hasil pendataan LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) pada tahun 2013 yaitu mulai dari jenjang TK, SD, SMP, sampai dengan SMA/SMK. Berikut peta dan profil populasi sekolah yang dikelompokkan menjadi jenjang persekolahan, negeri dan swasta, kabupaten dan kota di Provinsi Bali, berdasarkan hasil pemutakhiran data tahun 2013.

Anatomi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Refleksi Pengelolaan Pendidikan di Bali

Peta berikut menunjukkan sebaran secara geografis Sekolah, Guru, dan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Provinsi Bali dengan basis kabu-paten dan kota. Seluruh kabupaten dan kota berada pada satu pulau, kecuali satu kecamatan Kabupaten Klungkung berada pada pulau terpisah, yaitu Pulau Nusa Penida.

SEKOLAH DI BALI (SEK; GURU; KS-PS)

(Sumber: LPMP, 2013)



Secara lebih rinci populasi sekolah, guru, dan KS –PS di provinsi Bali dapat dilihat pada tabel berikut. Populasi sekolah dengan demografi dan letak tertentu akan mempengaruhi pola pembinaan sekolah untuk mencapai SNP.

Peta demografi pendidikan sangat penting dilengkapi dengan peta mutu pendidikan yang dicapai dalam kurun waktu ke waktu oleh sekolah dan agregat untuk daerah tertentu. Penentuan peta mutu pendidikan menjadi sangat strategis sebagai basis dan arah dalam pembinaan sekolah di masa depan untuk menjadi sekolah efektif dan memperoleh pengakuan yang luas dari masyarakat, Duda-dudi (dunia usaha dan dunia industri).

Berdasarkan peta mutu pendidikan sebagai capaian mulai dari level sekolah sam;ai dengan agregat kabupaten dan kota, dapat dikembangkan menjadi rekomendasi baik terhadap masing-masing sekolah maupun *stake holder* dalam pembinaannya. Dari rekomendasi yang telah dianalisis dikem-bangkanlah program pembinaan sekolah dengan fokus pembinaan sesuai dengan capaian sekolah atau daerah tersebut untuk membenahi capaian SNP yang direkomendasikan.

Pada tabel 2 dapat dilihat, di Provinsi Bali ada 4.230 sekolah. Jumlah sekolah tersebut didominasi oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) sebesar 2.783 sekolah. Sedangkan pada jenjang pendidikan menengah (SMA dan SMK) sejumlah 198 sekolah. Jenjang TK sebesar 1.134 sekolah dan SLB sebesar 15 sekolah. Penjabaran untuk masing-masing jen-jang sekolah per-kabupaten/kota terlihat sekolah yang ada di Kabupaten

NO	KAB/KOTA	TK	SD	SLB	SMP	SMA	SMK	Total
1."	Kab. Tabanan	152	480	2	70	32	19	755
2."	Kab. Karang Asem	173	325	2	38	15	11	564
3."	Kota Denpasar	211	208	4	54	28	29	534
4."	Kab. Buleleng	165	268	2	49	19	20	523
5."	Kab. Klungkung	85	357	1	44	17	8	512
6."	Kab. Badung	109	286	1	42	15	24	477
7."	Kab. Gianyar	103	185	1	25	14	10	338
8."	Kab. Jembrana	59	163	1	29	8	11	271
9."	Kab. Bangli	77	137	1	23	11	7	256
	Total	1.134	2.409	15	374	159	139	4.230

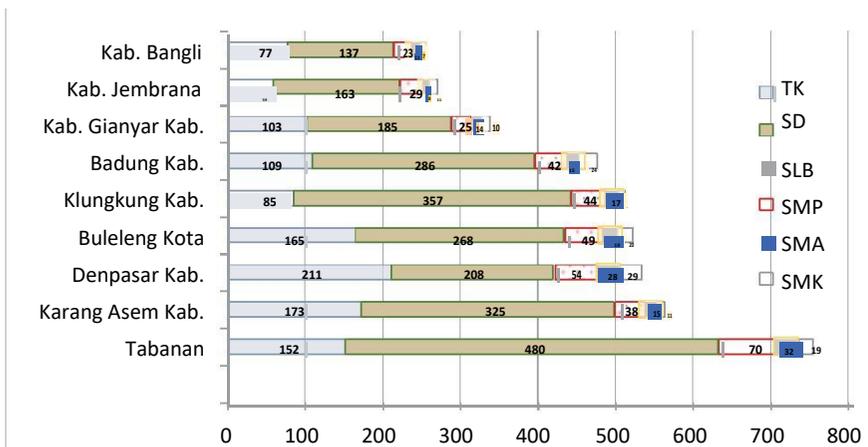
Data Sekolah di Provinsi Bali Tahun 2013 Berdasarkan Jenjang Sekolah Dan Status Sekolah

Sumber : SIM NUPTK LPMP Prov Bali 2013

Buleleng jumlahnya paling banyak yaitu 775 sekolah. Sedangkan sekolah yang ada di Kabupaten Bangli jumlahnya terkecil yaitu 256 sekolah. Jumlah sekolah yang harus dibina oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga akan mempengaruhi capaian sekolah terhadap SNP, di samping faktor luas daerah, kemudahan akses, dan pola sosiologis masyarakatnya.

Pola kepemimpinan pemimpin daerah mungkin juga berpengaruh besar terhadap kinerja sekolah, misalnya melalui model pembinaan PTK (pendidik dan tenaga kependidikan), intervensi kepala daerah terhadap pemberian kesempatan kepada PTK mengikuti Diklat (pendidikan dan latihan) dan pola pembinaannya, dan penentuan target tertentu kelulusan peserta didik.

Grafik jumlah sekolah di kabupaten dan kota



Data tersebut di atas menunjukkan adanya pengurangan jumlah sekolah pada Tahun 2013 dibandingkan pada Tahun 2012.

Anatomi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Refleksi Pengelolaan Pendidikan di Bali

Jumlah guru pada masing-masing jenjang pendidikan untuk setiap kabupaten dan kota di Provinsi Bali, tanpa memasukkan jumlah Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, sebagai berikut.

NO	KAB/KOTA	DATA GURU PER JENJANG						Total
		TK	SD	SLB	SMP	SMA	SMK	
1	Kab. Badung	805	3062	54	1319	603	450	6.293
2	Kab. Bangli	228	1359	22	635	262	268	2.774
3	Kab. Buleleng	558	3901	44	1649	845	557	7.554
4	Kab. Gianyar	467	2546	19	1219	500	548	5.299
5	Kab. Jembrana	349	1219	15	535	289	251	2.658
6	Kab. Karang Asem	310	3554	23	1046	484	140	5.557
7	Kab. Klungkung	418	1502	15	717	360	136	3.148
8	Kab. Tabanan	474	2980	35	1367	723	299	5.878
9	Kota Denpasar	1027	2938	105	1129	749	669	6.617
	Total	4.636	23.061	332	9.616	4.815	3.318	45.778

Adanya pertumbuhan jumlah guru di Provinsi Bali dari tahun sebelumnya, yaitu pada jenjang pendidikan dasar. Walaupun demikian, masih dirasakan kekurangan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, khususnya di Sekolah Dasar.

Jumlah Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan untuk setiap kabupaten dan kota di provinsi Bali, sebagai berikut.

NO	KAB/KOTA	DATA TENAGA KEPENDIDIKAN PER JENJANG						Total
		TK	SD	SLB	SMP	SMA	SMK	
1	Kab. Badung	81	250		317	152	102	902
2	Kab. Bangli	50	400	6	308	137	114	1015
3	Kab. Buleleng	23	236	2	338	211	82	892
4	Kab. Gianyar	10	129	1	264	112	123	639
5	Kab. Jembrana	6	122		86	47	35	296
6	Kab. Karang Asem	9	226	2	282	117	24	660
7	Kab. Klungkung	4	179	1	134	90	36	444
8	Kab. Tabanan	9	211		270	158	51	699
9	Kota Denpasar	26	254	3	229	171	79	762
	Total	218	2.007	15	2.228	1.195	646	6.309

Dalam penyelenggaraan pendidikan, setiap sekolah, bahkan setiap pembelajaran tema tertentu, bekerja SPMP sebagai proses pemenuhan standar yang dijadikan konsensus bersama. Konsensus yang dimaksud, adalah model pembelajaran yang telah diarahkan dalam kurikulum 2013, yaitu pendekatan saintifik (*scientific approach*), yang mengacu kepada teori belajar personal (*gestald-field* atau *cognitive*) dan sosial (Bandura) serta perpaduan kedua aliran sebagai konstruktifisme (*constructivism theory*). Berbagai faktor berpengaruh dan bekerja dalam sistem tersebut, baik secara generik, sosiologis, maupun faktor kekhasan lokal dalam bentuk budaya.

Pada tingkat kabupaten dan kota, diharapkan adanya agregat SPMP masing-masing jenjang sekolah, yaitu: SD, SMP, SMA, dan SMK sebagai profil kabupaten dan kota. Untuk jenjang sekolah dasar, SPMP kabupaten dan kota didukung oleh SPMP pada jenjang kecamatan. Hasil SPMP jenjang keca-matan diperoleh agregat dari SPMP pada jenjang sekolah dan tingkat pembe-lajaran mata pelajaran (masing-masing PTK).

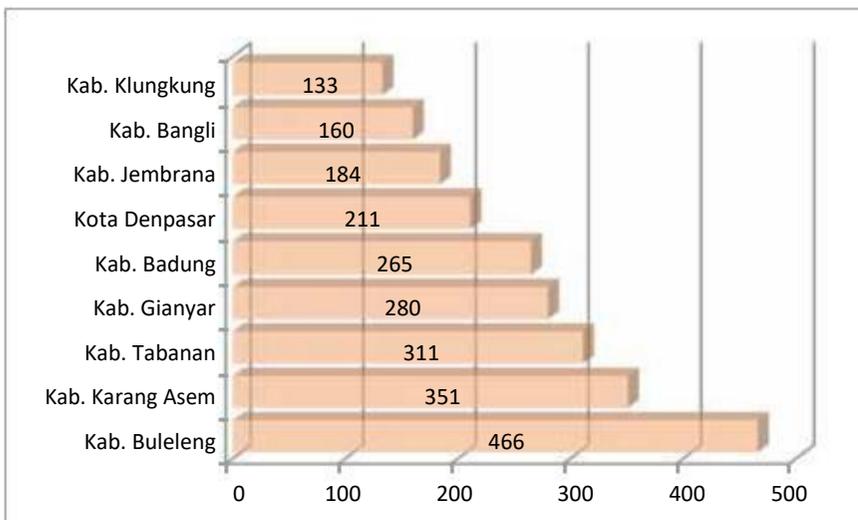
Profil SPMP untuk di tingkat kabupaten dan kota pada jenjang sekolah tertentu, merupakan agregat dari:

1. SMA dan SMK agregat dari sekolah-sekolah;
2. SMP agregat dari sekolah-sekolah;
3. SD agregat dari kecamatan dan sekolah.

Profil mutu pendidikan di tingkat kabupaten dan kota dapat ditelusuri dari peta pendidikan dan sekolah di daerahnya. Dengan demikian, program fasilitasi pengembangan sekolah dan peningkatan mutu PTK akan sesuai dengan kondisi yang ada dan sesuai dengan keperluan peningkatannya yaitu peningkatan staf berdasarkan kebutuhan sekolah (PSBKS) atau *school-based staf development (SBSD)* secara berkelanjutan.

EDS (evaluasi diri sekolah) merupakan salah satu basis yang digunakan untuk memetakan profil sekolah, yang meliputi delapan Standar Nasional Pendidikan. SNP terdiri atas: Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, Standar Proses, Standar Isi, Standar PTK, Standar Sarpras, Standar Pengelolaan, dan Standar Biaya. Jumlah sekolah jenjang SD di Provinsi Bali 2.361 sekolah yang tersebar di 9 kabupaten dan kota dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Buleleng, sekitar 20% dari seluruh jumlah SD di Provinsi Bali.

Di samping itu, berbagai hasil pengukuran terhadap mutu pendidikan dapat kita jadikan bahan masukan terhadap peta kompetensi lulusan, misalnya ujian nasional, ujian sekolah, dan berbagai pengukuran pencapaian peserta didik lainnya. Adapun sebaran jumlah sekolah jenjang SD disajikan pada tabel berikut ini. Jumlah sekolah terbanyak adalah Kabupaten Buleleng dan paling sedikit adalah Kabupaten Klungkung.



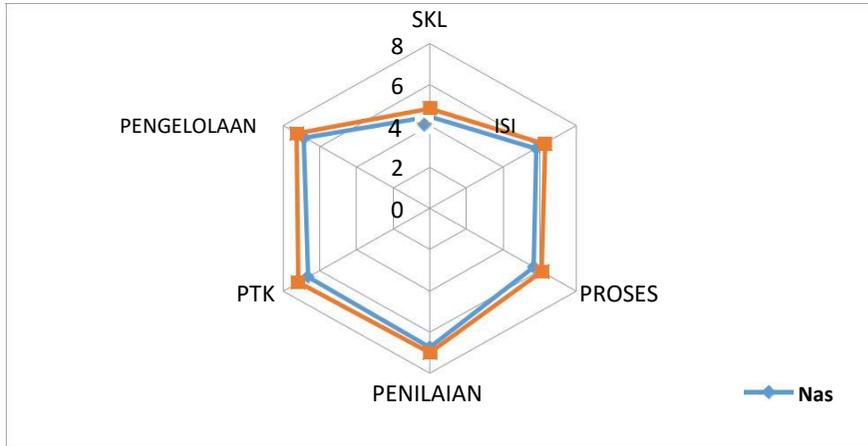
Jumlah sekolah pada suatu daerah tertentu mencerminkan pula luasnya area daerah tersebut dan juga jumlah peserta didiknya. Secara umum, di Provinsi Bali tidak ada daerah dalam kategori: terpencil, terluar, dan tertinggal. Kalau kita sebut Kecamatan Nusa Penida yang merupakan wilayah Kabupaten Klungkung letak geografisnya terpisahkan oleh laut, sehingga untuk menjangkaunya perlu alat transportasi laut. Walaupun demikian, jangkauan informasi dan alat telekomunikasi masih terjangkau dengan baik selama ini.

Profil Mutu Pendidikan Berbasis EDS

Pencapaian SNP secara Nasional untuk jenjang SD menunjukkan bahwa standar pengelolaan memiliki skor tertinggi dibandingkan dengan standar SKL, Isi, Proses, Penilaian, dan PTK, pola ini juga terjadi untuk Provinsi Bali.

Jenjang Pendidikan Dasar

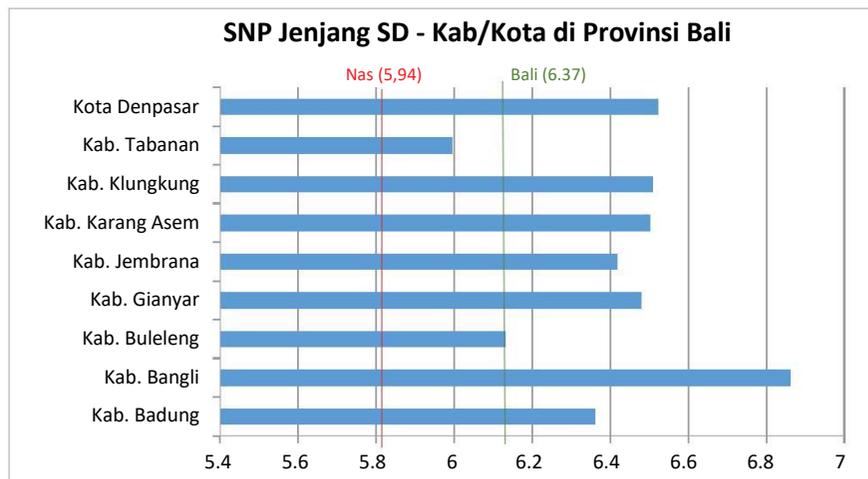
Jika dibandingkan antara pencapaian SNP di tingkat Nasional dan skor pencapaian SNP di Provinsi Bali, Bali mencapai lebih tinggi, seperti grafik berikut.



Skor SNP untuk masing-masing kabupaten/kota lebih tinggi dibandingkan dengan skor SNP Nasional. Kabupaten Badung, Bangli, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung dan Kota Denpasar memiliki skor SNP di atas skor nasional serta melampaui skor provinsi.

Pencapaian SNP yang tertinggi untuk SD dicapai oleh Kabupaten Bangli, yang jumlah sekolahnya paling sedikit dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya di Bali.

Secara nasional, pencapaian SNP Provinsi Bali bersama Provinsi NTT dan Provinsi DI Yogyakarta berada pada kuadran 'menuju SNP 3' yaitu skor standar SKL mencapai 65% dan skor pembobotan kelima standar yang lain di atas 65% ($Y \leq 65\%$, $X > 65\%$).

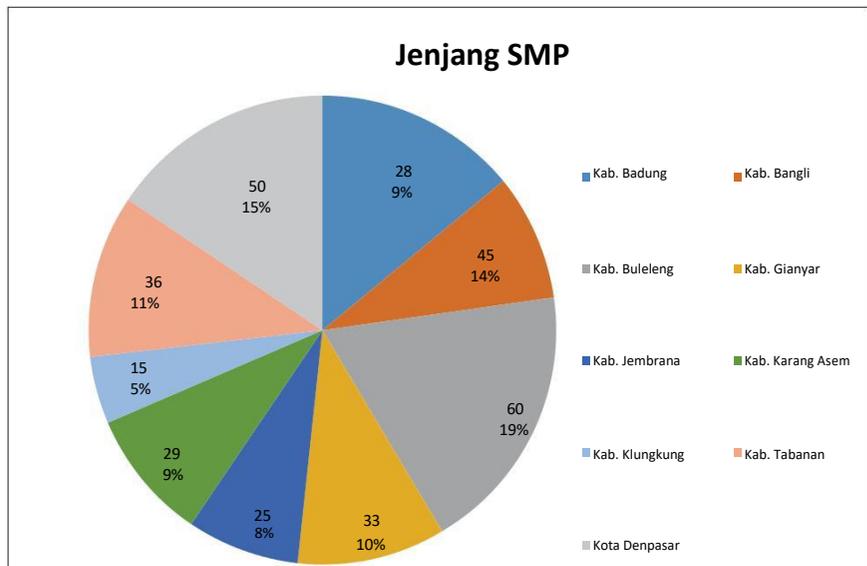
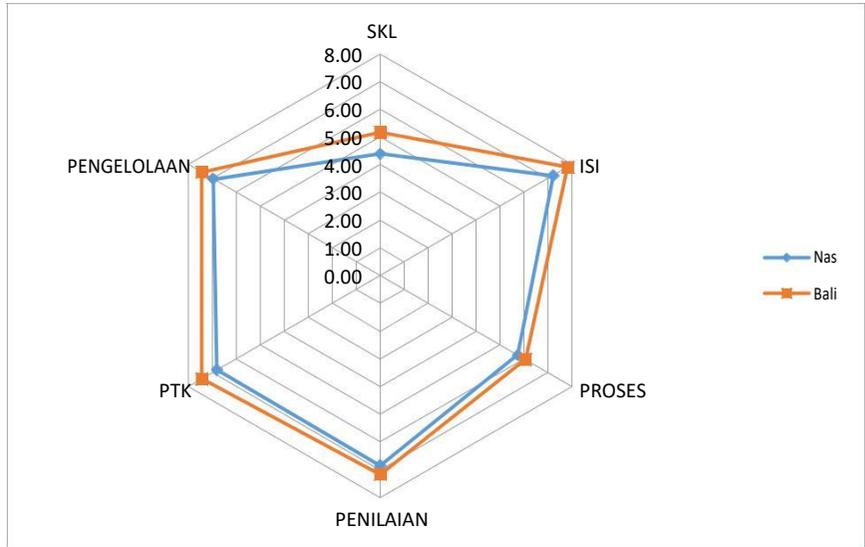


Anatomi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

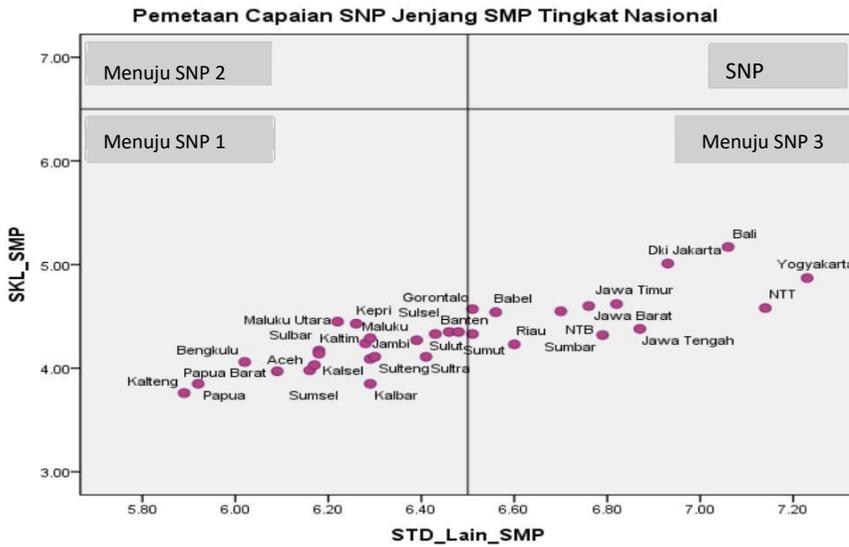
Refleksi Pengelolaan Pendidikan di Bali

Komposisi persentase sekolah secara relatif di provinsi Bali dalam kabu-paten dan kota seperti diagram di samping.

Ketercapaian SNP secara Nasional untuk jenjang SMP menunjukkan bahwa standar Isi memiliki skor tertinggi dibandingkan dengan standar SKL, Proses, Penilaian, PTK dan Pengelolaan, dengan capaian rerata adalah 6,25. Jika dibandingkan dengan skor nasional, skor masing-masing standar di Provinsi Bali lebih tinggi untuk semua standar.



Skor SNP untuk masing-masing kabupaten/kota lebih tinggi dibandingkan dengan skor SNP Nasional. Kabupaten Bangli, Gianyar, Jembrana, Karangasem, dan Kota Denpasar memiliki skor SNP di atas skor nasional serta melampaui skor provinsi.

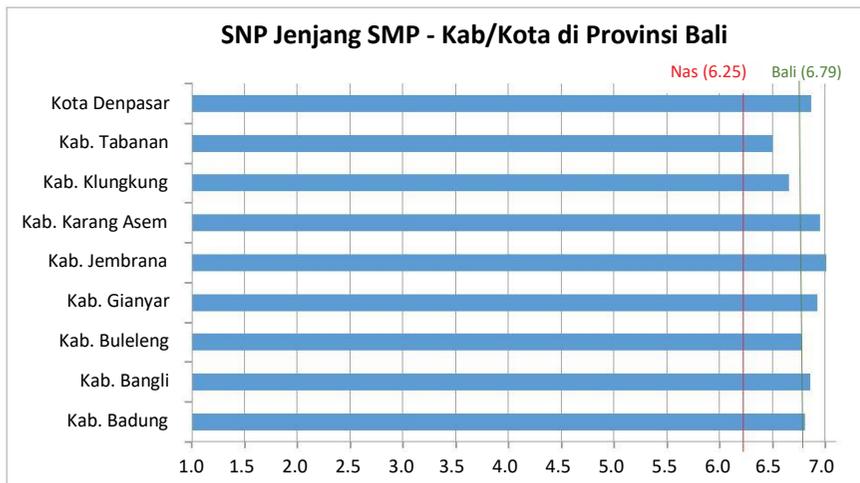


Sumber: Bahan paparan ke BSDOMK PMP (2013)

Profil relatif kabupaten dan kota di Provinsi Bali, yang capaiannya di bawah rerata capaian provinsi (6,79), meliputi: Tabanan, Klungkung, dan Buleleng (mencapai batas rerata).

Walaupun capaian EDS Provinsi Bali di atas rerata nasional (6,25), masih perlu mengoptimalkan korelasi antar standar pendidikan untuk meningkatkan capaian kompetensi lulusan sebagai tujuan dari menerapkan standar dalam penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Bali. Hal ini perlu menjadi perhatian seluruh *stake-holder* mengingat capaian kompetensi lulusan dibandingkan standar pendidikan yang lainnya relatif belum serasi, untuk mengharmoniskan antar standar pendidikan agar tujuan pendidikan dapat terus ditingkatkan. Capaian standar isi yang paling tinggi dibandingkan standar lain, dalam kurun waktu tertentu dengan berinteraksi secara sinerjis dan mutualistik diharapkan mendorong capaian yang tinggi juga pada kompetensi lulusan.

Standar Nasional Pendidikan pada hakekatnya bersifat standar kriteria acuan dalam menentukan capaian sekolah dengan pendekatan memotret



Anatomi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Refleksi Pengelolaan Pendidikan di Bali

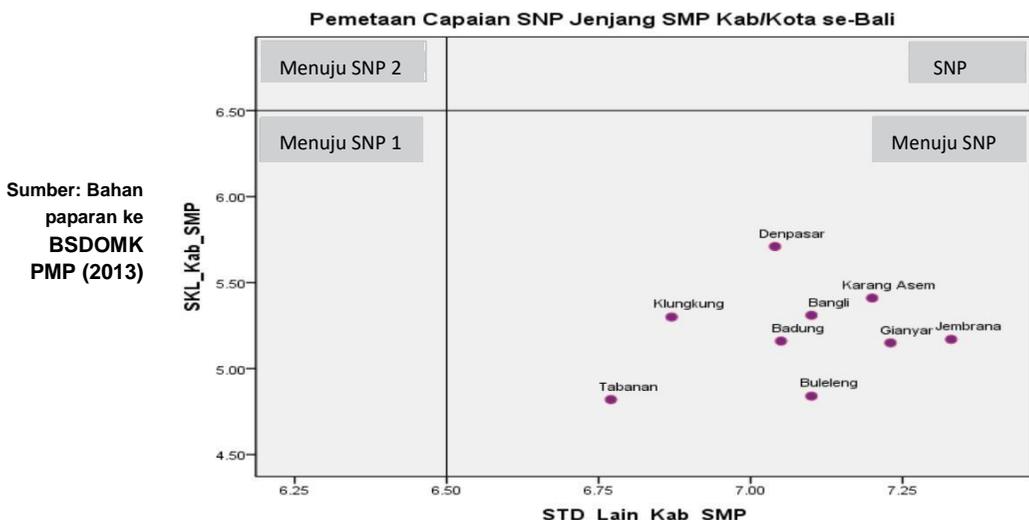
sendiri kinerjanya berdasarkan acuan diskripsi dalam menuangkan dalam kuantitatif. Walaupun demikian, informasi kuantitatif yang membantu menentukan kecenderungan umum kinerja sekolah segera akan dikembalikan kepada kondisi deskripsi kualitatif capaian sekolah tersebut sebagai acuan dalam pembenahannya di kemudian hari.

Posisi relatif Provinsi Bali dalam sebaran diagram di atas, tampak pada kwadran empat, posisi relatif SKL dibandingkan provinsi lainnya berada lebih tinggi. Sedangkan untuk standar yang lainnya berada di bawah NTT dan Yogyakarta. Posisi yang paling rendah yaitu kwadran tiga adalah Kalimantan Tengah.

Di Provinsi Bali, posisi relatif antar kabupaten dan kota, posisi tertinggi capaian SKL dicapai oleh Kota Denpasar. Kabupaten yang harus bekerja paling keras untuk mencapai SNP adalah Kabupaten Tabanan. Kabupaten Jemberana posisi relatifnya untuk standar lain selain SKL lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya.

Secara keseluruhan, semua daerah di Bali harus bekerja lebih keras untuk mencapai batas SNP (6,50). Berdasarkan Peta Mutu Pendidikan berbasis EDS, masih ada jarak yang jauh untuk mencapai SNP pada SKL. Capaian SNP lainnya (selain SKL) yang tinggi dengan capaian SKL yang belum seimbang, mungkin dapat dielaborasi sebagai upaya pembenahan SNP selain SKL, belum terlalu lama dilakukan. Sehingga pembenahan SNP (selain SKL) memerlukan waktu untuk berdampak pada peningkatan capaian kompetensi lulusan.

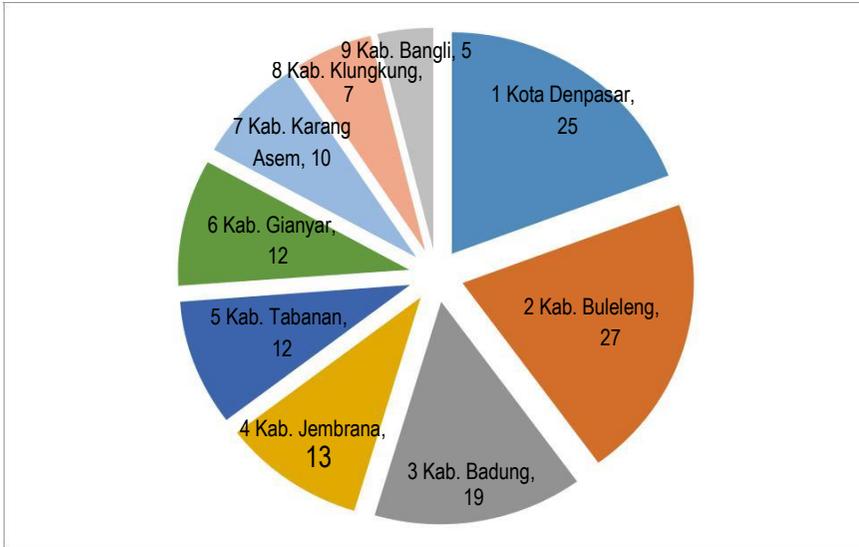
Bukanlah mencari pembenaran terhadap informasi yang diperoleh melalui EDS, adalah sangat penting untuk menganalisis setiap informasi yang diperoleh melalui proses sistematis dan terencana. Untuk pengolahan selanjutnya semakin penting mencari informasi lanjutan tentang lama kinerja pengelolaan pendidikan dengan posisi seperti dalam peta tersebut. Dengan demikian dapat dianalisis, bahwa SKL yang dicapai saat ini bukanlah atau ya karena seperti saat ini, sehingga proses analisisnya akan menjadi lebih canggih.



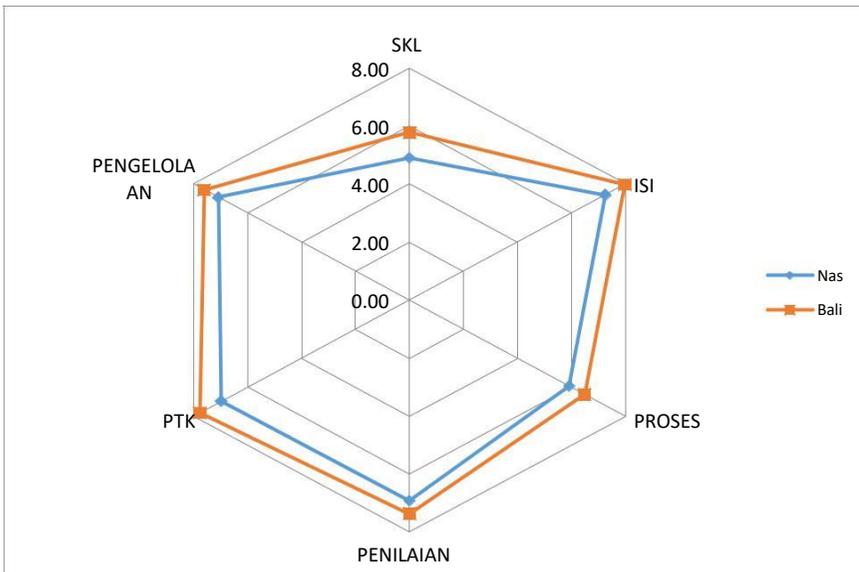
Secara nasional, Provinsi Bali bersama beberapa provinsi lain berada pada kuadran ‘menuju SNP 3’ dimana skor standar SKL mencapai 65% dan skor pembobotan kelima standar yang lain di atas 65% ($Y \leq 65\%$, $X > 65\%$).

Jenjang Pendidikan Menengah

Jumlah sekolah jenjang SMA di Provinsi Bali yaitu 130 sekolah yang tersebar di sembilan kabupaten dan kota dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Buleleng, sekitar 21%.



Jika dibandingkan antara pencapaian SNP di tingkat Nasional dan skor pencapaian SNP jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Bali, mencapai lebih tinggi, seperti grafik radar berikut.

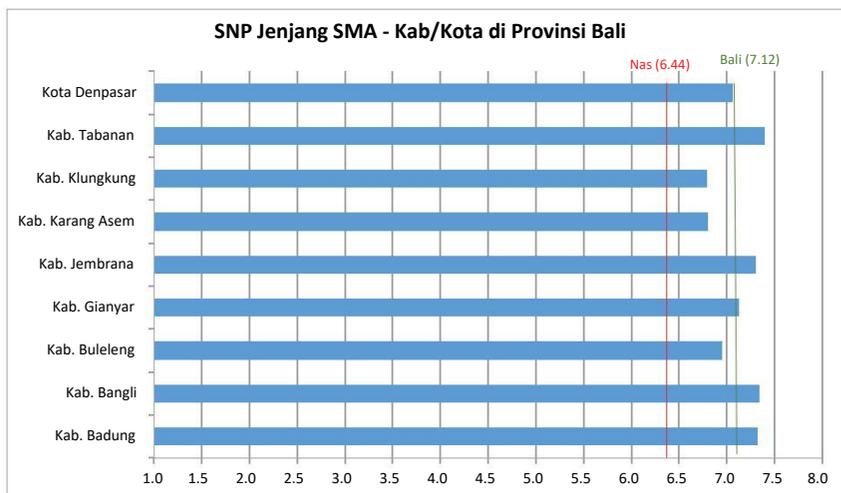


Anatomi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Refleksi Pengelolaan Pendidikan di Bali

Ketercapaian SNP secara Nasional untuk jenjang SMA menunjukkan bahwa standar Isi memiliki skor tertinggi dibandingkan dengan standar SKL, Proses, Penilaian, PTK dan Pengelolaan.

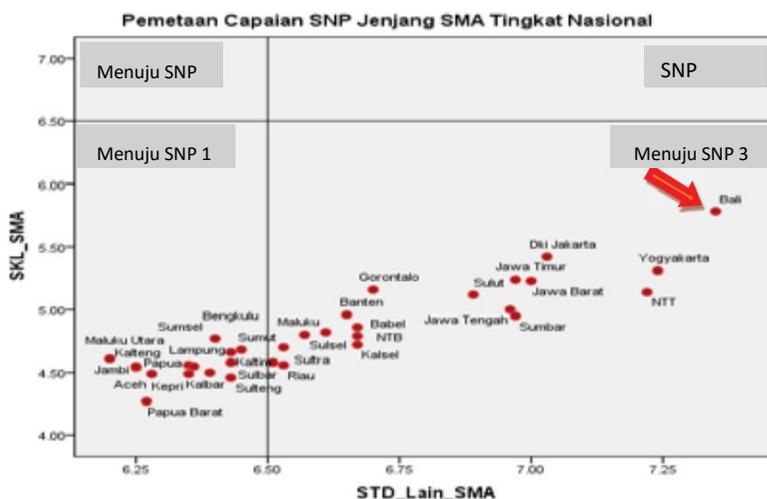
Skor SNP untuk masing-masing kabupaten/kota lebih tinggi dibandingkan dengan skor SNP Nasional. Kabupaten Tabanan, Jembrana, Bangli, dan Badung memiliki skor SNP di atas skor nasional (6,44) serta melampaui skor provinsi (7,12).



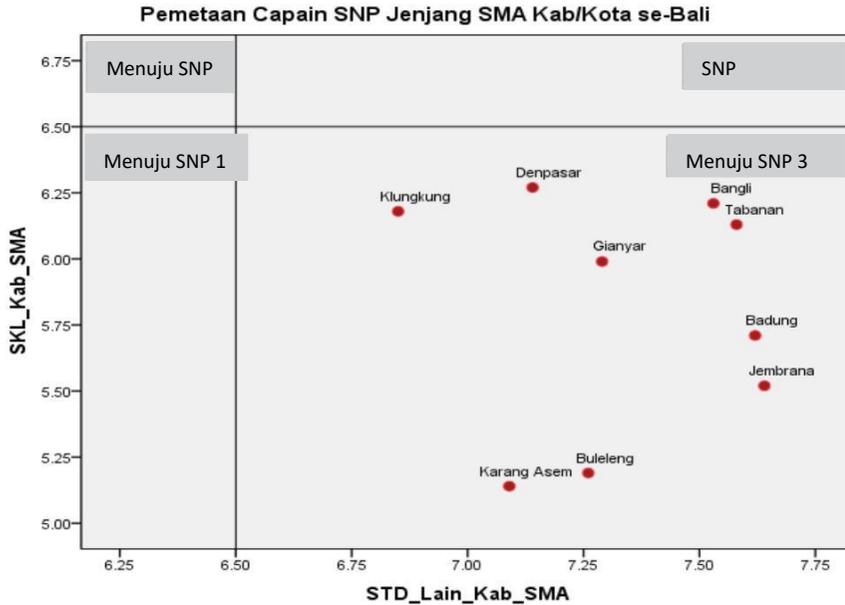
Daerah yang capainnya masih dibawah rerata Provinsi Bali adalah Kab. Klungkung, Kab. Karangasem, dan kab Buleleng, tetapi semuanya masih berada di atas skor 6,5.

Peta Mutu Pendidikan untuk Provinsi Bali berbasis EDS, berada pada kwadran keempat, yaitu "menuju SNP 3". Capaian SK dan santar yang lainnya, SMA Bali berada paling tinggi, hanya belum melewati ambang batas pada katagori SNP, yaitu SKL = 6,50. Walaupun demikian, apabila kinerja SNP yang lainnya tetap dipertahankan dan terus ditingkatkan dalam kurun waktu tertentu pada gilirannya SKL akan meningkat juga.

Sumber: Bahan paparan ke BSDOMK PMP (2013)



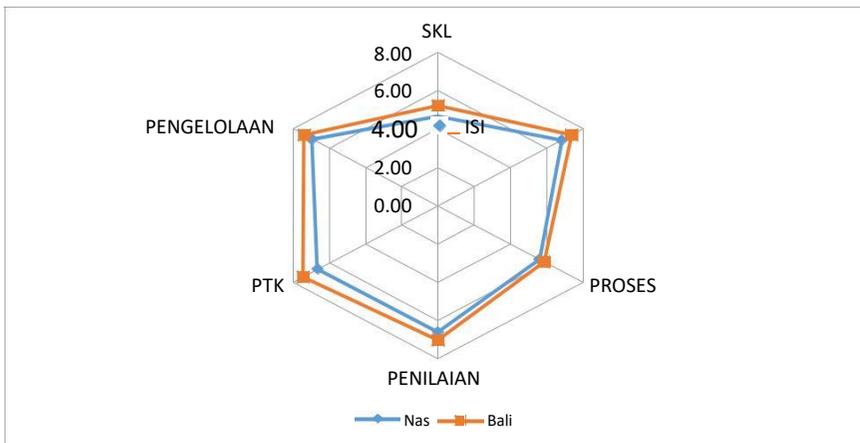
Secara nasional, koordinat berdasarkan SNP hasil EDS, Provinsi Bali bersama beberapa provinsi lain berada pada kuadran 'menuju SNP 3' dimana skor standar SKL di mencapai 65% dan skor pembobotan kelima standar yang lain di atas 65% ($Y \leq 65\%$, $X > 65\%$).



Sumber: Bahan paparan ke BSDOMK PMP (2013)

SMK

Jumlah sekolah jenjang SMA di Provinsi Bali yaitu sekolah yang tersebar di sembilan kabupaten dan kota dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Buleleng, sekitar%.

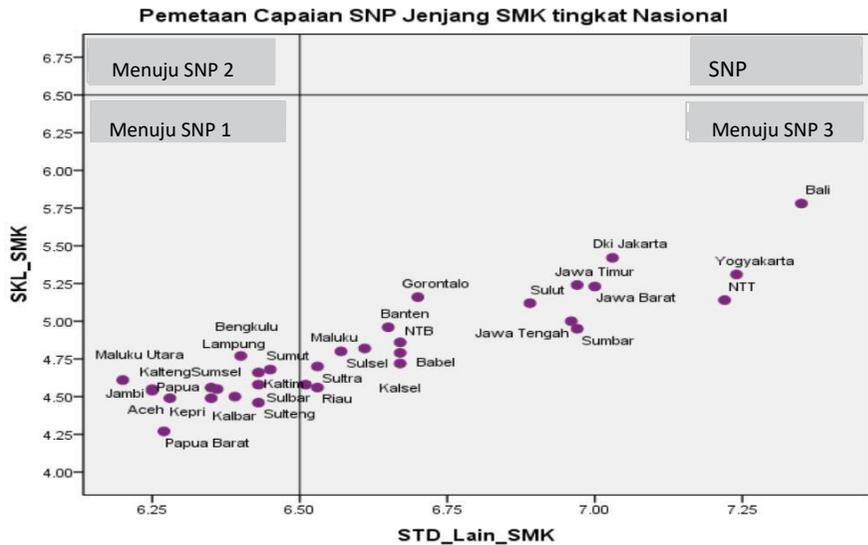


Skor SNP untuk masing-masing kabupaten/kota lebih tinggi dibandingkan dengan skor SNP Nasional. Kabupaten Tabanan, Jembrana, Bangli, dan Badung memiliki skor SNP di atas skor nasional (6,44) serta melampaui skor provinsi (7,12).

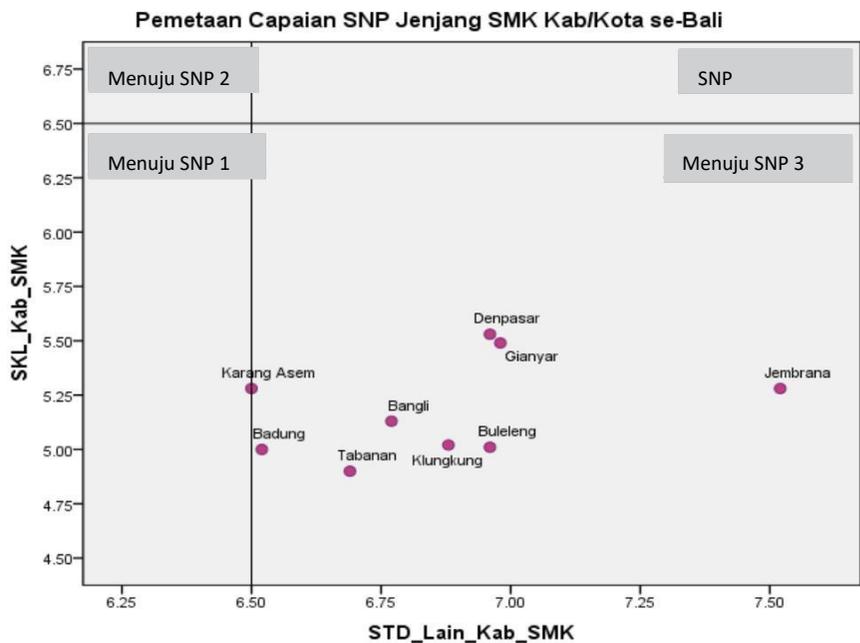
Anatomi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Refleksi Pengelolaan Pendidikan di Bali

Sumber: Bahan paparan ke BSDOMK PMP (2013)



Ketercapaian SNP secara Nasional untuk jenjang SMA menunjukkan bahwa standar Isi memiliki skor tertinggi dibandingkan dengan standar SKL, Proses, Penilaian, PTK dan Pengelolaan.



Daerah yang capainnya masih dibawah rerata Provinsi Bali adalah Kab. Klungkung, Kab. Karangasem, dan kab Buleleng, tetapi semuanya ma-sih berada di atas skor 6,5.

Peta Mutu Pendidikan untuk Provinsi Bali berbasis EDS, berada pada kwadran keempat, yaitu "menuju SNP 3". Capaian SK dan santar yang lainnya, SMA Bali berada paling tinggi, hanya belum melewati ambang batas

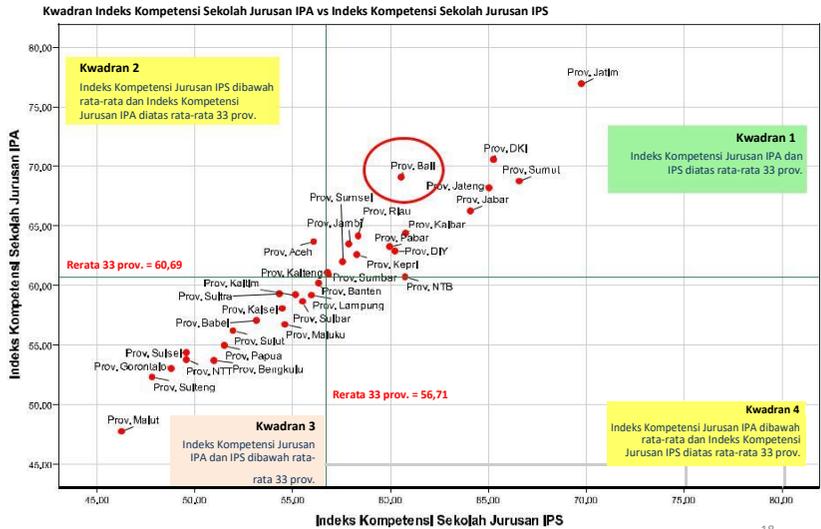
pada katagori SNP, yaitu SKL = 6,50. Walaupun demikian, aabila kinerja SNP yang lainnya tetap dipertahankan dan terus ditingkatkan dalam kurun waktu tertentu pada gilirannya SKL akan meningkat juga.

Provinsi Bali posisi relatif dibandingkan dengan provinsi lainnya berbasis hasil EDS, yaitu jenjang sekolah dasar (SD) seperti terlihat pada grafik 3 paling tinggi yaitu 56,89%, persentase selanjutnya secara berurutan TK sebesar 26,87%, SMP sebesar 8,76%, SMA sebesar 3,92%, SMK sebesar 3,16% serta SLB dengan jumlah terkecil hanya sebesar 0,37%.

Sebagai bahan tambahan dalam menganalisis kompetensi lulusan se-lain melihat capapain standar kompetensi lulusan melalui EDS adalah dengan mempertimbangkan hasil ujian nasional dan ujian sekolah. Hasil UN (ujian nasional) dapat dijadikan sebagai faset lain sebagai indikator pencapaian SKL peserta didik dalam bentuk indek kompetensi sekolah.

Posisi Provinsi Bali berdasarkan perolehan UN tahun 2013, yaitu di kwadran 1. Artinya capaian sekolah dengan membuat hubungan antara indeks kompetensi sekolah jurusan IPA dan indeks kompetensi sekolah jurusan IPS Provinsi Bali berada pada kwadrant 1, IKS Program IPA > 65% dan IKS Program IPS > 60% (Y>65%, X>65%). Secara umum Provinsi Bali berada di bawah Provinsi Jawa Timur dan DKI Jakarta, tetapi di atas provinsi yang lainnya, berdasarkan ujian nasional.

Indeks Kompetensi Sekolah Menurut Jurusan dan Provinsi



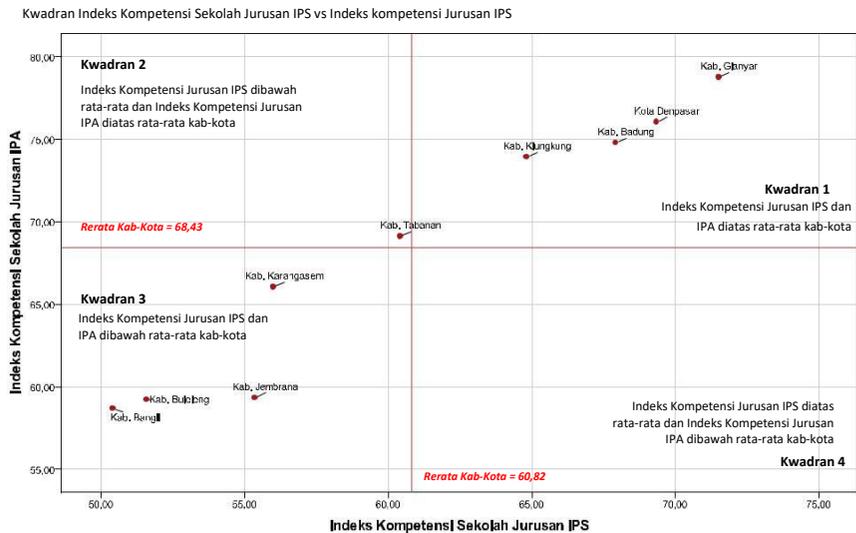
Sumber data:
Paparan Balitbang
Dikbud pada Rakor
Kemdikbud Tgl 1 sd
3 Desember 2013

Indeks kompetensi sekolah jurusan IPA dan IPS di atas rerata 33 provinsi; dengan koordinat capaian IPA mendekati 70, di bawah Provinsi Jawa Timur dan DKI Jakarta, capaian IPS lebih sedikit dari 60 di bawah Provinsi Jatim DKI, Sumut, dan Jateng; agak dekat dengan Provinsi Kalbar dan NTB.

Sebaran Indeks Kompetensi Sekolah berbasis UN kabupaten dan kota di Provinsi Bali, posisi tertinggi dan berada di kwadran 1. Posisi atau koordinat kabupaten dan kota berdasarkan rerata provinsi adalah Kabupaten Gianyar, Kota Denpasar, Kab Badung, dan Kab Klungkung berada di kwadrant satu.

Artinya keempat daerah tersebut mencapai di atas rerata provinsi. Daerah yang posisinya paling rendah dan berada pada kwadran tiga adalah Kab Bangli, Kab Buleleng, Kab Jembrana, dan Kab Karangasem. Hanya ada satu kabupaten yang berada pada kwadran 2, yaitu Kab Tabanan, dengan perolehan IPA di atas rerata provinsi dan IPS di bawah rerata provinsi.

Indeks kompetensi Sekolah Menurut Jurusan dan Kab-Kota Provinsi Bali



Sumber data:
Paparan Balitbang
Dikbud pada Rakor
Kemdikbud Tgl 1 sd
3 Desember 2013

Pencapaian peserta didik berupa kompetensi lulusan sangat dipengaruhi oleh faktor pengelolaan sekolah, kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, proses pembelajaran, penilaian, dan prediktor lainnya sesuai dengan konteks lokal. Berdasarkan peta kompetensi sekolah sebagai cermin capaian kinerja sekolah, daerah yang masih berada di kwadran kesatu sangat diperlukan upaya strategis dan implementatif dalam meningkatkan capaian SKL di masa mendatang.

Capaian standar nasional pendidikan merupakan faktor prediktor terhadap kesuksesan mencapai tujuan pendidikan nasional pada level sekolah sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU No 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan demikian, upaya fasilitasi yang merupakan salah satu faset dalam penjaminan mutu pendidikan oleh berbagai entiti dalam pranata birokrasi dan lembaga lainnya hendaknya diarahkan untuk mencapai SNP, walaupun tidak secara keseluruhan tetapi ada fokus SNP yang diambil peran oleh berbagai institusi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alit Mariana, Made. 2004. *Tinjauan Kritis Program Kemitraan KTI-KBI*. Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan.
- Bawa Atmaja, Nengah. 2010. ***Ajeg Bali: Gerakan, Identitas Kultural, dan Globalisasi***. LKIS Yogyakarta.
- Conner, Daryl R. 1992. *Managing at The Speed of Change: How Resilient Managers Succeed and Prosper Where Other Fail*. OD. Resources, Inc. USA.
- Danielson & Charlotte. 2002. *Enhancing Student Achievement: A Framework for School Improvement*. Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD). United States of America.
- Hopf, RH., et al. 1999. *Guide to a Balance Scorecard: Performance Management Methodology, Moving from Performance Measurement to Performance Management*. US Department of Commerce.
- How Does Your Organization Define Effectiveness?* <http://www.isbe.state.il.us/EFAB/Survey/DefineEffectiveness.pdf>
- Idrus N, Buchara< Sukisno, & Jones. 2000. *Quality Assurance handbook*. Engineering Education Development Project. Directorate General of Higer Education.
- Microsoft® Encarta® Reference Library 2003. © 1993-2002 Microsoft Corporation.
- Sallis, E. 1993. *Total Quality Management in Education*. London: Kogan Page Limited.
- Smith C Stuart & Philip K Piele. 2006. ***School Leadership: Handbook for Excellence in Student Learning***. Fourt Edition. Corwin Press, California.
- Undang-undang No 20 Tahun 2003. *Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara. Nomor 78, 2003.
- Webster, WJ., *School Effectiveness Indices*, School Effectiveness Indices.htm
- Wholstetter, P & Mohrman, SA. 1996. *Assesment of School-Based Management: Studies of Education Reform*. US Departemen of Education, Office of Education Research and Improvement.
- Joyce B & Marsha Weil. 1980. *Models of Teaching*. New Jersey. Prentice-Hall, Inc. Loucks-Horsley, Katherine E. Stiles, Susan Mundry, Nancy Love, Peter W. Hewson. 2010. *Designing Proffesional Development for Teacher of Science and Mathematics*. 3rd ed. Corwin.
- Norushe TF, D Van Rooyen, dan J Strumpher. 2004. *In-service education and training as experienced by registered nurses*.
- DeBoer, George. E. 1991. *A History of Ideas in Science education: Implication for Practice*. New York: Teachers Colledge, Columbia University.
- Monk, M & Dillon, J. 1995. *Learning Teach Science: Activities for Student Teachers and Mentors*. Bristol: The Falmer Press, taylor & Francis Inc.
- Smith, P & O.R. Jones. 1993. *The Philosophy of Mind: An Introduction*. USA: Cambridge University Press.
- How Does Your Organization Define Effectiveness?* <http://www.isbe.state.il.us/EFAB/Survey/DefineEffectiveness.pdf>
- Sallis, E. 1993. *Total Quality Management in Education*. London: Kogan Page Limited.
- Webster, WJ., *School Effectiveness Indices*, School Effectiveness Indices.htm
- Wholstetter, P & Mohrman, SA. 1996. *Assesment of School-Based Management: Studies of Education Reform*. US Departemen of Education, Office of Education Research and Improvement.



KAPITA SELEKTA PENGELOLAAN PENDIDIKAN

SEBAGAI bagian akhir dari buku ini adalah beberapa pemikiran dan kajian tentang, mulai dari konsepsi belajar dan hakekatnya, pengelolaan fasilitasi peningkatan kompetensi, sumber belajar, sampai dengan model pembelajaran. Potret ini merupakan fenomena pendidikan dalam kerangka pandangan praktisi dan akademisi pendidikan yang ditangkap di Bali. Potret ini kemungkinan benar juga kemungkinan kurang tepat, tetapi paling tidak kaedah

ke-ilmiah-an dicoba diikuti secara ketat, sehingga diperoleh gambaran yang mendekati kondisi factual dan aktual. Dengan demikian, profile yang ditampilkan dalam kajian berikut mungkin berupa kapita selekta, dengan menyoroti secara tertentu fenomena pendidikan tersebut.

Pendokumentasian kajian ini kami anggap sangat perlu, mengingat sangat diperlukan basis data sebagai pijakan dalam melaksanakan fasilitasi pengembangan sekolah untuk mencapai SNP atau melebihinya. Kami menyadari upaya fasilitasi yang dilakukan dalam pengembangan sekolah dan hasil yang dicapai merupakan upaya sinerjis antar berbagai lembaga yang mempunyai tanggungjawab pembinaan pendidikan. Tanpa mengurangi rasa hormat dan apresiasi kami secara kelembagaan dan pribadi kami tampilkan profile pengelolaan pendidikan yang berhasil dipotret dengan menggunakan kaca mata akademisi.

Kurikulum Baru, Harapan Baru**

oleh : Ni Wayan Surasmini, S.Si, M.Pd*

LATAR belakang perlunya perubahan kurikulum menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh bahwa di tengah perubahan zaman, sistem pendidikan di Indonesia juga harus selalu ikut menyesuaikan. Pengembangan kurikulum 2013 diharapkan dapat menjadi jawaban untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia hadapi perubahan dunia. Pengembangan kurikulum 2013 sudah melalui proses panjang dan ditelaah sehingga saatnya disampaikan ke publik agar dapat bisa memberi pandangan lebih sempurna. Dengan segala konsekuensinya, perubahan kurikulum yang akan dimulai 2013 harus dilakukan jika tidak ingin kualitas SDM Indonesia tertinggal.

Wacana perubahan kurikulum pendidikan nasional kian menguat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertekad untuk merevisi kurikulum yang selama ini berlaku. Selain karena masa “aktif” kurikulum KTSP (2006) ini memang akan berakhir, fenomena anomali pendidikan tampaknya menjadi pendorong upaya merevisi kurikulum tersebut. Kurikulum yang menekankan pada pendidikan karakter menjadi fokus perhatian dalam kurikulum baru ini.

Ada beberapa prasyarat yang kiranya menjadi pertimbangan dalam penyusunan kurikulum baru. Pertama, kurikulum tersebut harus berorientasi pada tujuan pendidikan. Hal ini dikandung maksud bahwa kurikulum merupakan alat dan cara yang digunakan dalam pendidikan. Alat tersebut tentunya harus mengacu pada tujuan pendidikan itu sendiri. Hal ini mengisyaratkan bahwa pendidikan nasional berupaya membentuk karakter anak bangsa yang tangguh. Kedua, kurikulum harus mampu mengakomodir dan melestarikan budaya bangsa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultur dan plural. Berbagai bahasa, suku, agama, budaya, etnis, tradisi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke adalah khazanah kekayaan budaya yang menginspirasi corak pendidikan. Keaneka-ragaman tersebut adalah kearifan lokal yang tidak boleh digeser dan dihilangkan. Kurikulum baru diharapkan mampu mengembangkan khazanah budaya tersebut dalam membangun karakter peserta didik yang bersumbu pada nilai luhur tradisi dan budaya. Ketiga, kurikulum harus bernuansa perbaikan. Salah satu prinsip kurikulum adalah kontinuitas, ada keberlangsungan. Di sini, kurikulum yang telah ada ibarat mata rantai yang saling terkait. Perubahan kurikulum dalam hal ini tidak serta merta merombak dan meninggalkan kurikulum sebelumnya. Namun semangat perbaikannya yang menjadi dasar perubahan tersebut.

Pengembangan kurikulum 2013, selain untuk memberi jawaban terhadap beberapa permasalahan yang melekat pada kurikulum sebelumnya, bertujuan juga untuk mendorong peserta didik atau siswa, mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan meng-

omunikasikan (mempresentasikan), apa yang di peroleh atau diketahui setelah siswa menerima materi pembelajaran. Oleh karena itu diharapkan siswa kita memiliki kom petensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif. Sedikitnya ada lima entitas, masing-masing peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen satuan pendidikan, Negara dan bangsa, serta masyarakat umum, yang diharapkan mengalami perubahan.

Tema pengembangan kurikulum 2013 adalah dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap (tahu mengapa), keterampilan (tahu bagaimana), dan pengetahuan (tahu apa) yang terintegrasi. Diakui dalam perkembangan kehidupan dan ilmu pengetahuan abad 21, kini memang telah terjadi pergeseran baik ciri maupun model pembelajaran. Inilah yang diantisipasi pada kurikulum 2013.

Adapun ciri paradigma belajar abad 21 adalah pertama, **Informasi** yang tersedia dimana saja dan kapan saja dengan pembelajaran yang diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber observasi; kedua, **Komputasi** melalui sarana komputer yang membantu dalam proses pembelajaran untuk mengarahkan pembelajaran untuk merumuskan masalah dan bukan hanya menyelesaikan masalah saja; ketiga, **Otomasi** yang menjangkau semua kegiatan rutin untuk mengarahkan pembelajaran untuk berlatih berfikir analitis; dan keempat, **Komunikasi** darimana saja dan kemana saja dengan pembelajaran yang menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah.

Dari perubahan paradigma belajar tersebut di atas, melalui pengembangan kurikulum 2013 diharapkan peserta didik menjadi lebih produktif, kreatif, inovatif dan afektif. Sementara itu pendidik dan tenaga kependidikan diharapkan akan menjadi lebih bergairah dalam mengajar dan mampu memenuhi ketentuan 24 jam perminggu. Sedangkan bagi manajemen satuan pendidikan diharapkan akan lebih mengedepankan layanan pembelajaran termasuk bimbingan dan penyuluhan. Secara umum bagi masyarakat, bangsa dan Negara, melalui perubahan kurikulum 2013 diharapkan dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan pendidikan di sekolah dan memperoleh lulusan sekolah yang kompeten, meningkatkan daya saing dan reputasi internasional dalam bidang pendidikan.

Perubahan kurikulum pendidikan yang dimulai 2013 harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh semua pihak dengan saling mendukung agar kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia tidak tertinggal dengan negara lain. ❖

* *Widyaiswara LPMP Prov. Bali*

** *Majalah Saraswati*

SELAMAT DATANG KURIKULUM 2013**

oleh: **Ni Made Suciani***

BANYAK pandangan terhadap hadirnya kurikulum baru yang disebut kurikulum 2013. Semua pandangan dari sisi kritis telah diutarakan oleh para pakar pendidikan sehingga muncul diskusi yang berkepanjangan, saling adu argumentasi yang semuanya memiliki kebenaran sendiri-sendiri. Seperti perumpamaan bahwa jika sesuatu itu dianalisis dengan pisau analisis yang sangat tajam, maka akan menghasilkan benda yang bagus dan berkualitas, tetapi benda itu belum tentu yang dimaksud oleh ahli lain yang juga punya pisau analisis yang berbeda. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita tidak akan membahas apa baik atau buruknya kurikulum 2013, tetapi marilah kita menyambut dengan pemikiran positif dan optimis bahwa kurikulum 2013 akan memberikan kemudahan kepada guru-guru. Karena setiap perubahan kurikulum selalu bertujuan memperbaiki dan melengkapi kurikulum sebelumnya.

Kemudahan bagi guru

Mengacu pada kebijakan kurikulum baru, jika dilihat dari elemen guru, ada empat komponen yang mengalami kondisi yang lebih baik di tahun 2013. Yang pertama yaitu kewenangan, kalau pada saat KTSP guru memiliki wewenang penuh atau hampir mutlak atas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran pada peserta didik tetapi nanti wewenang itu akan terbatas, sebab sudah ada pedoman guru yang dijadikan acuan, guru yang mampu tetap dapat mengembangkan perencanaan pembelajaran sendiri, tetapi sudah ada acuan dasar yang disiapkan pemerintah. Kedua, kompetensi guru pada KTSP dituntut sangat tinggi, karena guru harus merancang pembelajaran yang dapat menciptakan situasi pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan serta tercapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Dalam kurikulum 2013 nanti, meskipun setiap guru dituntut harus memiliki kompetensi tinggi, tetapi jika guru tidak memiliki kompetensi tinggi dalam mengembangkan perencanaan pembelajaran, masih disediakan buku pegangan yang dapat digunakan sebagai acuan. Ketiga, dalam kurikulum tahun 2013 nanti beban guru akan semakin ringan, karena tidak dituntut untuk membuat perencanaan pembelajaran yang hebat. Keempat, waktu yang dibutuhkan guru akan lebih efektif karena akan lebih focus pada pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas.

Untuk pengadaan buku-buku dalam KTSP, peran penerbit sangat besar, tetapi pada kurikulum 2013 nanti peran penerbit menjadi kecil. Hal ini disebabkan, pemerintah akan menyediakan buku pegangan siswa dan buku pegangan guru, sehingga semua buku yang digunakan oleh sekolah akan sama. Meskipun nantinya sekolah bisa menggunakan referensi lain sebagai acuan, tetapi tidak mewajibkan peserta didiknya untuk membeli buku-buku lain. Pemerintah melalui KTSP menyediakan banyak sekali pilihan buku yang telah disediakan melalui BSE (Buku Sekolah Elektronik), yang sebenarnya sangat baik untuk memperkaya pengetahuan dan pemahaman guru

dan siswa tetapi sayang sangat sedikit guru yang mampu memanfaatkan kesempatan untuk menggunakan BSE, di samping buku ini jika dicetak akan membutuhkan biaya cetak yang tinggi.

Bagi peserta didik

Jika dilihat dari elemen peserta didik, ada tiga komponen yang mengalami perubahan yaitu, variasi materi dan proses akan lebih rendah, sehingga guru tidak terlalu dituntut untuk memikirkan bagaimana materi dan proses yang akan dibuat dalam perencanaan, tetapi nantinya guru cukup belajar bagaimana caranya agar materi dan proses yang ada dapat memberi pengalaman yang bermakna dalam pelaksanaan pembelajaran bagi peserta didik. Beban siswa akan ringan terutama dalam membeli buku, karena buku wajib yang akan digunakan sudah disiapkan oleh pemerintah.

Ada satu hal lagi yang memudahkan guru adalah pembuatan perencanaan pembelajaran yaitu silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Kalau dalam KTSP guru dituntut membuat silabus dan RPP karena ini merupakan bagian yang akan disupervisi oleh kepala sekolah atau pengawas. Tetapi nanti dalam kurikulum 2013 silabus sudah disiapkan oleh pemerintah, hanya guru dapat melakukan pengembangan jika diperlukan. Begitu pula dengan RPP, guru hanya perlu mengembangkan dari buku teks dan buku pedoman guru yang telah disediakan. Karena dalam buku pedoman guru tersebut sudah disediakan langkah-langkah pembelajarannya. Dalam kurikulum 2013 nanti supervisi oleh pemerintah daerah melalui pengawas sekolah hanya dituju-kan pada pelaksanaan pembelajaran.

Berdasarkan pengalaman penulis yang telah mendampingi para guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran pada KTSP, sangatlah tidak mudah, apalagi pada Sekolah Dasar kelas I, II dan III yang menggunakan pendekatan tematik. Berkali-kali diberikan pelatihan tematik, tetapi perangkat pembelajaran yang berbentuk tematik tidak kunjung terwujud. Meskipun mereka telah paham apa itu pendekatan tematik, tetapi untuk merancang perangkat pembelajaran yang benar-benar utuh dan lengkap membutuhkan waktu lama, pengalaman dan keahlian menulis. Belum lagi mereka harus memikirkan cara mengajarkannya agar peserta didik dapat memahami, ditambah lagi mereka harus melakukan penilaian yang berbasis kompetensi. Dengan demikian menurut hemat penulis, kurikulum 2013 nanti dapat meringankan beban guru, sehingga guru punya waktu lebih banyak untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran karena tidak terlalu dibebani dengan tugas-tugas administrasi perencanaan pembelajaran.

Kunci utama

Terlepas dari semua itu, apapun kurikulumnya guru tetaplah pemain utamanya. Peningkatan motivasi dan kompetensi guru adalah harga mati. Hanya ada satu cara untuk meningkatkan motivasi dan kompetensi guru adalah dengan banyak belajar melalui bacaan-bacaan yang dapat memberi inspirasi. Seperti arti kata guru dari bahasa sansekerta, *Gu* artinya kegelapan dan *Ru* art-inya membebaskan dari. Sehingga guru adalah pelita dalam kedelapan seperti dalam lagu hymne guru. Jadi bagaimana guru dapat menjadi pelita kalau guru tidak pernah belajar, sementara pe-rserta didik sudah belajar dari segala sumber informasi yang tak terbatas, jangan-jangan gurunya selalu jadi pahlawan kesiangan bagi peserta didiknya. Semoga itu tidak akan terjadi. ❖

* *Widyaiswara LPMP Prov. Bali*

** *Majalah Saraswati*

PENJAMINAN MUTU PEMBELAJARAN (PMP)**

Oleh: I Made Suparma*

I. Pendahuluan

Penjaminan mutu pendidikan merupakan proses penetapan standar mutu dan pencapaian mutu secara berkelanjutan sehingga siswa, orang tua masyarakat dan pemerintah mencapai kepuasan (Permendiknas no.63, 2009). Salah satu standar mutu pendidikan adalah standar proses yang meliputi: kualitas perencanaan pembelajaran, kualitas proses pembelajaran dan supervisi

Pembelajaran merupakan salah satu kegiatan pendidikan yang sangat penting dan menentukan hasil pendidikan, baik output maupun *outcome* (dampak pendidikan). Rendahnya mutu pembelajaran dapat mengakibatkan kerugian besar dalam pendidikan, baik kerugian material maupun waktu. Oleh karena itu penjaminan mutu pembelajaran harus dilakukan secara benar dan berkelanjutan.

II. Pembahasan

Penjaminan mutu pembelajaran yang disingkat PMP merupakan usaha untuk meningkatkan mutu pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka mencapai standar mutu yang telah ditetapkan dan meningkatkan standar mutu. Mutu pembelajaran mencakup perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian proses dan hasil belajar siswa (terutama *output*)

Perencanaan pembelajaran mencakup empat komponen penting yaitu: kualitas rumusan tujuan pembelajaran, kualitas materi atau bahan ajar, kualitas rancangan proses pembelajaran, dan media serta sumber belajar. (Permengpan no. 16, 2010) Untuk merancang rencana pembelajaran, guru perlu mempertimbangkan variabel pembelajaran yang meliputi tiga komponen yaitu: 1) komponen kondisi yaitu: tujuan mata pelajaran dan kompetensi dasar, materi pelajaran, kondisi siswa. 2) Komponen strategi yaitu: strategi pengorganisasian materi pelajaran, strategi penyampaian, dan strategi pengelolaan kelas.

3) komponen hasil pembelajaran yaitu: kompetensi siswa, kemandirian, dan daya tarik (Wena, 2008)

Kualitas pelaksanaan pembelajaran meliputi beberapa komponen penting yaitu: 1) Organisasi Pembelajaran, yang menyangkut integrasi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan akhir. 2) Pengelolaan kelas yang menyangkut: motivasi siswa, pengelompokan dan peran guru. 3) Kegiatan dalam proses pembelajaran yang meliputi: kualitas kegiatan pendahuluan terutama apersepsi, kualitas pembahasan materi, kualitas pemanfaatan pendekatan dan strategi pembelajaran, kualitas pemanfaatan media pembelajaran, keterlibatan dan interaksi siswa dalam proses pembelajaran, penggunaan bahasa pengantar, dan kualitas akhir pelajaran

Penilaian hasil belajar meliputi tiga hal penting yaitu: 1) kualitas rancangan alat evaluasi untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan belajar peserta didik, 2) kualitas teknik penilaian yang digu-

nakan untuk memantau kemajuan dan hasil belajar siswa dalam mencapai kompetensi, 3) kualitas pemanfaatan berbagai hasil penilaian untuk memberikan umpan balik bagi peserta didik tentang kemajuan belajarnya dan bahan penyusunan rancangan pembelajaran selanjutnya.

Penjaminan mutu pembelajaran sebaiknya dilaksanakan oleh setiap guru melalui suatu siklus yang terdiri dari lima tahap yaitu: 1) penetapan standar mutu pembelajaran, 2) pelaksanaan pembelajaran sesuai standar yang telah ditetapkan, 3) monitoring pelaksanaan pembelajaran sesuai standar oleh kepala sekolah, 4. Evaluasi diri oleh guru terkait dengan kualitas pembelajaran dan audit eksternal oleh kepala sekolah atau pengawas, 5.perbaikan mutu.

Siklus penjaminan mutu pembelajaran dapat digambarkan seperti di bawah ini

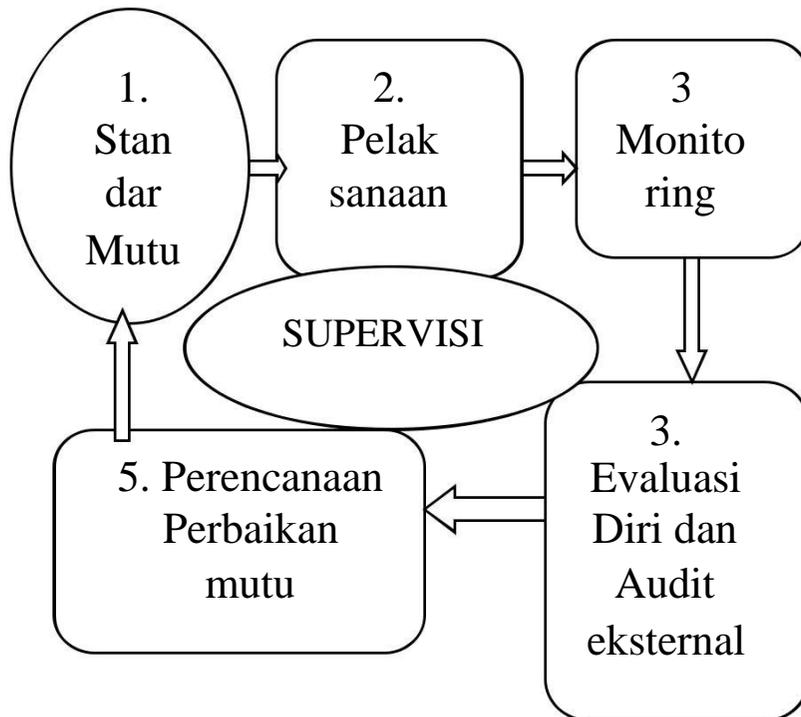


Diagram di atas dapat dijelaskan seperti di bawah ini:

1. Penetapan Standar Pembelajaran

Langkah awal penjaminan mutu adalah kegiatan sekolah terutama guru mata pelajaran menetapkan standar mutu pelajaran. Standar mutu mata pelajaran minimal harus sesuai dengan standar Nasional. Ini berarti standar mutu pembelajaran dapat lebih tinggi dari standar nasional jika standar nasional telah terpenuhi. Standar mutu pembelajaran harus meliputi semua komponen pembelajaran yakni rencana pembelajaran, kegiatan pembelajaran, hasil belajar dan penilaian

2. Pelaksanaan Standar Pembelajaran

Langkah selanjutnya adalah penerapan pembelajaran sesuai standar nasional. Untuk itu setiap guru harus memahami standar dan mengembangkan perencanaan pembelajaran, melaksanakan kegiatan tatap muka dan menilai hasil belajar siswa sesuai standar.

3. Pemantauan (Monitoring)

Selama pelaksanaan pembelajaran yang telah berlangsung kepala sekolah (dibantu oleh guru

senior) melakukan pemantauan (monitoring) terhadap pelaksanaan pembelajaran untuk meyakinkan bahwa guru telah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian penyimpangan dapat dihindari sedini mungkin.

4) Evaluasi Diri

Langkah ke empat adalah evaluasi diri. Guru melakukan penilaian terhadap kualitas kerjanya. Penilaian diri antara lain dapat dilakukan dengan menilai mengkaji RPP, menilai proses pembelajaran dan menilaia proses penilaian dan hasil belajar siswa.

Sering kali seorang guru mengalami kesulitan dalam menilai diri sendiri, walaupun telah disediakan format penilaian diri. Untuk itu ia dapat meminta bantuan teman sejawat atau kepala sekolah atau pengawas untuk melakukan penilaian.

Ada tiga hal penting yang harus dimiliki oleh guru agar mampu melakukan evaluasi diri yaitu: 1 pemahaman tentang standar kualitas pembelajaran, 2.kemampuan untuk menemukan kelemahan dan kekuatan diri sendiri 3. Kejujuran dan keterbukaan terhadap kelemahan diri atau masalah yang bersumber dari diri sendiri

Disamping penilaian diri yang dilakukan oleh guru sendiri, penilaian terhadap kualitas pembelajaran sebaiknya juga dilakukan oleh pihak eksternal, (audit eksternal) yakni kepala sekolah atau pengawas. Dengan demikian akan ada pembandingan antara hasil penilaian diri dengan hasil penilaian pihak lain. Dengan demikian penilaian akan lebih objektif.

Penilaian diri dan *audit eksternal* tidak hanya menghasilkan data tentang kelemahan dan kekuatan pembelajaran tetapi yang paling penting adalah rumusan rekomendasi. Rekomendasi harus berdasarkan kekuatan, kelemahan dan penyebab kelemahan dalam pembelajaran yang telah dilakukan.

Dalam merumuskan rekomendasi guru harus berusaha mencari solusi terhadap masalah yang telah terjadi. Masalah yang muncul pada satu aspek pembelajaran dapat disebabkan oleh aspek lain. Misalnya Rendahnya sikap ingin tahu siswa dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas bahan ajar, sumber belajar dan alat atau media pembelajaran. Oleh karena itu dalam merumuskan rekomendasi guru harus melakukan kajian yang mendalam. Untuk itu harus mendapatkan pengetahuan antara lain dengan: membaca referensi yang terkait dengan pembelajaran berdiskusi sesama guru, berkonsultasi dengan pihak luar sekolah seperti: dosen, pengawas dan widyaiswara.

5.Rencana Perbaikan

Langkah selanjutnya adalah merumuskan rencana perbaikan pembelajaran. Jika kualitas pembelajaran masih di bawah standar, maka rumusaan perbaikan harus mengacu kepada usaha mencapai standar yang telah ditetapkan. Jika kualitas pembelajaran telah mencapai standar, maka guru yang bersangkutan harus meningkatkan standar yang lebih tinggi dari standar nasional dengan menambah ketentuan yang telah berlaku, antara laian: mengembangkan standar RPP, menetapkan standar model pembelajaran, meningkatkan standar bahan ajar, standar media pembelajaran dan standar penilaian. Misalnya Jika dalam standar proses telah ditetapkan bahwa kegiatan inti harus memuat kegiatan "siswa melakukan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi", maka guru dapat mengembangkan standar menjadi: siswa melakukan ekplorasi, elaborasi dan konfirmasi, serta mengembangkan sikap ilmiah.

Itulah siklus pertama dalam penjaminan mutu pembelajaran. Siklus selanjutnya adalah menetapkan standar, melakukan langkah-langkah yang sama yaitu: melaksanakan pembelajaran, melakukan monitoring, penilaian diri dan audit eksternal dan perbaikan.

Penjaminan mutu pembelajaran di sekolah kemungkinan akan tidak berjalan mulus. Hal ini tidak terlepas dari pengetahuan, keterampilan dan sikap guru terutama kemauan guru untuk berubah. Oleh karena itu pengelola sekolah yakni kepala sekolah dan pihak eksternal seperti: pengawas dan widyaiswara perlu melakukan "supervisi" terhadap pelaksanaan penjaminan mutu pembelajaran.

Supervisi pembelajaran atau supervisi akademik merupakan bagian dari standar proses yang

harus dilakukan oleh kepala sekolah terkait dengan pembelajaran. Supervisi merupakan bantuan profesional yang dilakukan terhadap kepala sekolah untuk meningkatkan profesionalismenya.

Ada empat hal penting yang harus dilakukan kepala sekolah terkait dengan tugas supervisi yaitu: pemantauan pembelajaran, penilaian kualitas pembelajaran, dan pembinaan terhadap guru.

Dalam penjaminan mutu pembelajaran, kepala sekolah melakukan supervisi terhadap semua tahapan penjaminan mutu pembelajaran, yakni memantau pelaksanaan penjaminan mutu untuk meyakinkan bahwa guru telah melakukan kegiatan penjaminan mutu pembelajaran, menilai kualitas penjaminan mutu untuk menemukan masalah penjaminan mutu, dan membina guru dalam penjaminan mutu pembelajaran agar penjaminan mutu dilakukan secara efektif.

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Penjaminan mutu pembelajaran (PMP) merupakan proses peningkatan mutu pembelajaran yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.
2. Mutu pembelajaran mencakup : perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, dan penilaian proses dan hasil belajar.
3. PMP dilaksanakan dalam bentuk siklus yang terdiri dari empat tahap yaitu: a. penetapan standar, b. pelaksanaan KBM, c. monitoring, d. penilaian diri dan audit eksternal, dan e. perencanaan perbaikan mutu.
4. Pelaksanaan PMP perlu disupervisi oleh kepala sekolah atau pengawas yang meliputi: pemantauan, penilaian dan pembinaan guru. ❖

* *Widyaiswara LPMP Prov. Bali*

** *Majalah Saraswati*

MEMBANGUN PRESTASI PENDIDIKAN, MENUJU BALI SEBAGAI TUJUAN WISATA PENDIDIKAN & SPIRITUAL **

Oleh : **Made Alit Mariana & Putu Ayu Rastiti ***

MASYARAKAT pendidikan di Bali pada Tahun Ajaran 2012/2013 ini patut berbangga hati. Bagaimana tidak, pada pengumuman kelulusan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA tanggal 24 Mei 2013, walaupun diundur pelaksanaannya, nilai tertinggi diraih oleh siswa salah satu sekolah negeri di Bali, yaitu SMAN 4 Denpasar dengan rata-rata nilai 9.87, nyaris mencapai sempurna. Rata-rata nilai ini meningkat jika dibandingkan dengan nilai yang diraih pada tahun 2012 yaitu 9.73 (sumber : analisis data hasil EDS tahun 2012). Prestasi nasional Provinsi Bali yang patut diapresiasi bersama sebagai salah satu indikator perkembangan dunia pendidikan di Bali. Prestasi se-lanjutnya adalah diterimanya alumni SMAN 4 Denpasar Tahun ini di PT yang ternama di dalam negeri dan luar negeri dalam jumlah yang relative besar.

Keberhasilan pendidikan diraih SMAN 4 Denpasar misalnya, tidak terlepas dari kualitas layanan yang dikembangkan dan dilaksanakan pengelola sekolah dan hubungan interaktif yang kon-struktif dengan peserta didik. Di sekolah ini tersedia 24 rombongan belajar (rombel) dengan jumlah siswa pada tahun ajaran 2011/2012 sebanyak 872 siswa. Kenyamanan ruang kelas menjadi salah satu faktor penting dalam kelancaran proses belajar di samping ruangan lainnya seperti laboratorium bahasa, laboratorium kimia, yang bila dirujuk pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah me-menuhi SNP. Kenyamanan tempat terjadinya transaksi edukasi merupakan predictor utama penca-paian peserta didik, disamping faktor yang lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan data hasil pengisian instrumen EDS (Evaluasi Diri Sekolah) yang diisi oleh SMAN 4 Denpasar yang dilaksanakan oleh LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) Provinsi Bali tahun 2012. Bahkan kenyamanan ruang perpustakaan, laboratorium IPA, laboratorium TIK, laboratorium biologi telah melampui SNP, suatu prestasi model interaktif antara *stake holder* dan pelanggan - peserta didik yang patut diacungi jempol.

Kegiatan belajar mengajar dikawal oleh 72 orang tenaga pendidik walaupun 50 orang di antaranya berkualifikasi S1/D4, hanya 31% yang memiliki kualifikasi pendidikan diatas S1/D4. Jumlah PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) ini dinilai telah memenuhi SNP di bidang Standar Pendidik. Dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar sekolah mengembangkan kurikulum berdasarkan acuan pengembangan kurikulum serta kepemilikan silabus yang telah sesuai dengan Standar Isi. Demikian pula halnya dengan "beban belajar" yang diberikan kepada siswa. Guna pengembangan diri peserta

didik, disediakan bimbingan dan konseling serta kegiatan ekstrakurikuler yang disesuaikan dengan minat dan bakat siswa. Peran guru BK menjadi strategis tatkala secara edukatif membimbing kenyamanan belajar peserta didik yang “menyapa” siswa berkreasi mencari solusi setiap permasalahan yang dihadapi dalam mencapai prestasi, sebagai proses kebudayaan.

Pada proses belajar-mengajar guru merencanakan pembelajaran dengan membuat silabus yang berkualitas dan melakukan perencanaan proses pembelajaran bermutu yang mengacu kepada SNP sebagai referensi strategis. Selain merencanakan silabus yang berkualitas juga ketersediaan buku teks, buku panduan, sumber belajar lain serta pemanfaatannya secara maksimal berbagai sumber belajar yang diberdayakan sekolah menjadi faktor pendorong lainnya. Pelaksanaan pembelajaran dimulai dengan pemenuhan persyaratan proses pelaksanaan pembelajaran serta kualitas pembelajaran yang sesuai dengan SNP, mengikuti proses pembelajaran yang berbasis *joyful learning* dan *constructivism* secara profesional. Kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran) dengan *hierarchie* generik pendahuluan, inti, dan penutup dalam rangka pelaksanaan pembelajaran bermutu di sekolah dinikmati peserta didik. Proses pembelajaran yang berbasis pada budaya, mengacu kepada standar isi, dan ... sesuai dengan *learning theory* secara professional, membantu peserta didik membangun pencapaian belajar yang konstruktif dan bermakna (*meaningful learning*).

Proses penilaian untuk memantau penguasaan siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar dan juga upaya memperbaiki kekurangan dan kelemahan dalam proses belajar mengajar, dilaksanakan sebesar-besarnya membantu belajar siswa. Penilaian dilakukan dengan sah, bersifat obyektif, dilakukan secara terpadu, terbuka, dan akuntabel dengan mengikuti teknik-teknik serta mekanisme dan prosedur penilaian. Peserta didik disiapkan untuk menghadapi persoalan belajar dan senantiasa siap diuji oleh instrumen evaluasi dari manapun (*willingness to learn*).

Faktor peserta didik merupakan isu sentral dalam pembelajaran, sebab segala upaya yang dilakukan sekolah dan orang tua, ujung-ujungnya adalah pencapaian siswa. Prestasi belajar yang diraih oleh siswa SMAN 4 Denpasar, tidak terlepas dari kebiasaan para siswa yang terbiasa belajar mandiri dan menggunakan berbagai sumber belajar dan siap menghadapi soal-soal dari berbagai sumber. Semangat mengembangkan diri serta sikap antusias para siswa yang tinggi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi merupakan faktor pendorong siswa untuk meraih prestasi yang lebih. Hal ini terlihat dari prestasi yang ditunjukkan dengan tingkat kelulusan dan rata-rata nilai Ujian Sekolah (US) dan UN yang tinggi. Tidak saja prestasi kelulusan di jenjang SMA, hasil penelusuran sekolah terhadap alumninya, ternyata mampu mengikuti pendidikan secara baik di jenjang selanjutnya. Hal ini memberi isyarat kepada kita, hasil belajar siswa tersebut tidak saja siap menghadapi soal ujian, tetapi memperoleh “kecakapan hidup” sebagai anak bangsa dalam mengembangkan dirinya.

Prestasi yang telah diraih, bukan hanya dipertahankan tetapi juga berusaha ditingkatkan secara berkelanjutan. Karena itulah visi dan misi sekolah disusun sesuai dengan SNP. Selain itu sekolah juga melaksanakan program mutu sekolah dan menyusun program peningkatan mutu tersebut dengan berdasarkan kepada hasil Evaluasi Diri Sekolah, hasil Akreditasi Sekolah dan hasil kelulusan siswa, suatu proses perencanaan program yang berbasis prestasi sebelumnya. Dalam mewujudkan pelaksanaan rencana kerja sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain (aliansi strategis) guna mendukung implementasi dalam mencapai tujuan. Sekolah juga mengadakan evaluasi rencana kerja setiap dua tahun dengan pelaksanaan program supervisi dan evaluasi yang meliputi pemantauan, evaluasi, dan rencana tindak lanjut. Selain itu sekolah juga melakukan evaluasi dan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan secara optimal pada setiap akhir semester, sebagai wujud tanggungjawab edukasi sekolah untuk memberikan pelayanan prima kepada peserta didik.

Pengelolaan sekolah juga perlu didukung oleh pembiayaan yang memadai. Dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan RAKS (Rencana Anggaran

Kegiatan Sekolah) sekolah bekerjasama dengan komite sekolah dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi orangtua siswa. Besaran Standar Biaya Operasi Nonpersonalia dihitung berdasarkan standar biaya persekolah/program keahlian, berdasarkan standar biaya per rombel, biaya per peserta didik. Realisasi besaran pembiayaan selain operasi nonpersonalia ditunjukkan dengan kemudahan dalam mengakses dokumen pengelolaan pembiayaan sekolah. Hanya saja pasca keputusan MK tentang RSBI, perlu dicari rumusan dukungan finansial terhadap sekolah unggulan ini.

Apa yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh SMAN 4 Denpasar mungkin bisa menjadi *role model* bagi sekolah-sekolah lainnya di Bali umumnya dan di Denpasar khususnya dalam rangka membangun prestasi. Sekolah yang lain yang memiliki keunggulan lain dapat juga dijadikan sebagai *role model*, bagi sekolah yang lain dalam mencapai prestasi. Mari kita jadikan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) sebagai subyek untuk berlomba-lomba semua komponen masyarakat, semua institusi dalam membangun program lembaganya. Fenomena SMAN 4 Denpasar seakan bercerita tentang *lascarya* usaha anak manusia, senantiasa memberikan keberhasilan. Adanya program pemerintah yang belum sempurna tidak dijadikan alasan untuk tidak meraih prestasi, tetapi merupakan "vitamin" bagi pencapaian kesempurnaan. Semarak masyarakat Bali untuk tetap mempertahankan bahasa Bali sebagai obyek didik di berbagai jenjang pendidikan dan respon positif yang sangat cepat oleh Pemerintah Provinsi, seakan-akan isyarat positif dan konsensus bersama yang kuat, pendidikan yang berbasis budaya sebagai pilihan penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, pendidikan di Bali patut dan layak sebagai tujuan wisata domestik dan manca Negara untuk berkunjung ke Pulau Dewata ini. Tatkala para pengunjung Pulau Dewata yang hadir telah mentekadkan diri dengan tujuan pendidikan dan berniat memaknai budaya Bali secara positif, masyarakat global secara konstruktif dan berkelanjutan akan bersama menjaga Bali. Smoga!!! ❖

* Widyaiswara LPMP Prov. Bali

** Majalah Saraswati

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DIMULAI DARI KEPUASAN PESERTA DIKLAT : STUDI KASUS LPMP BALI**

Oleh : Ni Wayan Mudiarni*

1. Pendahuluan

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Bali adalah lembaga reposisi dari Balai Penataran Guru (BPG) Denpasar yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0203/O/1978. Secara fisik mulai dibangun tahun 1980. Sejalan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan secara nasional, sesuai bunyi pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu melakukan penjaminan mutu pendidikan agar sesuai dengan standar, norma, kriteria, serta pedoman penyelenggaraan pendidikan nasional, maka Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor 7 Tahun 2007, tanggal 13 Pebruari 2007, menetapkan pendirian LPMP di setiap provinsi sebagai alih fungsi dari BPG. LPMP Bali berlokasi di jalan Letda Tantular, Denpasar. Sebagai upaya untuk mencapai kepuasan peserta diklat LPMP Bali dilengkapi fasilitas pendukung: fisik berupa tanah perkantoran seluas 19.996 M2, bangunan 6630 M2 berupa gedung kantor, ruang pertemuan, dan ruang belajar, asrama, sarana olahaga, taman, dan tempat parkir. Keseluruhan pegawai LPMP Bali 100 orang, terdiri atas 5 orang pejabat struktural, 85 staf, dan 10 fungsional widyaiswara. Sampai saat ini LPMP Bali belum pernah melakukan penelitian tentang kepuasan peserta diklat.

Kepuasan peserta diklat di LPMP Bali dapat mempengaruhi kualitas output diklat di LPMP Bali. Peserta diklat di LPMP Bali meliputi tenaga pendidik dan tenaga penunjang kependidikan yang nantinya setelah kembali kesekolah akan memberikan pelayanan kepada peserta didik di sekolah masing-masing. Output peserta diklat akan sangat mempengaruhi kualitas belajar mengajar di sekolah masing-masing. Kualitas belajar mengajar ini menjadi faktor penentu dalam penjaminan mutu pendidikan di sekolah. Naskah ini menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas belajar mengajar di sekolah, yang dimulai dari kualitas belajar mengajar di lembaga pelaksanaan diklat yaitu LPMP Bali.

Produk yang diberikan oleh lembaga semacam LPMP Bali ini adalah berupa jasa. Jasa merupakan suatu produk yang tidak berbentuk, sehingga susah untuk diukur. Penelitian secara teliti, mendalam dan akurat, yang melibatkan responden yang sudah pernah mengikuti diklat di LPMP sangat penting dilakukan.

2. Penjaminan Mutu Pendidikan

Penjaminan mutu pendidikan bukanlah suatu proses yang stagnan, namun merupakan suatu proses yang selalu berulang setiap suatu periode. Penjaminan mutu pendidikan dimulai dari menentukan target, mengevaluasi, menganalisis, menyusun strategi implementasi kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Dalam proses penjaminan mutu pendidikan ini kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan sebuah modal yang sangat penting. Sumber daya manusia dalam dunia pendidikan menyangkut tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Peningkatan kualitas SDM pendidikan sangat ditentukan oleh sebuah proses yang panjang, dan salah satunya adalah melalui proses pendidikan dan pelatihan (diklat).

Kepuasan peserta diklat dalam melakukan peserta diklat sangat mempengaruhi kualitas output diklat. Output diklat inilah yang nantinya akan melaksanakan proses penjaminan mutu pendidikan di sekolah masing-masing. Dengan demikian faktor-faktor penentu kepuasan peserta diklat sangat penting diidentifikasi oleh LPMP Bali, dan juga lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya, termasuk Universitas Udayana.

3. Definisi dan Kualitas Jasa

Secara tradisional jasa sangat sulit didefinisikan karena keragamannya. Kenyataannya bahwa penciptaan dan mengirimkan jasa kepada pelanggan sangat sulit dipahami, karena banyak masukan dan keluaran yang tidak nyata. Kebanyakan orang tidak terlalu sulit mendefinisikan manufaktur, tetapi mereka sangat sulit mendefinisikan jasa. Menurut Lovelock dan Wright (2007) untuk mendefinisikan jasa ada dua pendekatan yang dapat menangkap esensi dari jasa. (1) Jasa adalah tindakan atau kinerja yang ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain. Walaupun prosesnya mungkin terkait dengan produk fisik, kinerjanya pada dasarnya tidak nyata dan biasanya tidak menghasilkan kepemilikan atas faktor-faktor produksi. (2) Jasa adalah kegiatan ekonomi yang menciptakan dan memberikan manfaat bagi pelanggan pada waktu dan tempat tertentu, sebagai hasil dari tindakan mewujudkan perubahan yang diinginkan dalam diri, atau atas nama, penerima jasa tersebut.

Kualitas jasa suatu perusahaan diuji dalam setiap pertemuan jasa, pelanggan menciptakan harapan-harapan layanan dari pengalaman masa lalu, cerita dari mulut ke mulut dan iklan. Pelanggan juga akan membandingkan jasa yang dipersepsikan dengan jasa yang diharapkan. Parasuraman dkk, dalam Kotler, (2005:122) merumuskan model mutu jasa yang menekankan syarat-syarat utama dalam memberikan mutu jasa yang tinggi yang dikenal dengan istilah *Servqual Dimension* yang terdiri atas 5 dimensi menurut tingkat kepentingannya berikut ini. (1) *Tangibles* (berwujud/ fisik) meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. (2) *Reliability* (keandalan) meliputi kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. (3) *Responsiveness* (daya tanggap) meliputi kemampuan memberi layanan dengan tanggap. (4) *Assurance* (jaminan) meliputi kemampuan yang mencakup pengetahuan dan kemampuan karyawan bebas dari biaya, resiko, dan keragu-raguan. (5) *Empathy* (empati) meliputi kemampuan untuk memahami kebutuhan para konsumen.

4. Kepuasan Peserta Diklat

Beberapa pakar memberikan definisi mengenai kepuasan konsumen, seperti yang diungkapkan Day (dalam Tjiptono, 2006:146) bahwa kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian/*diskonfirmasi* yang dirasakan antara harapan sebelumnya (atau norma kinerja lainnya) dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. Sedangkan menurut Kotler (dalam Tjiptono, 2006:146) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang di rasakan dibandingkan dengan harapannya.

Kepuasan merupakan fungsi dari kesan kinerja dan harapan. Jika kinerja berada dibawah harapan, pelanggan tidak puas (*dissatisfied*), namun jika kinerja memenuhi harapan maka pelanggan puas (*satisfaction*). Kepuasan pelanggan memerlukan keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan (*need and want*) dengan apa yang diberikan. Beberapa perusahaan yang paling berhasil di masa kini sedang meningkatkan harapan dan memberikan kinerja yang memenuhinya. Perusahaan tersebut menuju kepuasan pelanggan total (*total customer satisfaction –TCS*).

Penyediaan fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh LPMP Bali akan mempengaruhi kepuasan peserta diklat. Peserta diklat yang puas akan mengikuti pelatihan dengan baik dan sungguh-sungguh. Kesungguhan peserta diklat akan menyebabkan materi yang diberikan pada saat diklat dapat diserap dengan baik. Baiknya tingkat penyerapan akan mengakibatkan materi tersebut dapat diaplikasikan di sekolah masing-masing.

Analisis faktor-faktor yang menentukan kepuasan peserta diklat di LPMP Bali mempergunakan pendekatan analisis faktor melalui proses analisis seleksi yang telah dilakukan terhadap variabel-variabel *Servqual Dimensions* (*Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Emphaty*) yang tidak menentukan dan mengeluarkannya dari model sehingga dapat ditemukan sejumlah variabel yang benar-benar menentukan. Hasil analisis lebih lanjut hanya 14 variabel dari 22 variabel yang menentukan kepuasan peserta diklat di LPMP Bali dan tergabung ke dalam lima faktor. Kelima faktor tersebut mempunyai kumulatif varian sebesar 66,42%, hal ini berarti kumpulan faktor yang terbentuk menjelaskan variasi semua variabel sebesar 66,42%. Pengaruh tiap tiap faktor terhadap tingkat kepuasan peserta diklat di LPMP Bali berbeda-beda di mana perbedaannya juga terjadi dalam jumlah variabel pada tiap-tiap faktor. Adapun lima faktor yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor satu, diberi nama faktor empati, yang terdiri atas 9 variabel yang terbesar menentukan kepuasan peserta diklat di LPMP Bali. Adapun variabel yang membentuk faktor satu adalah: menjalin hubungan, sikap panitia, pengetahuan peralatan, memberi perhatian, kemampuan memadai, informasi jelas, kesiapan pegawai, perhatian personal dan kesopanan, serta keramahan.
2. Faktor dua diberi nama faktor jaminan, terdiri atas satu variabel yaitu variabel kesopanan. Faktor dua merupakan faktor terbesar kedua yang menentukan kepuasan peserta diklat di LPMP Bali.
3. Faktor tiga diberi nama faktor keandalan dengan variabel pembentuknya yaitu variabel jadwal diklat. Faktor tiga merupakan faktor terbesar ketiga yang menentukan kepuasan peserta diklat di LPMP Bali.
4. Faktor empat diberi nama faktor bukti langsung dengan variabel yang membentuknya adalah variabel penampilan widyaiswara dan penanganan masalah. Faktor empat merupakan faktor terbesar keempat yang menentukan kepuasan peserta diklat di LPMP Bali.
5. Faktor lima diberi nama faktor daya tanggap dengan variabel pembentuknya adalah variabel paket materi diklat. Faktor lima merupakan faktor terbesar kelima yang menentukan kepuasan peserta diklat di LPMP Bali.

5. Penutup

Faktor empati merupakan faktor yang paling menentukan kepuasan peserta diklat di LPMP Bali, maka LPMP Bali harus dapat meningkatkan daya tanggap yang diberikan kepada seluruh peserta diklat. Dengan demikian LPMP Bali dapat dibantu dalam rangka peningkatan layanan fasilitasi dan dapat mengurangi keluhan para peserta diklat.

Peningkatan kepuasan peserta diklat akan memberi dampak pada meningkatnya kualitas output peserta diklat di LPMP Bali. Meningkatnya kualitas output diklat LPMP Bali, akan penjaminan mutu pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik. Kepuasan peserta diklat adalah cikal bakal terpenuhinya penjaminan mutu pendidikan di lembaga pendidikan atau sekolah. ❖

* Widyaiswara LPMP Prov. Bali

** Majalah Saraswati

DAFTAR PUSTAKA

- Andaleeb, Syed Saad dan Carolyn Conway. (2007). *The Journal Of Service Marketing*. Customer Satisfaction in the restaurant industri: an examination of transaction-specific model.
- Anonim. 2008. *Profil Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Bali*. Denpasar : LPMP Bali.
- Anonim. 2009. *Standar Operasional Prosedur Diklat*. Jakarta : Direktorat PMPTK.
- Kotler, Philip. 2005. *Manajemen Pemasaran*. Edisi Keduabelas, Jilid 1. Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Lovelock, C.H., Lauren K. Wright. 2007. *Manajemen Pemasaran Jasa, Cetakan II Indonesia*: PT Macanan Jaya Cemerlang.
- Malhotra, Naresh K. 2005. *Riset Pemasaran, Pendekatan Terapan*. Jilid 1, Edisi Bahasa Indonesia (Soleh Rusyadi Mariam, Pentj). Jakarta : PT. Indeks.
- Tjiptono. 2006. *Manajemen Jasa*. Yogyakarta : Andi Offset
- Umar. Husein. 2002. *Metodologi Penelitian; Aplikasi dalam Pemasaran, dilengkapi dengan 8 bahasan komprehensif kasus pemasaran*. cetakan ketiga. Jakarta : PT. Gramedia Pusaka Utama.

Sumber Dokumen :

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007, Tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/O/2003, tanggal 4 Juli 2003, Tentang penetapan LPMP Ditjen Dikdasmen, merupakan restrukturisasi dari Balai Penataran Guru (BPG)
- Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003, Tentang sistim Pendidikan Nasional

DISCREPANCY MODEL SEBAGAI ALTERNATIF MODEL PENJAMINAN MUTU PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TEMATIK TERPADU BERBASIS PENDEKATAN SAINTIFIK DI SEKOLAH DASAR**

Oleh : I Wayan Surata*

A. PENDAHULUAN

Pembelajaran tematik terpadu betul-betul berbeda dengan tematik biasa. Betapa tidak, guru dalam pembelajaran tematik terpadu tidak lagi menyebut nama mata pelajaran. Guru bukan mengajarkan mata pelajaran, melainkan membelajarkan kehidupan. Dalam pembelajaran tematik terpadu, para siswa tidak lagi terkotak-kotak dalam mata pelajaran. Para siswa tidak terasa kalau sedang belajar matematika, bahasa Indonesia, PPKn, Seni budaya dan prakarya dan lainnya, karena guru sama sekali tidak menyinggung nama mata pelajaran. Yang diajarkan guru adalah kehidupan. Mela-lui belajar kehidupan para siswa dapat memaknai pemanfaatan ilmu yang sedang dipelajari dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Ibaratnya, pembelajaran tematik terpadu seperti es *juice*. Para siswa betul-betul tidak merasakan salah satu rasa buah. Yang dirasakan adalah es *juice* yang rasan-ya *cool*, segar, *maknyos*, *jos gandhos kotos-kotos* (<http://wildanrahmatullah.com/2013>). Dengan pendekatan saintifik (*scientific approach*), guru dapat melatih keterampilan mengamati (*observ-ing*), menanya (*questioning*), menalar (*associating*), mencoba (*experimenting*), membentuk jejaring (*networking*) melalui sumber daya pendidikan yang ada. Tidak tergantung alat yang canggih, tidak tergantung sekolah kota/metropolitan. Yang penting bagaimana para siswa memiliki keterampilan-keterampilan saintifik tersebut.

Penerapan kurikulum tematik terpadu membutuhkan kesiapan pemangku kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Venville (2009:4) mengidentifikasi hambatan dalam penerapan kurikulum tematik integratif yaitu: faktor guru yaitu pengetahuan dan kualifi kasi materi pelajaran/*subject matter*, pengetahuan isi pedagogical, kepercayaan tentang dan pengalaman sekolah, sebagaimana praktik pembelajaran selama ini; dan faktor kontekstual yaitu kebijakan administratif, panduan kurikulum, proses penilaian dan pelaporan, dan tradisi sekolah. Kesuksesan penerapan pembelajaran tematik terpadu ditentukan oleh kesiapan dalam mengelim-inir hambatan tersebut.

Langkah dalam mengelimir hambatan dari faktor guru secara umum dilakukan dengan menyusun program peningkatan kompetensi secara terstruktur. Pendidikan dan pelatihan bagi guru menjadi penting maknanya. Pelatihan implementasi kurikulum 2013 sudah dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Bali selama 5 hari. Bagi guru kelas se-kolah dasar dibekali pembelajaran tematik terpadu berbasis pendekatan saintifik mulai dari filosofi, pembuatan rancangan pembelajaran, dan praktek pembelajaran. Kegiatan ini dimaksudkan mem-berikan pembekalan seoptimal mungkin pembelajaran tematik terpadu berbasis pendekatan sain-

tifik agar mampu mengimplementasi dan mengimbaskan pada sekolah masing-masing.

Dalam upaya menjamin bahwa implementasi kurikulum 2013 terutama terkait dengan implementasi pembelajaran tematik terpadu berbasis pendekatan saintifik berjalan sesuai dengan pedoman, maka perlu dilakukan penjaminan mutu dalam implementasinya. Salah satu model penjaminan mutu yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan *discrepancy model*, yakni evaluasi terhadap tingkat kesesuaian antara standar yang sudah ditentukan dalam program dengan penampilan aktual dari program tersebut (Marhaeni, 2007: 58). Artinya, mencari kesenjangan antara kondisi ideal pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu berbasis pendekatan saintifik dengan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Melalui analisis kesenjangan ini dapat diketahui kelemahan dan kelebihan implemetasi pembelajaran tematik terpadu berbasis pendekatan saintifik. Dengan diketahui kelemahan dan kelebihan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Bali dapat melakukan pendampingan/fasilitasi berbasis data.

B. PEMBAHASAN

1. Pembelajaran Tematik Terpadu di Sekolah Dasar

Proses pembelajaran untuk jenjang Sekolah Dasar atau yang sederajat menggunakan pendekatan pendekatan tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu (PTP) atau *integrated thematic instruction (ITI)* dikembangkan pertama kali pada awal tahun 1970-an. Belakangan PTP diyakini sebagai salah satu model pembelajaran yang efektif (*highly effective teaching model*), karena mampu mawadahi dan menyentuh secara terpadu dimensi emosi, fisik, dan akademik di dalam kelas atau di lingkungan sekolah. Model PTP ini pun sudah terbukti secara empirik berhasil memacu percepatan dan meningkatkan kapasitas memori peserta didik (*enhance learning and increase long-term memory capabilities of learners*) untuk waktu yang panjang.

Pembelajaran tematik terpadu yang sering juga disebut sebagai pembelajaran tematik terintegrasi (*integrated thematic instruction, ITI*) aslinya dikonseptualisasikan tahun 1970-an. Pendekatan pembelajaran ini awalnya dikembangkan untuk anak-anak berbakat dan bertalenta (*gifted and talented*), anak-anak yang cerdas, program perluasan belajar, dan peserta didik yang belajar cepat. Premis utama PTP bahwa peserta didik memerlukan peluang-peluang tambahan (*additional opportunities*) untuk menggunakan talentanya, menyediakan waktu bersama yang lain untuk secara cepat mengkonseptualisasi dan mensintesis. Pada sisi lain, model PTP relevan untuk mengakomodasi perbedaan-perbedaan kualitatif lingkungan belajar. Model PTP diharapkan mampu menginspirasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar. Model PTP memiliki perbedaan kualitatif (*qualitatively different*) dengan model pembelajaran lain, karena sifatnya memandu peserta didik mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi (*higher levels of thinking*) atau keterampilan berpikir dengan mengoptimasi kecerdasan ganda (*multiple thinking skills*), sebuah proses inovatif bagi pengembangan dimensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan.

2. Pendekatan **Scientific**

Pendekatan *scientific* dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah dari guru. Oleh karena itu kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta diarahkan untuk mendorong peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan diberi tahu. Kondisi pembelajaran diarahkan agar peserta didik mampu merumuskan masalah (dengan banyak menanya), bukan hanya menyelesaikan masalah dengan menjawab saja. Pembelajaran diharapkan diarahkan untuk melatih berpikir analitis (peserta didik diajarkan bagaimana mengambil keputusan) bukan berpikir mekanistik (rutin dengan hanya mendengarkan dan menghafal semata)

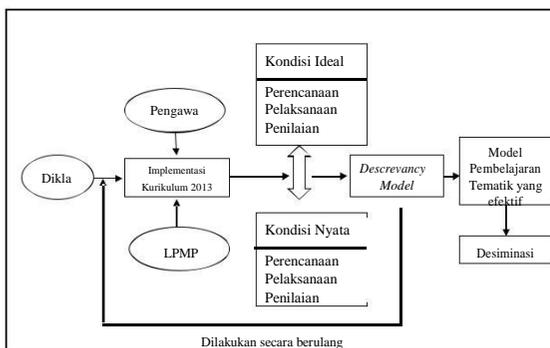
Menurut Sudarwan (2013) pendekatan *scientific* menonjolkan dimensi pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu kebenaran. Dengan demikian, proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan dipandu nilai-nilai, prinsip-prinsip, atau kriteria ilmiah. Proses pembelajaran disebut ilmiah jika memenuhi kriteria: (1) substansi atau materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu; bukan sebatas kira-kira, khayalan, legenda, atau dongeng semata, (2) penjelasan guru, respon peserta didik, dan interaksi edukatif guru-peserta didik terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis, (3) mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan substansi atau materi pembelajaran., (4) mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari substansi atau materi pembelajaran, (5) mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon substansi atau materi pembelajaran, (6) berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggung jawabkan, dan (7) tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun menarik sistem penyajiannya.

Pembelajaran yang menekankan pada pentingnya kolaborasi dan kerjasama diantara peserta didik dalam menyelesaikan setiap permasalahan dalam pembelajaran. Oleh karena itu guru sedapat mungkin menciptakan pembelajaran selain dengan tetap mengacu pada Standar Proses dimana pembelajarannya diciptakan suasana yang memuat eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi, juga dengan mengedepankan kondisi peserta didik yang berperilaku ilmiah dengan bersama-sama diajak mengamati, menanya, menalar, merumuskan, menyimpulkan dan mengkomunikasi. Sehingga peserta didik akan dapat dengan benar menguasai materi yang dipelajari dengan baik.

3. Model Penjaminan Mutu dengan *Discrepancy Model*

Pengukuran efektivitas program dapat dilakukan dengan cara membandingkan dua hal yang terletak pada ujung program, yakni pada permulaan dan akhir pelaksanaan program, atau sebelum dan sesudah program dilaksanakan. Penilaian tentang kesenjangan dapat dilakukan terhadap berbagai elemen program. Ada enam kategori kesenjangan yang dapat dinilai dalam program pendidikan, yakni: (1) kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan program, (2) kesenjangan antara yang diduga atau diramalkan dengan hasil yang diperoleh, (3) kesenjangan antara status kemampuan siswa yang ada dengan standar kemampuan yang sudah ditentukan (*needs assessment*), (4) kesenjangan tujuan, (5) kesenjangan mengenai bagian program yang dapat diubah, dan (6) kesenjangan dalam sistem yang tidak konsisten. Evaluasi terhadap kesenjangan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara standar yang sudah ditentukan dalam program dengan penampilan aktual dari program tersebut (Marhaeni, 2007:58). Berdasarkan uraian di atas dapat dibuat model penjaminan mutu pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu berbasis pendekatan saintifik seperti gambar berikut.

Gambar 1. Model Penjaminan Mutu Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Terpadu Berbasis Pendekatan Saintifik dengan *Discrepancy Model*



Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa setelah diklat peserta mengimplemen-tasikan pembelajaran tematik terpadu berbasis pendekatan saintifik didampingi oleh pengawas dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali. Dalam proses pendampingan LPMP mengadakan evaluasi secara mendalam tentang perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran tematik dengan membandingkan antara kondisi ideal dan kondisi nyata (*discrepancy model*). Hasil evaluasi ini kemudian dianalisis, hasil analisis dipakai acuan dalam pendampingan selanjutnya. Proses tersebut dilakukan secara terus menerus sehingga akhirnya diperoleh model pembelajaran tematik terpadu berbasis pendekatan saintifik yang efektif. Model ini kemudian didesiminasikan kepada semua sekolah yang ada di provinsi Bali. Dengan adanya model penjaminan mutu seperti di atas diharapkan dapat dijadikan model bagi LPMP lain dalam melaksanakan penjaminan mutu pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu berbasis pendekatan saintifik di sekolah dasar.

C. PENUTUP

Model penjaminan mutu dengan *discrepancy model* pada intinya adalah proses yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali dalam upaya menjamin bahwa pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu berbasis pendekatan saintifik berjalan sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan melalui analisis secara mendalam dan rinci antara kondisi ideal dengan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Berdasarkan analisis ini akan diperoleh data yang sangat penting dalam rangka melaksanakan pendampingan sehingga akhirnya diperoleh model pembelajaran yang efektif. Untuk menyakinkan model seperti yang digambarkan di atas efektif, perlu dilakukan uji coba model tersebut dengan melibatkan LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota/Guru inti, dan Perguruan Tinggi (LPTK). ❖

* Widyaiswara LPMP Prov. Bali

** Majalah Saraswati

DAFTAR RUJUKAN

- <http://wildanrahmatullah.com/2013/07/14/pembelajaran-tematik-terpadu-seperti-es-juice/>
Marhaeni, A.A.I.N. 2007. *Evaluasi Program Pendidikan*. Singaraja: Undiksha.
Shelly Frei. 2008. *Teaching Mathematics Today*. Huntington Beach, CA 92649-1030: Shell Education
Sudarwan, 2013. "Pendekatan-pendekatan Ilmiah dalam Pembelajaran". *Makalah pada Workshop Kurikulum*. Jakarta.

INTEGRASI PEMBELAJARAN IPS DAN IPA DENGAN BAHASA INDONESIA DI SEKOLAH DASAR **

oleh: Ni Wayan Murki*

I. Pendahuluan

Pembelajaran merupakan usaha memberdayakan potensi siswa untuk belajar. Dalam proses pembelajaran guru tidak hanya memberikan informasi kepada siswa tetapi juga melatih siswa belajar sehingga mampu belajar secara mandiri dan mendorong siswa agar tertarik untuk belajar. Untuk itu, guru harus berusaha mencari upaya membuat siswa belajar berbagai strategi yang relevan dengan pendekatan sesuai dengan kompetensi yang ingin dikembangkan.

Terkait dengan perubahan kurikulum terutama di SD, adanya integrasi mata pelajaran bahasa Indonesia dengan IPA dan IPS banyak dipertanyakan oleh para guru SD. Mereka meragukan hasil belajar bahasa Indonesia jika diintegrasikan dengan IPA dan IPS. Untuk menjawab ke ragu-raguan tersebut, penulis mencoba menguraikan secara singkat strategi pembelajaran yang dapat dikembangkan untuk mengintegrasikan pelajaran bahasa Indonesia dengan IPS dan IPA yakni melalui pendekatan komunikatif dan ilmiah

II. Pembahasan

A. Apa itu pendekatan komunikatif

Pendekatan Komunikatif umumnya digunakan dalam pengembangan kemampuan siswa berbahasa. Pendekatan ini berpandangan bahwa pembelajaran bahasa bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa berkomunikasi melalui kegiatan berkomunikasi. Pendekatan ini menitik-beratkan pada penguasaan makna bahasa untuk berkomunikasi melalui berbagai kegiatan yang memiliki nuansa komunikasi, yakni menyimak makna, berbicara untuk mengungkapkan makna secara lisan, membaca untuk mencari informasi tertulis, dan menulis untuk mengungkapkan makna secara tertulis. Makna dapat berarti tujuan komunikasi, fungsi atau arti ujaran. Pada dasarnya dalam berkomunikasi setiap orang berpikir tentang makna suatu ujaran atau teks yang didengar-kan, dikatakan, dibaca dan ditulis.

Dalam proses pembelajaran bahasa, guru menyampaikan pelajaran dengan berbagai kegiatan yang bernuansa komunikasi. Demikian juga halnya para siswa belajar melalui berbagai kegiatan komunikasi. Misalnya: mendengarkan dialog, berdiskusi, membaca teks, menulis gagasan, dsb.

Proses pembelajaran akan lebih komunikatif apabila: 1) Bahasa diajarkan secara integratif. Artinya, Satu skill (keterampilan berbahasa) diintegrasikan dengan skill yang lain, dan melibatkan pengembangan komponen bahasa (seperti, kosa-kata dan tata bahasa). Oleh karena itu pendekatan komunikatif sering disebut pendekatan integratif 2) Pembelajaran komponen bahasa (tata-bahasa dan kosa kata) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi, dan diintegrasikan dengan kegiatan berkomunikasi. 3) Pembelajaran dipayungi oleh konteks (seperti tema, atau topik). Artinya, berkomunikasi sesuai dengan konteks, makna kata, frasa atau kalimat diajarkan sesuai dengan kontek. 4) Pembelajaran dikaitkan atau diintegrasikan dengan pengetahuan lain dan pengalaman siswa.

Ada beberapa **ciri penting pendekatan** kebermaknaan antara lain: 1) Situasi belajar tidak menegangkan. 2) Pembelajaran berdasarkan konteks (tema/ topik). 3) Siswa belajar dengan



mengerjakan tugas (task based). 4) Materi pelajaran bersifat kontekstual dan dikaitkan dengan mata pelajaran lain. 5) Lebih menekankan makna dari pada bentuk. 6) Pembelajaran berpusat pada siswa. 7) Guru menggunakan teknik yang bervariasi. 8) Siswa belajar dengan berkomunikasi dari sejak awal. 9) Pengetahuan bahasa (kosa kata dan tata-tata bahasa) diperoleh melalui kegiatan berkomunikasi 10) Pembelajaran tata-bahasa dan kosa kata harus dipadukan dengan pembelajaran keterampilan berbahasa.

B. Manfaat Integrasi Bahasa dengan

IPS dan IPA

Di atas telah dijelaskan bahwa tujuan pembelajaran bahasa adalah untuk berkomunikasi. Kenyataan menunjukkan bahwa kita akan mampu berkomunikasi jika menguasai bahasa dan ilmu atau pengetahuan yang dikomunikasikan. Misalnya seorang mahasiswa kedokteran sangat sulit memahami teks dalam bahasa Inggris jika ia tidak mengerti bahasa Inggris. Demikian pula halnya dengan sarjana bahasa Inggris. Ia tidak akan mampu menerjemahkan ilmu kedokteran yang ditulis dalam bahasa Inggris jika ia tidak memiliki pengetahuan tentang kedokteran.

Dengan Integrasi pelajaran bahasa Indonesia dengan IPA/ IPS pembelajaran bahasa Indonesia akan lebih kontekstual dan bermakna. Pembelajaran bahasa sebaiknya dipayungi oleh konteks yang terkait dengan kehidupan. Dengan demikian kegiatan belajar bahasa Indonesia melatih siswa memahami IPS dan IPA serta mampu mengkomunikasikan pengetahuan tersebut secara efektif dan komunikatif.

Pembelajaran IPS dan IPA akan dapat dilakukan dengan baik jika siswa memiliki keterampilan berkomunikasi. Oleh karena itu pembelajaran IPS dan IPA meliputi kegiatan memahami dan menyampaikan informasi.

III . Strategi EKPLU

A.Pengertian

Strategi EKPLU adalah singkatan dari Ekplorasi, Kajian , Pengelolaan Laporan dan Umpan Balik . Strategi ini merupakan penerapan standar proses dan pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa, serta mengintegrasikannya dengan mata pelajaran IPS dan IPA. Ekplorasi adalah kegiatan siswa menggali informasi melalui kegiatan berkomunikasi yang bersifat *receptive* seperti: mengamati, membaca atau mendengarkan. Kajian adalah kegiatan membahas informasi dan materi pelajaran ditinjau dari segi bahasa. Pengelolaan adalah kegiatan pembahasan dan pengembangan pengetahuan yang dimuat dalam materi pelajaran, yakni pengetahuan IPA dan atau IPS. Laporan adalah kegiatan siswa menyampaikan hasil pengelolaan. Umpan Balik adalah tanggapan dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh guru.

B.Tahapan Pembelajaran EKPLU

Pembelajaran EKPLU dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut yang sistematis dan terintegrasi . Tahapan yang satu menjadi dasar dari pendekatan berikutnya. Secara umum pembelajaran terdiri dari tiga bagian: bagian pendahuluan, bagian inti dan bagian akhir.

Bagian pendahuluan terdiri dari tiga kegiatan yaitu: penyampaian topik atau tema, penyampaian tujuan pembelajaran dan pembangkitan pengetahuan awal siswa. Topik pelajaran harus terkait dengan kehidupan yang memuat pengetahuan IPA dan IPS. Tujuan pembelajaran harus menggambarkan hasil belajar bahasa Indonesia dan pengetahuan IPA dan IPS, serta proses belajar.

Bagian inti terdiri dari lima kegiatan seperti yang diuraikan di atas. Tahapan kegiatan dilakukan secara terstruktur dan integratif sebagai berikut: Tahapan **pertama** adalah ekplorasi. Pada tahapan ini siswa dilatih menemukan informasi pada teks yang tertulis atau lisan yang memuat materi IPS atau IPA atau ke duanya. Minimal ada tiga keterampilan berbahasa yang dikembangkan yaitu; skimming, scanning dan infering. Dengan demikian siswa memiliki keterampilan menemukan informasi.

Tahapan *ke-dua* adalah **Kajian**. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih siswa berpikir kritis. Siswa dapat diberikan tugas mengkaji pengetahuan bahasa (kosa kata dan tata bahasa), termasuk ejaan. Kegiatan kajian harus disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran bahasa dan kondisi dan karakteristik siswa. Fokus kajian harus sesuai dengan *skill* yang ingin dikembangkan (berbicara atau menulis). Jika *skill* yang dikembangkan adalah berbicara, maka tugas kajian adalah tentang ungkapan dalam berbicara. Jika *skill* yang dikembangkan adalah menulis, maka kajian berfokus pada tata cara menulis misalnya ejaan, tata bahasa, koherensi, pengembangan paragraf, dsb.

Tahapan ke tiga adalah umpan balik. Siswa menunjukkan hasil kajian, sedangkan guru memberikan umpan balik dan penjelasan tambahan bila diperlukan. Hal ini perlu diberikan agar siswa memiliki gambaran yang lebih jelas tentang pengetahuan bahasa yang yang baru dikaji

Tahapan ke empat adalah pengelolaan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemaha-man tentang informasi (pengetahuan IPS atau IPA) dengan mengerjakan tugas-tugas yang terkait dengan pengembangan dan penerapan pengetahuan IPA dan IPS dalam kehidupan. Pada tahapan ini siswa dilatih berdiskusi dan menulis.

Tahapan ke lima adalah laporan. Tahapan ini bertujuan agar siswa dilatih berkomunikasi secara lisan dengan menyajikan hasil kajian secara lisan. Laporan dapat dilakukan dengan teknik *market places* yang diawali dengan menulis laporan pada kertas koran dan dipajangkan di tembok. Setiap kelompok menempelkan laporan di tembok. Dua orang anggota kelompok berdiri di samping pajangan untuk memberikan penjelasan kepada anggota lain. Anggota kelompok lain yang berkunjung mendengarkan penjelasan dan memberikan pertanyaan dan mencatat penjelasan. Catatan yang telah dibuat dirangkum dan dilaporkan kepada guru

Tahapan ke enam adalah umpan balik. Tahapan ini bertujuan untuk memantapkan pemahaman tentang pengetahuan IPA dan IPS yang dapat diimplentasikan dalam kehidupan. Umpan balik dapat dilakukan melalui tanya jawab dan penjelasan singkat oleh guru

Bagian akhir pelajaran adalah simpulan, refleksi dan tugas lanjutan. Simpulan sedapat mungkin dilakukan oleh siswa tentang materi IPA dan IPS yang telah dibahas. Refleksi dilakukan dengan meninjau kembali pengalaman belajar, termasuk kesulitan belajar. Tugas lanjutan sedapat mungkin terkait dengan materi IPS dan IPA. Siswa diharapkan mengembangkan pengetahuan IPS dan IPA dan mempraktekkan kemampuan menulis.

III. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Pendekatan komunikatif sangat tepat Diimplentasikan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia khusus nya di Sekolah Dasar.
2. Penerapan Pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa sangat tepat dikaitkan dengan IPS / IPS karena pendekatan ini bersifat integratif.
3. Salah satu strategi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SD adalah Strategi EKPLU, yang memuat kegiatan eksplorasi, kajian, pengelolaan, laporan dan umpan balik.

* *Widyaiswara LPMP Prov. Bali*

** *Majalah Saraswati*

Daftar Pustaka

1. 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 41 tahun 2007. Tentang Standar proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan menengah
2. Padmadewi Ni Nyoman, 1997. *Methods f Teaching English for Children and Their Applica-tions in the Classrrom.*
3. Richard Jack C, *Approach and Methods in Language teaching.* Cambridge. Cambridge Univer-sity Press
4. Sanjaya Wina. 2009. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses. Jakarta. Kencana
5. Trinato. 2007. Model-Model Pembelajaran berorientasi Konstruktivistik. Prestasi Pustaka
6. Wena Made. 2009. Strategi Pembelajaran Inovatif Kontenporer. Jakarta. Bumi Aksara

IDIOM ESTETIKA DALAM PENDIDIKAN POSTMODERNISME **

Oleh: **I Made Suastana***

ESTETIKA modernisme merupakan pencapaian atau keberhasilan suatu gubahan estetik di-tentukan oleh kemampuan perilaku manusia dalam memadukan segala unsur visual dalam satu komposisi. Komposisi, dengan demikian, adalah suatu kesatuan yang utuh. Estetika modernisme membangun prinsipnya sendiri dari susunan unsur-unsurnya secara otonom, oleh karena itu, estetika modernisme juga disebut dengan estetika formalis. Estetika modernisme memutuskan diri dengan segala tradisi, kode sosial, kode etika, dan kode agama, agar ia dapat otonom. Pendidikan menengah merupakan bentuk aplikasi estetika yang dibangun dalam ke-masan secara komprehensif dari berbagai disiplin ilmu. Dengan demikian berbagai corak akan terbangun di dalamnya. Perubahan waktu dan perkembangan zaman membawa perubahan terha-dap tatanan perilaku dalam pendidikan. Pendidikan menengah yang dimaksud adalah pendidikan yang dilaksanakan setelah tamat SMP. Berbagai fenomena pendidikan kita sangat tampak dalam praktek penyelenggaraan dan kebijaksanaan pendidikan kita. Pendidikan kita telah gagal melahirkan perilaku tamatam yang berbudaya. Kebesaran teknologi menjadikan menara gading yang dikejar sepanjang waktu, yang tidak disadari kita kehilangan jati diri yang sebenarnya. Dengan demikian pendidikan kita tanpa fondasi yang kuat.

Dalam praktek dan pelaksanaan, pendidikan sering menjadi kepentingan politik dan hege-moni terhadap pihak lain. Pendidikan sering terseret dalam kepentingan ideologi dan politik. Dengan kasus seperti itu, berbagai kalangan pendidikan mengecam, seperti Paulo Freire (1999) Ivan Illich (1982) Pendidikan semestinya ditempatkan dalam sesuatu komposisi yang netral secara bajik. Ivan juga mengatakan pendidikan kita sudah mati, pendidikan kita menindas (*oppression*). Pendidikan semestinya dapat memainkan peran yang positif sebagai sebuah aksi kultural dan tranformasi sosial yang kemudian melahirkan pendidikan yang membebaskan. Masalah pendidi-kan memerlukan penataan yang akurat dan terencana. Sebuah proses memanusiakan manusia dan sebuah investasi jangka panjang. Freire (1986:6) membagi kesadaran manusia menjadi tiga. Kesadaran yang pertama adalah kesadaran magis, sebuah kesadaran yang tidak mampu membe-dakan antara faktor satu dengan faktor lainnya. Kedua kesadaran naif, menjadi manusia sebagai penyebab masalah. Konteks masyarakat tidak mempertanyakan lagi mana yang benar dan mana yang salah Masyarakat pendidikan siap memasuki sistem yang sudah ada. Ketiga kesadaran kritis. Masyarakat diharapkan mampu mengkritisi ketimpangan yang ada, secara dogmatis menerima apa yang terjadi.

Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bentuk kebijakan

bab II pasal 3 dijelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pergeseran nilai dan sikap bangsa kita telah terjadi dan seakan sulit dibendung, hal ini disebabkan derasnya arus informasi yang cepat tanpa batas. Kita tidak menutup kemungkinan pengaruh negatif yang ditimbulkan karena adanya informasi dan perkembangan teknologi yang cepat tanpa batas tersebut, terutama pada perkembangan kehidupan remaja pada umumnya dan siswa di sekolah pada khususnya seperti: (1) banyak terungkap adanya gejala kenakalan remaja yang semakin kompleks seperti menurunnya tata krama dan etika siswa terhadap gurunya di seko-lah, penyalahgunaan obat-obat terlarang, hubungan seks pranikah, pencurian dan lain-lainnya; (2) Sikap dan perilaku manajemen guru masih banyak yang benturan akibat tidak adanya kesesuaian dengan tuntutan perkembangan remaja masa kini; dan (3) Pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dan karakter yang berakar pada budaya bangsa kita belum banyak menyentuh remaja kita yang sekaligus membentengi atau sebagai filter budaya luar yang masuk ke negara kita (Anom, 2004).

Salah satu upaya akal untuk menangkal atau mencegah makin merebaknya perilaku amoral peserta didik, diperlukan pendidikan nilai karakter yang menanamkan nilai-nilai moral pada diri peserta didik. Pendidikan nilai dilaksanakan secara terintegrasi untuk pembentukan watak kepribadian peserta didik secara utuh yang tercermin pada perilaku berupa ucapan, perbuatan, sikap, pikiran, perasaan, kerja dan hasil karya yang baik (Zuriah, 2007).

Pendidikan nilai sebagai salah satu dimensi substansi pendidikan nasional penting yang belum sepenuhnya memberi dampak pembelajaran dan pengiring yang menggembirakan. Hal itu antara lain tercermin dalam fenomena perilaku yang tidak santun, pelecehan hak azasi manusia, perilaku kekerasan dan menurunnya penghormatan kepada pemerintah. Dahlan (1997) Ditinjau dari perkembangan kognitif menurut Piaget, masa remaja sudah mencapai tahap operasi formal. Remaja secara mental telah dapat berpikir secara logis tentang masalah yang abstrak, serta sistematis dan ilmiah dalam memecahkan masalah dari pada berpikir kongkret. Implikasi pendidikan atau bimbingan dari periode berpikir operasi formal ini adalah perlu disiapkan program pendidikan dan bimbingan yang memfasilitasi perkembangan kemampuan berfikir siswa (remaja). Sehubungan dengan hal tersebut pelaksanaan pendidikan nilai perlu diwujudkan dan diaplikasikan dalam bentuk semua mata pelajaran.

Setiap program yang dilaksanakan oleh suatu lembaga tentu memiliki kelebihan atau keunggulan-keunggulan di satu sisi dan kekurangan atau kelemahan di lain sisi. Keunggulannya merupakan daya dorong untuk terus melaksanakan program tersebut, sementara kelemahannya atau kekurangan-kekurangan dari program tersebut merupakan hambatan yang bukan hanya dapat mengurangi manfaat program tetapi juga dapat suatu program berhenti dilaksanakan.

Pendidikan tentang nilai selama ini belum pernah dilakukan evaluasi, oleh karena hal tersebut peneliti ingin mengetahui efektivitas pelaksanaan program pendidikan tentang nilai budaya dan karakter bangsa mata kurikulum sekolah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah pusat melalui Departemen Pendidikan Nasional bertanggung jawab atas mutu pendidikan nasional. Oleh karena itu, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menetapkan standar mutu pendidikan. Departemen Pendidikan Nasional terus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional yang diharapkan dapat mendukung peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) Indonesia, yang taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, kompeten, dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain pada era persaingan bebas.

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada berbagai jalur, jenis, dan jenjang pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tersebar mulai dari satuan/program pendidikan yang dibina oleh Pemerintah, Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan masyarakat memiliki keragaman layanan mutu pendidikan. Untuk mengatasi keragaman tersebut, beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain: (1) penetapan perangkat peraturan perundang-undangan yang mem-

berikan arah pelaksanaannya; (2) komitmen pimpinan; (3) sistem pengelolaan; (4) koordinasi yang baik; serta (5) pengetahuan dan kesadaran tentang penjaminan mutu pada setiap individu. Dengan demikian upaya peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secara terpadu antara penyelenggara dan pembina pendidikan di semua tingkatan dengan satuan/program pendidikan dalam kerangka Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

Sebagaimana hakikat posmodernisme yang memperlihatkan kritiknya terhadap modernisme, estetika posmodernisme dengan sendirinya menolak narasi besar, universalitas, rasionalitas, dan homogenitas. Posmodernisme tidak menawarkan sebuah kecenderungan (tunggal), tetapi berbagai kecenderungan (plural), yang tidak dapat direduksi menjadi sebuah konsep, atau makna tunggal. Posmodernisme membuka peluang bagi pengkombinasian berbagai kode yang ada dalam sebuah kode eklektik (*eclectic code*). Pilliung (2006:7) memberi contoh bahwa posmodernisme dilihat sebagai sebuah kecenderungan pengkodean ganda, yaitu kecenderungan pengkombinasian kode-kode modern dengan kode-kode lainnya (biasanya kode tradisional) agar sebuah karya lebih komunikatif. Kode ganda membuka dialog, saling beriteraksi, saling bersinggungan. dan terbentuklah iklim saling bertukar. Bagaimana pendidikan kita? Banyak kecenderungan adanya perubahan besar dalam tatanan aplikasi di pendidikan. Pendidikan sering dilakukan tanpa ketulusan dan keikhlasan. Pendidikan sudah mengarah pada komersialisasi.

Sejalan dengan iklim saling bertukar, posmodernisme melahirkan hakikat estetika hibrida. Pilliung (2006:7), hibrida adalah suatu cara untuk menghindari dari pakem atau aturan-aturan. Prinsip estetika posmodernisme membangun rasa menyenangkan (*forms follows fun*) dan membebaskan diri dari batas-batas estetika, batas baik/buruk, boleh/tidak boleh, bentuk/makna, rasional/ irasional, realitas/fantasi. Adanya perubahan besar dalam perilaku pendidikan yang dilakukan dalam bentuk :

1. *Pastiche*

Pendidikan modernisme mengagungkan universalitas atau keseragaman, rasionalitas. dan kebaruan. Dengan demikian, penciptaan perilaku dalam model pembelajaran yang inovatif, baru, dan rasional dalam penyusunan perangkat dan penerapan di lapangan. Bagaimana penerapan pembelajaran yang tidak selalu konvensional. Model diarahkan pada tataran yang lebih progresif dan inovatif. Dengan demikian adanya penerapan praktek pembelajaran yang mencoba melepaskan diri dari tradisi. Posmodernisme menolak universalitas atau keseragaman dengan mengadopsi unsur-unsur bahasa tradisi, dan menggabungkannya dengan unsur-unsur yang lain melalui idiom *pastiche*. *Pastiche*, Peminjaman teks-teks masa lalu dari berbagai sejarah sebagai rujukan tanpa pretensi apa-apa. Teks-teks masa lalu diambil begitu saja (*bricolage*) tanpa harus terikat dengan semangat zamannya dan menempatkannya dalam kondisi masa kini. Prinsip peminjaman dalam idiom *pastiche* ini berdasarkan pada kesamaan dan keterkaitan, yang melahirkan imitasi murni sebagai bentuk ungkapan simpati, penghargaan, dan apresiasi karya masa lalu. Berikut ini beberapa contoh karya dalam idiom *pastiche*.

Karya '*Creation of Adam*' dari Michael Angelo, yang menghiasi seling Kapel Sistina, Vatikan Roma banyak menginspirasi seniman di masa kemudian. Michael Angelo memiliki talenta dalam mengatur komposisi objek secara diagonal sehingga tampak menarik. Komposisi demikian hanya dipinjam oleh seniman masa kemudian dengan tanpa/merubahnya, yang disesuaikan dengan konteks masa kini.

Le Mayur, seorang pelukis berkebangsaan Belanda yang lama tinggal di Sanur. Karya lukis Le Mayur menjadi inspirasi bagi I Wayan Suja dalam melukis. Le Mayur tidak terpisahkan dari Ni Polok, seorang penari Bali yang kemudian menjadi istri dan sekaligus sebagai modelnya. Berbagai pose Ni Polok menjadi objek lukisan Le Mayur, sehingga I Wayan Suja, menganggap Ni Polok telah dikemas oleh Le Mayur sebagai komoditi. Oleh Wayan Suja, lukisan potret Ni Polok seolah-olah dibungkus dengan plastik, yang maksudnya siap dijual (Zaelani dan Hardiman, 2009).

Bahasa atau teks estetis '*Venus of Urbino*' karya Titan yang dibuat pada tahun 1538 (Honour dan John Fleming, 1982:392), juga menjadi patron dalam sebuah karya lukisan. Wanita

dalam pose selonjoran dalam lukisan Titan dipinjam begitu saja dikombinasikan dengan elemen estetik lain, yang oleh Levi-Starusse disebut sebagai semangat brocolage atau Baudrilard menye-butnya sebagai semangat simulasi (Pilliang, 2003:221).

2. Camp

Camp, sebuah idiom estetik yang digunakan seniman posmodern dalam menolak estetika rasional dan universal modernisme. Pengungkapan estetik yang dibuat-buat/palsu dengan cara mendistorsi makna, bahkan cenderung membesar-besarkan sehingga karya kelihatan tidak orisinal dan alamiah. Dengan mendaur ulang teks-teks estetik masa lalu dalam upaya mencari jawaban atas rasa bosan yang dialami dalam berkarya, karena dikekang oleh pakem-pakem seni modern yang ketat.

Patung David, berukuran 5,5 meter, adalah model ideal sebuah patung karya yang rneng-gambarkan sosok ideal manusia, tepatnya pria, muda, dengan tubuh berotot pejal, kuat, dan liat; karya itu dihasilkan oleh Michael Angelo, seorang seniman genius, dengan pencapaian estetik yang menonjol dalam sejarah seni rupa dunia. Sampai hari ini, karya Michael Angelo ini masih terus diabsahkan dan direproduksi dalam berbagai sumber pengetahuan – untuk anak-anak sekalipun. Michael Angelo menggambarkan David dengan pose *contrapposto* – posisi ideal dalam seni patung Yunani Kuno – yang tampak puas diri, berdiri menyamping, dengan bertopang pada kaki kanan-nya hingga otot-otot di paha. hingga betisnya tampak menggumpal liat (Antariksa, 2008:13). Tita Rubi, salah seorang seniman Indonesia, yang jebolan Seni Rupa ITS, menduplikasi patung David dengan cara memperbesar ukurannya menjadi 13 meter.

Tita Rubi melibatkan berbagai ahli-ahli listrik, ahli brokat, konstruksi, anatomi dalam menyelesaikan proyeknya ini. Tampilan akhir patung David, seluruh tubuhnya dibalut oleh brokat berwarna merah dan patung ini tampak transparan karena di dalam patung dinyalakan lampu.

Budi Adi Nugroho meminjam bentuk tokoh bagong dari dunia pewayangan dalam karyanya, yang bisa terbang karena ia menggunakan material ringan semacam balon berisi gas. Karya ini ditampilkan dalam sebuah pameran “Intersection” Indonesia Contemporary Sculpture di Audi’s Gallery Jakarta, tahun 2011. Ukuran karya 60 x 50 x 18 cm.

Karya patung “Tanda Mata” adalah karya Basrizal Al Bara, terbuat dari Gamestone, kunin-gan, fosil kayu, aluminium. Patung ini ditampilkan dalam pameran “Intersection” Indonesia Con-temporary Sculpture di Audi’s Gallery Jakarta, tahun 2011. Basrizal menduplikasi bentuk cincin yang ukurannya diperbesar menjadi 75 x 58 x 40 cm.

3. Parodi

Idom esletika parodi sebagai bentuk sindiran, kecaman terhadap estetika modern yang dibangun dengan humoris (*sense of humor*). Menurut Baktin, parodi adalah suatu bentuk dialog satu teks bertemu dengan dan berdialog dengan teks lainnya. Tujuan parodi untuk mengekspresi-kan perasaan tidak puas, tidak senang, tidak nyaman berkenaan dengan intensitas gaya atau karya masa lalu yang dirujuk (Pilliang, 2003:214). Dengan mengambil teks estetik masa lalu untuk membangun kontradiktif, penyimpangan arah, menghasilkan efek makna yang berbeda. Tampilan karya bercirikan lucu, ironik, duplikasi, revivalisme, rekonstruksi.

Lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci, yang tersimpan di Museum Luvre, Paris, yang sampai saat ini masih menarik dibincangkan dalam seni rupa dunia. Siapa Mona Lisa dalam lukisan Leonardo itu, sampai sekarang tidak ada jawaban yang pasti. Konon, Mona Lisa adalah seorang malaikat yang datang kepada Leonardo di malam hari untuk minta dilukis. Cerita yang lain, Mona Lisa adalah teman perempuan Leonardo. Senyum Mona Lisa sering disebut sebagai senyum arkaik – bibir tipis yang kedua ujungnya ditarik ke atas – adalah senyum khas suku arkaik di Italia. Masih misterinya sosok Mona Lisa, menyebabkan seorang pengunjung Museum Luvre pe-nasaran dan merusak lukisan Mona Lisa dengan pisau, yang kemudian direstorasi supaya seperti semula lagi. Misteri Mona Lisa diangkat dalam sebuah cerita film. Lukisan Mona Lisa yang sangat terkenal ini, banyak dipinjam oleh seniman dalam mencipta karya dengan idiom parodi. Seniman posmodernisme melakukan parodi terhadap lukisan Mona Lisa karena merasa tidak puas, tidak

senang, tidak nyaman terhadap lukisan Mona Lisa yang dianggap sebagai ikon, standar dalam seni lukis pada masa lain.

4. Kitsch

Seni modernisme membedakan seni tinggi (*high art*) dan seni rendah (*low art*), dan menempatkan seni tinggi sebagai seni yang bermartabat, bergengsi, bernilai tinggi, diciptakan oleh kaum elit. Seni rendah dianggap remeh temeh yang tidak berkualitas, estetika rendah, tidak bermartabat, dihasilkan oleh kaum buruh dan masyarakat marjinal. Posmodernisme menolak perbedaan seni tinggi dan seni rendah dengan menciptakan seni massa (*mass production*). Seni diproduksi secara massal untuk kepentingan ekonomi. Seni kitsch dihasilkan dalam bentuk semangat re-produksi, simulasi, adaptasi, dengan miskin nilai, selera rendah, murahan, diproduksi secara massal, menanggalkan mitologi, ideologi, dan spiritual. Karya seni kitsch juga disebut dengan *pseudo art*, seni palsu karena direpresentasikan dengan meniru karya seni lain.

Lukisan *Creation of Adam* dan *Mona Lisa* sering menjadi sumber inspirasi bagi seniman posmodernisme dalam berkarya. Sebagaimana tujuan dari seni kitsch untuk kepentingan ekonomi, maka wajar dua lukisan di atas, sebagai ikon-ikon budaya yang sudah akrab di masyarakat, dipinjam dan ditempelkan begitu saja dalam karya produksi massal, agar cepat dikenal dan diakrabi oleh konsumen.

Teks estetis karya lukisan Juan Miró, seorang pelukis gaya surealis, juga sering dipinjam oleh produsen untuk mass produknya.

5. Skizofrenia

Prinsip karya dalam idiom skizofrenia adalah ambigu, kontradiktif, tidak ada totalitas yang dibangun dari gagasan yang tidak total, kegalauan, ambigu, terpecah, dan samar. Kekacauan terjadi karena tidak adanya dialog antara elemen-elemen karya, kode simbolik karya, isi dan nilai estetikanya ambigu yang melahirkan penandaan yang simpang siur. Tanda, makna dengan bahasa yang simpang siur dipasangkan secara berdampingan sehingga menghasilkan makna dari dialog penanda yang berbeda.

Elemen-elemen visual: garis, bidang, warna, dan tekstur saling mendominasi satu dan lainnya, sehingga menampilkan makna yang simpang siur dan ambigu. Kesimpangsiuran makna tampak dalam karya Jackson Pollock "Eyes in the Heart", karya Fernandez Arman "Petits dechets bourgeois", karya Fernand Leger "contrast form", dan karya Wassily Kandinsky.

* Widyaiswara LPMP Prov. Bali

** Majalah Saraswati

DAFTAR PUSTAKA

- Antariksa. 2008. *Subverting Power and Desire: Essays on Titarubi's Surrounding David*. Yogyakarta: Titarubi and iCAN (Indonesian Contemporary Art Network).
- Hardiman dan Alsikin. 2011. "Intersection: Indonesia Contemporary Sculpture". (Katalog). Jakarta: Andi's Gallery.
- Honour, Houge dan John Fleming, 1982. *The Visual arts: a History*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc Englewood Cliffs.
- Kartika, Dharsono Sony. 2004. *Seni rupa Modern*. Bandung: Rekayasa.
- Magi, Giovanna. 1990. *Paris*. New Edition. Paris: Casa-Edilrice Bonechi.
- Mareau, Jo. dkk., 1998. *Art a World History*. Second Edition. London: Dorling Kindersley.
- Pilliang, Yasraf Amir. 2003. *Hipersemiotika: Tafsir Cultural Studies Atas Matinya Makna*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Pilliang, Yasraf Amir. 2006. "Antara Homogenitas dan Heterogenitas: Estetika dalam Cultural Studies" (Makalah). Denpasar: Kajian Budaya Universitas Udayana.
- Zaelani, Riski A. dan Hardiman. 2009. "Mythical Beauty by I Wayan Suja". (Katalog). Jakarta: Andi's Gallery

Inovasi Penilaian Hasil Belajar:

Alternatif Solusi Penilaian Kinerja Siswa yang Memacu Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi

Oleh: **Dr. I Made Alit Mariana**

BERKENAAN dengan inovasi, dapat kita katakan bahwa inovasi adalah produk dari kreativitas.

Kreativitas adalah *creative thinking can be enhanced by external forces, and isn't necessarily reliant on "good genes" or natural ability (Gregory Ciotti)*. Kreativitas dapat ditingkatkan tanpa membutuhkan intelegensia yang unggul dibawa melalui keturunan (*genes*). Dengan demikian, inovasi dapat dijangkau oleh semua lapisan pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas profesinya.

Segala upaya dalam pengembangan alat ukur sebagai instrumen evaluasi hasil belajar siswa adalah untuk menjangka kinerja siswa baik dalam pengetahuan (*cognitive*), keterampilan (*skills*), dan sikap (*attitude*). Sebagai tujuan kurikuler dalam kurikulum 2013 disebut yaitu: sebagai Kom-petensi Inti (KI) 1, spiritual; KI-2 sosial; KI-3, pengetahuan; dan KI-4, keterampilan. Sebagai hasil pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan, adalah efek yang terjadi pada siswa, efek langsung (*direct effects* atau *instructional effects* dan *indirect effects* atau *nurturant effects* atau dampak iringan).

Efek langsung siswa dicapai sebagai akibat belajar yang dilakukan siswa untuk memahami suatu fenomena (pola dan proses inkuiri serta peristiwa) alam. Efek tidak langsung dicapai siswa sebagai akibat "prosesi" yang dilakukan siswa dalam "melakukan" proses ilmiah, meniru ahli dalam mengungkap fenomena alam yang penuh rahasia ini.

Dalam membentuk keyakinan guru sebagai arah dalam melakukan tugas profesional sesuai dengan persepsi tentang konsep yang betul terhadap suatu konsep dan pendidikannya dimulai dari dalam diri peserta didik dan diakhiri dengan tindakan terdidik dan bertanggung jawab.

Efek tidak langsung diakibatkan pengalaman belajar siswa dalam mempelajari suatu fenomena lama (baca: tema terpadu dalam kurikulum). Diagram di atas mengilustrasikan pencapaian siswa dalam konteks pembelajaran dan keyakinan guru terhadap pendidikan yang ideal sebagai acuan dalam melaksanakan tugas profesional. Dengan timbulnya keyakinan terhadap pendidikan yang ideal, diharapkan guru dapat "melihat" profesi guru sebagai panggilan dalam hidupnya. Dan ... dengan demikian dalam kondisi yang paling sulit pun (sementara menunggu segala faktor pendukung terpenuhi dengan baik dan sempurna: dukungan sarana dan moral serta kesejahteraan)

tugas profesional dapat dioptimalkan. Hal ini dilakukan karena merasa kewajiban untuk berpikir, berkata, dan melakukan yang terbaik dalam kesempatan tersebut.

Pencapaian siswa berupa efek langsung dan efek tidak langsung, merupakan perolehan siswa yang belajar suatu fenomena alam. Dalam tindakan sehari-hari atau kinerja siswa merupakan sikap¹ dan perilaku yang menunjukkan seseorang yang mencirikan literasi/sadar sains dan teknologi.

Penilaian hasil belajar siswa mengikuti pakem penilaian yang sesuai dengan panduan dalam kurikulum. Beberapa hal yang mungkin berbeda, terletak pada karakteristik antar mata pelajaran. Sehingga dengan demikian, penilaiannya pun mengacu kepada karakteristik tersebut.

A. PENDAHULUAN

Kisah penilaian atau pengukuran membantu kita mendudukan pengukuran sebagai upaya menguji fenomena, mengukur perbedaan-perbedaan hasil belajar individu. Misalnya kisah pen-gukuran waktu yang dilakukan oleh Kinnebrook dengan menggunakan baris bayang ma-tahari.

Pengukuran dapat berguna bila digunakan untuk meningkatkan belajar dan kinerja pebelajar. Hasil pengukuran memberikan berbagai fungsi dan penting dalam pendidikan. Memungkinkan kita menentukan pencapaian pebelajar dan proses belajar yang dapat digunakan untuk membantu siswa belajar. Evaluasi berperan penting sebagai upaya mengukur hasil belajar siswa, menemukan miskonsepsi, dan menentukan efektivitas pembelajaran (Doran & Hejaily, 1992, dalam David L. Haury & Peter Rillero, 1994). Tuckman, BW (1975:7) menyatakan beberapa alasan penggunaan test dalam pengukuran pencapaian belajar siswa. *Pertama*, mengarahkan kita kepada obyektifitas dalam observasi. *Kedua*, me-nentukan perilaku yang dicapai sebagai upaya pengendalian kondisi belajar. *Ketiga*, menentukan secara sampling kinerja yang dicapai siswa. *Keempat*, Menentukan kinerja dan pencapaian yang sesuai dengan tujuan dan standar. *Kelima*, menentukan sesuatu yang tidak terlihat. *Keenam*, Menentukan ciri khas dan komponen perilaku. *Ketujuh*, Mem-prediksi perilaku masa depan. *Kedelapan*, mencari data yang sesuai untuk masukan berkelanjutan pembelajaran dan pengambilan keputusan hasil yang dicapai dan proses pem-belajaran.

Bagaimana melakukan pengukuran? Langkah pertama *dalam* pengukuran adalah menen-tukan hal-hal yang akan diukur, pengukuran memerlukan tujuan yang jelas sebagai panduan dalam menentukan proses pengukuran itu sendiri. Akan lebih mudah melakukan memilih atau modifikasi instrumen yang sudah ada dan menyesuaikan dengan tujuan yang telah ditentukan. Instrumen yang telah ada ditentukan validitasnya (mengukur hal yang hendak diukur) atau kesesuaiannya dan reliabilitasnya (keajegan test). Jadi instrument yang telah disusun hendaknya juga dievaluasi sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

Inovasi itu sendiri dapat kita rumuskan, paling tidak untuk makalah ini, antara lain *sebagai berikut*. Kjell Skogen menyatakan bahwa inovasi adalah perubahan yang direncanakan, yang bertujuan untuk memperbaiki praktek-praktek. Smith (2000: webmaster@fedex.com), menyatakan dua kunci inovasi, yaitu kecakapan berpikir lebih dari sekedar paradigma konvensional dan men-guji kendala tradisional menggunakan cara berpikir nontradisional, berpikir keluar dari kerangka berpikir kita dan menemukan cara lain melihat permasalahannya.

Goldberf, N (2000: <http://www.nataliegoldberq.com/>) menyatakan bahwa kreativitas dan inovasi seperti bumi yang diletakkan di atas meja air, tidak terbatas untuk ditulis atau digambar-kan, dimana-mana, merupakan daya hidup, jika kita berusaha memukulnya akan memercik ke kita, langkah pertama untuk memahaminya adalah dengan mengamatinya.

1 Sikap sering kali dipahami sebagai kecenderungan dan keinginan yang kuat dalam dirinya untuk bertindak yang dipengaruhi persepsinya yang benar terhadap suatu tema.

Amabile (1983: 31) mengidentifikasi kasikan kreativitas dan inovasi sebagai sesuatu yang dapat dilihat dari hasil (*creative product*) dan/atau dapat dilihat dari proses seseorang menjadi kre-atif (*creative process*). Lebih lanjut dikemukakan, bahwa yang lebih penting adalah identifikasi kegunaan (*fruit*) dan kemungkinan keterlaksanaan sebagai sesuatu yang kreatif dari proses atau subproses, produk atau respon. Franklin (2003) menuliskan bahwa "*innovation is anything that somebody thinks is a great idea*", merupakan gagasan yang besar atau sesuatu yang cemerlang.

B. TUJUAN

Tujuan pencapaian pembaca setelah selesai mengkaji materi Inovasi Penilaian Hasil Belajar, diharapkan sebagai berikut.

1. Menganalisis inovasi yang mungkin dapat dikembangkan dalam pelaksanaan evaluasi penca-paian siswa mata pelajaran .
2. Menentukan jenis evaluasi yang dapat digunakan untuk memperoleh pencapaian siswa secara menyeluruh sebagai hasil belajar siswa.
3. Menentukan instrument analisis jenis evaluasi yang digunakan dalam penilaian hasil belajar .

C. ASUMSI DALAM INOVASI PENILAIAN HASIL BELAJAR

Untuk selanjutnya, inovasi dirumuskan sebagai **hasil kreativitas yang merupakan perubahan yang sistematis dan berkesinambungan dengan cara berpikir keluar dari paradigma konvensional sebagai sesuatu pemikiran cemerlang yang dapat dilihat sebagai proses dan produk yang memiliki kegunaan dan terlaksana untuk kesejahteraan umat manusia**. Implikasi inovasi dalam penilaian pendidikan dapat dilihat sebagai suatu proses pengembangan soal yang inovatif dan produk yang inovatif untuk kebanyakan praktisi pendidikan. Sehingga dengan demikian, pencapa-ian siswa dalam belajar dapat diperoleh peta yang menyeluruh dan faktual sebagai kinerja siswa.

Dalam konteks pengembangan alat ukur hasil belajar dapat diajukan beberapa pertanyaan yang digunakan untuk mengevaluasi instrumen untuk pengukuran, antara lain sebagai berikut.

- Apakah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan? — kesesuaian.
- Apakah test itu mengukur hal yang hendak diukur sebagai hasil belajar? — validitas.
- Apakah mengukur secara ajeg dan akurat dalam kurun waktu tertentu? — reliabilitas.
- Apakah akan memperoleh hasil yang dapat dipahami dan digunakan? — dapat diinterpreta-sikan.
- Apakah masuk akal untuk dioleh hasilnya dan bermanfaat? — dapat digunakan.

Kita dapat mengasumsikan beberapa hal tentang inovasi penilaian hasil belajar untuk memudahkan dalam pembahasan atau mengukur sebagai suatu yang inovatif.

- **Produk atau respon** harus dinyatakan sebagai muara dari hasil kreativitas dan inovasi.
- Kreativitas dan inovasi sebagai sesuatu yang **dipahami** oleh seseorang dan **disetujui** meski-pun tanpa diberikan petunjuknya atau perjanjian sebelumnya.
- Pengamat menerima dengan **tingkat tertentu suatu produk dikategorikan lebih inovatif** dari pada yang lainnya.

D. PENILAIAN HASIL BELAJAR SISWA

Penilaian hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah pertanggung jawaban terhadap penge-lolaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Untuk itu, penilaian hasil belajar siswa, hendaknya memberikan gambaran menyeluruh terhadap pencapaian dan kinerja siswa sebagai pebelajar ses-uai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dipelajarinya dan diprogramkan dalam kurikulum. Beberapa 'rasional' yang disampaikan oleh para guru terhadap tantangan dalam upaya inovasi dalam penilaian hasil belajar siswa, antara lain, karena jenis soal dalam ujian nasional (UN), sepertinya masih mengukur pada ranah kognitif belaka. Sehingga dengan demikian, upaya

inovatif dalam pengembangan evaluasi hasil belajar siswa yang sesuai dengan hakekat pendidikan itu sendiri, seringkali menemui hambatan dalam pengembangannya.

Hal itu, terjadi antara lain karena pendidikan masih dimaknai sebatas untuk lulus ujian be-laka. Upaya untuk mencerdaskan dan membangun ahlak mulia anak bangsa masih dibahas dalam diklat dan/atau forum asosiasi guru semata. Untuk itu, masih perlunya upaya yang memadai dan optimal untuk meyakinkan bahwa, pendidikan tidak hanya membantu siswa belajar untuk lulus ujian, tetapi upaya mencerahkan pebelajar agar mempunyai kemampuan kognitif yang memadai, memiliki sikap yang sesuai dengan harapan bangsa, dan memiliki keterampilan sebagaimana hal-nya ahli ilmu pengetahuan dalam mengungkap rahasia alam.

Pembenahan yang memiliki signifikansi tinggi atau prediktor utama dalam pembenahan sistem pembelajaran, menuju kearah pembelajaran yang ideal, antara lain melalui pembenahan sistem penilaian secara menyeluruh, yang dijadikan sebagai suatu kebijakan nasional. Suatu pe-nilai-an hasil belajar siswa yang mengungkap secara valid dan *reliable* terhadap pencapaian kogni-tif, afektif, dan psikomotorik siswa.

1. Penilaian Hasil Belajar Siswa

Beberapa hal yang mungkin dijadikan alasan secara konseptual pengelolaan pengukuran atau evaluasi hasil belajar, antara lain sebagai berikut.

1.	Sebagai acuan observasi terhadap kompetensi yang dicapai siswa dalam kurun waktu tertentu.
2.	Sebagai upaya menentukan sample kinerja siswa akibat pembelajaran yang diikuθ dalam mencapai kompetensi dasar yan ditentukan.
3.	Menentukan perilaku siswa yang hendak dikendalikan dalam pembelajaran sebagai bentuk literasi sains siswa dalam pem-belajaran yang diikuθnya.
4.	Menentukan kriteria pencapaian siswa dalam pembelajaran sebagai bagian dari kompetensi dasar yang hendak dicapai yang mengacu kepada indikator pencapaian siswa.
5.	Menentukan kinerja siswa sebagai dampak langsung dan θ-dak langsung pembelajaran yang dilaksanakan.
6.	Mengungkap hal-hal sebagai hasil belajar siswa yang θdak teramaθ secara langsung, kasat mata.
7.	Merumuskan prediksi perilaku mendatang siswa sebagai se-seorang yang sains dan teknologi sebagai dampak pembela-jaran yang diikuθnya.
8.	Mencari informasi yang memadai terhadap hasil belajar siswa dan proses pembelajaran yang dilaksanakan sebagai balikan terhadap para pengambil keputusan, baik untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya (guru) maupun bagi para pengambil kebijakan dalam pendidikan (pemerintah) dan informasi pencapaian belajar (siswa).

Daftar rasional terhadap pentingnya upaya inovasi penilaian hasil belajar siswa di atas dapat diperpanjang lagi dengan mempertimbangkan kondisi faktual kondisi pembelajaran sesuai dengan saat ini, tingkat perkembangan intelektual siswa, dan alokasi waktu pembahasan untuk setiap kompetensi dasar dan standar kompetensi bahan ajar.

RASIONAL TEST & PENGUKURAN



Mengingat pentingnya pengelolaan evaluasi hasil belajar seperti tersebut di atas, pemerintah menganggap perlu di buat payung hukum penyelenggaraan evaluasi pengelolaan pendidikan di sekolah. Beberapa regulasi yang dapat diacu dalam pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah, antara lain sebagai berikut.

Pertama, UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dituangkan dalam pasal-pasal. Pasal 1 (21): Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Pasal 57 (1): Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Ayat (2): Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. Pasal 58 UU No. 20/2003 Sisdiknas, ayat (1): Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Ayat (2): Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian SNP.

Pasal 59 UU No. 20/2003 Sisdiknas, ayat (1): Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Ayat (2): Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 (3): Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

PP RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan tersusunnya kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan mengacu: standar isi dan standar kompetensi lulusan serta berpedoman pada panduan yang disusun BSNP. Silabus yang dikembangkan sekolah memuat elaborasi teknis Kompetensi Dasar yang

disebut dengan indikator. Standar kompetensi lulusan pun adalah bagian penting yang harus diacu dalam pengembangan evaluasi. Sehingga evaluasi yang dilakukan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, tidak terlepas dari proses pembelajaran (dalam silabus disebut pengala-man belajar) dan indikator yang dicanangkan pengembang silabus. Dengan demikian, PP tentang SNP merupakan komponen yang strategis sebagai acuan dalam pengembangan instrumen evalu-asi hasil belajar siswa.

PP nomor 32 Tahun 2013 tentang penyempurnaan PP nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai upaya pengembangan kurikulum menuju kurikulum 2013.

Permen diknas RI No. 33 tahun 2007 tentang Ujian Nasional. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Teknis penyelenggaraan ujian nasional beberapa mata pelajaran di berbagai jenjang pendidikan untuk tahun ajaran 2007/2008 d parkan dalam permen ini. Sehingga dengan demikian, Permen inilah yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan ujian nasional tahun 2008 mendatang di Indonesia. Demikian juga untuk tahun bejalan berikutnya diatur dengan Permen berikutnya.

Permen Dikbud nomor 67, 68, 69, 70, dan 71 Tahun 2013 tentang Struktur Kurikulum SD, SMP, SMA, dan SMK menuju kepada implementasi Kurikulum 2013 di semua jenjang pendidikan.

Evaluasi merupakan upaya sistematis dalam seluruh proses pendidikan yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pendidikan.

2. Penilaian Hasil Belajar Siswa

Penilaian hasil belajar siswa, dapat dikelompokkan secara besar, yaitu terhadap hasil bela-jar konvensional dan hasil belajar tingkat tinggi (*High Order Thinking – HOT*). Kedua kelompok ini pada dasarnya hanya untuk membedakan adanya kemampuan berpikir yang generik dan kemam-puan berpikir lebih kompleks atau tingkat tinggi.

Penilaian Hasil Belajar Siswa Konvensional

Penilaian hasil belajar siswa yang diparkan berikut bukanlah meniadakan evaluasi kreatif yang telah dilakukan guru dalam mengukur pencapaian siswa. Profil berikut hanya semata penga-matan terbatas penulis terhadap fenomena penilaian hasil belajar siswa, dalam setiap kesempatan melakukan kunjungan ke kelas dan berdiskusi dengan Guru dan Tenaga Kependidikan lainnya, lintas Indonesia.

Soal Yang Biasa Dilaksanakan

Jenis	Format	Kesulitan Menyusun	Kesulitan Menilai	Mengukur
Tidak Terstruktur	Pilihan Bebas	6 (paling mudah)	Sulit	Mengingat
Melengkapi	Pilihan bebas	5	Sulit	Mengingat
Betul-salah	Pilihan tertentu	3	Mudah	Mengingat
Dua Pilihan	Pilihan tertentu	4	Agak Sulit	Klasifikasi
Pilihan Ganda	Pilihan tertentu	2	Mudah dan Sulit	Berpikir lebih tinggi
Menjodohkan	Pilihan tertentu	1 (paling sulit)	Mudah dan Sulit	Berpikir lebih tinggi

Secara umum penilaian yang dilakukan dalam mengukur pencapaian siswa, meliputi pertanyaan dengan tipe jawaban pendek dan soal yang tidak terstruktur. *Pertama*, pertanyaan tipe jawaban pendek, meliputi: pilihan ganda (betul-salah, dua pilihan jawaban, dan pilihan lebih dari dua). Pertanyaan pilihan ganda, pilihan dua lebih mudah dibandingkan dengan pilihan lebih dari dua, jika instrumen pengukuran tersebut telah mengikuti kaidah penulisan pokok uji. Kaidah tersebut, antara lain, daya tarik setiap pilihan relatif sama, tidak ambigu, validitas memadai, dan reliabilitas yang sesuai. Pertanyaan pilihan ganda yang memiliki karakteristik seperti ini memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi dari rendah sampai dengan tinggi sesuai dengan tujuan. Tetapi jika soal pilihan ganda dibuat tidak mengindahkan kaidah tersebut, soal yang diperoleh adalah ingatan semata. Dan ini mencerminkan, instrumen pengukuran hasil belajar tidak memberikan masukan yang memadai terhadap guru, siswa, dan sekolah, serta pengambil keputusan terhadap pengelolaan pendidikan di sekolah. Jika hal seperti ini yang terjadi, informasi yang diperoleh tidak menunjukkan kondisi belajar siswa yang sebenarnya.

Kedua, soal yang biasa juga digunakan sebagai alat ukur pencapaian siswa, antara lain pertanyaan esai, yaitu meminta jawaban secara bebas. Dalam membuat soal semacam ini, relatif mudah, dan dapat menjangkau beberapa materi pokok. Kelemahan pertanyaan bebas ini, antara lain, pemberian nilai dari suatu jawaban siswa yang sangat beragam relatif sangat sulit dan cenderung tidak objektif. Artinya untuk mengukur pencapaian siswa dan kedudukan relatif sesama siswa dan pencapaian kriteria yang telah ditentukan tidak mencerminkan keadaan sesungguhnya. Sehingga, tujuan penilaian pencapaian siswa tidak tercapai, tidak kita ketahui secara jelas ketuntasan siswa, penguasaan materi pelajaran, dan proses belajar siswa dengan sesungguhnya.

Jawaban yang diberikan siswa terhadap pertanyaan seperti ini, sangat beragam, karena ketidak-jelasan respon yang diinginkan oleh siswa dalam menjawab pertanyaan tersebut. Keajegan guru dalam memberikan skor terhadap jawaban siswa relatif kurang, sehingga cenderung kurang obyektif.

Tidak banyak guru yang mengembangkan dan menggunakan kuesioner untuk mengukur sikap siswa dari suatu topik bahasan tertentu. Kalaulah siswa diberi kesempatan melakukan kegiatan praktikum – meniru ahli dalam menemukan fenomena alam, yang diberikan skor, biasanya hanya laporannya saja. Kinerja siswa dalam melaksanakan kegiatan (psikomotor), seringkali terlupakan begitu saja, sehingga tidak mempunyai gambaran menyeluruh. Atau dalam evaluasi yang dilakukan juga tidak memperoleh gambaran yang menunjukkan keterampilan siswa.

Bila kita sepakat, bahwa hakekat ilmu pengetahuan adalah kumpulan konsep-konsep dan prinsip-prinsip; proses memperoleh eksplanasi ilmiah fenomena alam; dan konteksnya dalam ke-hidupan sehari-hari, evaluasi yang dilakukan hendaknya memberikan informasi pencapaian hal tersebut. Dalam berbagai dokumen penyelenggaraan pendidikan sering disebutkan bahwa pe-nilai-an dilakukan dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, sikap, penilaian hasil karya berupa proyek atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri.

Jika informasi yang kita peroleh tentang kinerja siswa yang tidak mencerminkan kemampuan siswa berpikir tingkat tinggi, untuk selanjutnya kita tidak akan pernah memperoleh masukan untuk melakukan CPD (*continuous professional development*), dalam pembelajaran. Dan, ... ini berarti akan terkesan adanya resistensi terhadap perubahan, pembelajaran yang dilaksanakan hanya “yang itu-itu saja” dari tahun ke tahun berikutnya. Sehingga akan setuju kita terhadap pandangan yang mengatakan, upaya pembenahan pembelajaran dapat dimulai dari mengubah model evaluasi hasil belajar siswa — jenis dan model evaluasi mengarahkan pembelajaran yang akan dilakukan.

Penilaian Hasil Belajar Siswa Mengukur Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi

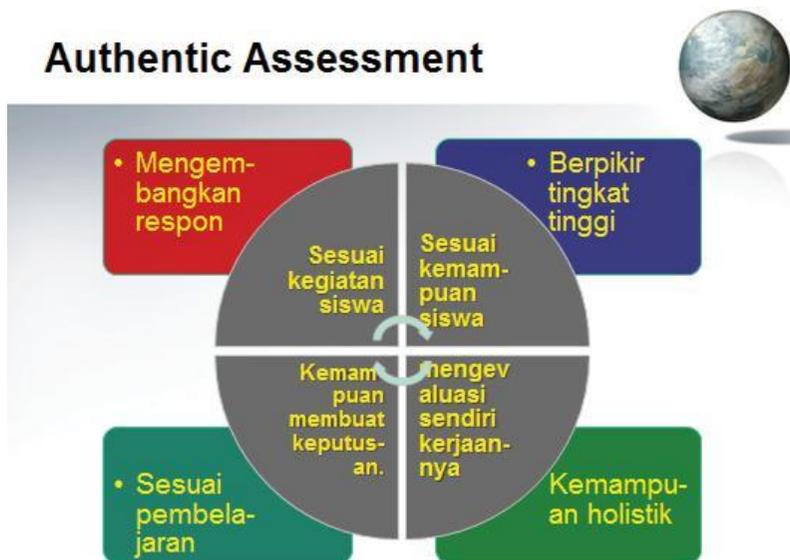
National Science Education Standards menyatakan bahwa, penilaian merupakan mekanisme masukan dalam sistem pendidikan sains; data penilaian memberikan masukan bagi siswa tentang pencapaian harapannya guru dan orang tua, masukan bagi guru tentang cara belajar siswa, masukan bagi dinas dan pengambil keputusan (*stakeholders*) pendidikan tentang efektifitas pembelajaran. Masukan ini mengarahkan pengembangan kemampuan profesional guru, dalam mendorong siswa meningkatkan pemahamannya.

Perangkat Pengukuran Pencapaian Siswa

Beberapa perangkat pengukuran yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan hasil belajar siswa, yang memungkinkan untuk memperoleh informasi pencapaian belajar siswa pada tata-ran *high order thinking skills*. Secara garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu *authentic* dan *portfolio*.

Tujuan *Authentic Assessment*

Authentic Assessment



Kelompok pertama, pengukuran *authentic*, yaitu: Siswa menghadapi tantangan riil yang memungkinkan mereka menggunakan pengetahuan dan keterampilannya; mengevaluasi pencapaian siswa sebagai upaya mengetahui kemampuan kolektifnya; pengukuran terhadap suatu keterampilan yang tidak dapat diukur secara efektif; didesain untuk *criterion-referenced* bukan *norm-referenced*.

Evaluasi *authentic* senantiasa berdasarkan pada kinerja siswa, *menunjukkan* pengetahuannya, keterampilannya, atau kompetensinya sesuai dengan caranya yang nyaman untuk mempresentasikannya. Tantangan dalam menggunakan model ini, yaitu memerlukan waktu khusus mengolahnya, memerlukan kurikulum yang jelas, dan berusaha meniadakan bias penilainya.

Tujuan penggunaan evaluasi *authentic*, sesuai dengan karakteristiknya, antara lain sebagai berikut.

- Siswa diberikan kesempatan untuk berusaha mengembangkan respon yang memadai, memungkinkan siswa mengembangkan kemampuan merespon suatu suruhan dari pada sekedar memilih jawaban.

- Memungkinkan siswa untuk berlatih kemampuan berpikir tingkat tinggi sesuai dengan topik yang dibahas. Membangun higher order thinking sebagai lanjutan dari keterampilan dasar(basic skills).
- Evaluasi yang dilakukan sesuai pembelajaran yang diikuti siswa, sehingga tidak mismatch dengan yang dipelajarinya dan proses belajarnya. Secara langsung mengevaluasi kegiatan menyeluruh siswa.
- Pencapaian siswa yang diukur menyangkut kemampuan holistic, yaitu kompetensi yang menyeluruh dari suatu kompetensi dasar tertentu. Dapat disintesis dengan pembelajaran kelas.
- Evaluasi yang diikuti siswa akan sesuai dengan kegiatan siswa dalam pembelajarannya. Menggunakan sample kerja siswa yang dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu.
- Segala sesuatu yang dilakukan siswa dan bukti peiaksanaannya serta hasilnya ini sesuai kemampuan siswa. Dikembangkan dari kriteria yang jelas yang telah diketahui siswa.
- “Jawaban” yang disampaikan siswa juga meliputi kemampuan membuat keputusan dari suatu kegiatan tertentu, berbagai dimensi kemanusiaan, dalam konteks pembelajaran.
- Siswa dapat mengevaluasi sendiri kerjanya yang dapat dijadikan sebagai balikan bagi dirinya dalam proses yang dilakukannya.

Kelompok kedua, yaitu evaluasi *portfolio*. Evaluasi portfolio mulai dari rentang mendemonstrasikan kegiatan yang terbaiknya sampai dengan catatan prestasi siswa, yang dikumpulkan sebagai representasi kerja siswa. Portofolio dapat digunakan sebagai hasil kerja siswa yang memperlihatkan rentang kinerja dan pengalaman siswa dalam pembelajaran.

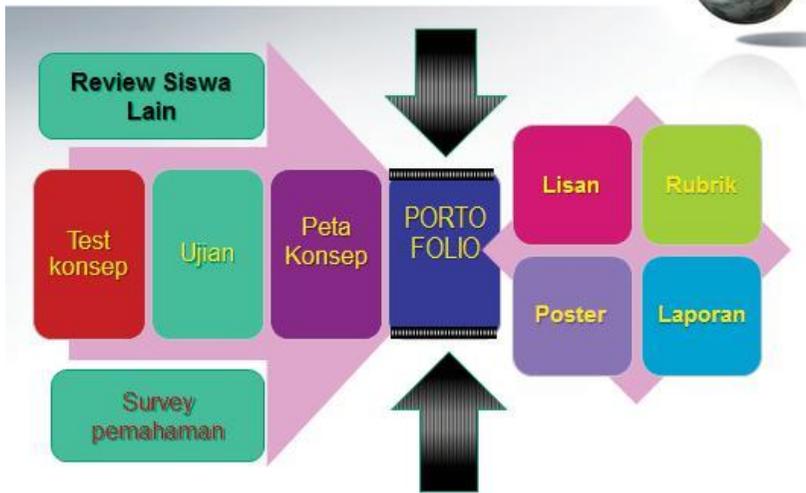
Implikasi evaluasi portofolio dalam berbagai hal, meliputi: kurikulum, pembelajaran, dan pengukuran, yaitu sebagai berikut.

- Curriculum-portfolio memungkinkan memperluas kurikulum melebihi pengukuran standar; keluasannya bergantung pada kemampuan pengembangan test.
- Instruction- portfolio dapat dijadikan sebagai “pelengkap” pembelajaran kerja kelompok, proyek, dan penerapan pengetahuan; sesuai dengan pembelajaran individual.
- Assessment-portofolio dapat digunakan sebagai perangkat evaluasi; informasi yang diperoleh dijadikan bahan pengambilan keputusan terhadap kinerja siswa, dan sebagai refleksi diri siswa, serta pembelajaran selanjutnya.

Ragam instrumen pengukuran yang mengacu kepada hal tersebut di atas, sebagai upaya memperoleh informasi memadai tentang kompetensi siswa, antara lain sebagai berikut.

- Peta Konsep: teknik menggambarkan pemahaman keseluruhan pengertian, hubungan konsep-konsep yang utuh melalui diagram.
- Test konsep: soal pilihan ganda yang sangat baik digunakan mengukur pencapaian siswa untuk kelas besar.
- Survey pemahaman: jawaban berdasarkan beberapa pelajaran yang melingkupi suatu topik bahasan tertentu. Survey pemahaman dapat digunakan pada test formatif dan sumatif.
- Ujian: menguji pencapaian siswa kurun tertentu; dalam bentuk formatif dan sumatif serta ujian lainnya.
- Presentasi Lisan. Siswa membacakan hasil yang dicapai sebagai laporan terhadap kelompok yang lain dan guru.
- Presentasi Poster. Siswa meringkaskan hasil kerja, proses, dan apresiasinya dalam melaksanakan aktivitas dalam bentuk poster yang diberikan penjelasan dalam mempresentasikannya.

Ragam Perangkat Pengukuran



- Review rekan sejawat siswa. Penilaian yang dilakukan rekan siswa lain yang dilakukan terhadap satu ke yang lainnya.
- Portofolio: koleksi bukti pencerminan penguasaan konsep. Dengan evaluasi model ini, memberikan gambaran yang telah dilakukan siswa secara esensial, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan kinerja siswa kurun waktu tertentu. Kelemahan model ini adalah tidak bisa cepat dan tidak mudah membuat peringkatnya berdasarkan nilai yang memadai, karena bersifat kualitatif. Tetapi dengan adanya portofolio, siswa dan guru dapat menjadikannya sebagai dokumen bahan evaluasi diri bagi siswa dan pembelajaran bagi guru.
- Rubrik: perangkat kriteria evaluasi berdasarkan pada tujuan dan kinerja siswa.
- Laporan tertulis. Siswa membuat laporan kegiatan dan/atau praktikum sesuai dengan LKS atau panduan pembuatan laporan tertulis.

Proses Penilaian Pembelajaran

Nasional Science Education Standard (NSES) di Amerika, mengeluarkan arahan dalam pengembangan penilaian hasil belajar siswa, sebagai berikut. Standar yang dikembangkan ini berisi kriteria untuk membuat keputusan mengacu kepada visi pendidikan yaitu literasi untuk semua (*literacy for all*). Standar ini menentukan mutu pelaksanaan penilaian yang digunakan oleh guru dan penyelenggara pendidikan yang mengukur pencapaian dan kesempatan yang diberikan kepada siswa. Standar ini memberikan panduan pembuatan alat ukur, pelaksanaan penilaian, dan perumusan kebijakan. Standar ini dapat digunakan sebagai penilaian siswa, guru, dan program, formatif dan sumatif, dan penilaian kelas dalam skala yang luas.

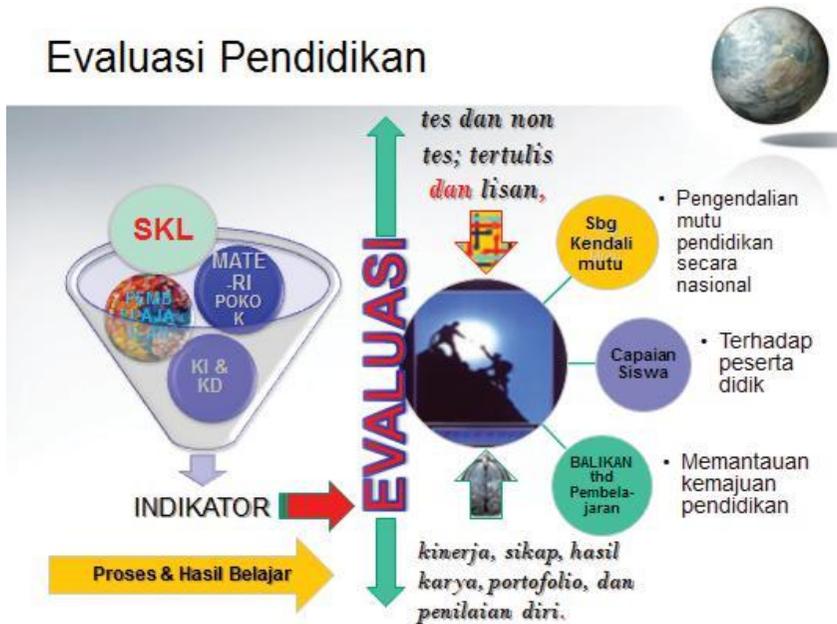
Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai benchmark dalam pengembangan dan pelaksanaan penilaian, antara lain sebagai berikut.

- Penilaian harus ajeg dengan rencana semula. Hasil penilaian mempengaruhi masa depan siswa; informasi yang diperoleh untuk membuat keputusan dan tindakan selanjutnya. Penilaian mempunyai tujuan jelas. Hasil penilaian digunakan untuk membuat keputusan dan tindakan meningkatkan literasi. Hubungan antara kebijakan program pembelajaran dan data harus jelas; guru diberi keleluasaan menentukan tindakan atas hasil penilaian.

Anatomi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Refleksi Pengelolaan Pendidikan di Bali

- Pencapaian dan kesempatan belajar dinilai. Data pencapaian berfokus pada materi, yang esensial dipelajari siswa, sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator. Kesempatan belajar berfokus pada indikator sebagai cermin kesempatan siswa belajar. Berimbang perhatian terhadap penilaian kesempatan belajar dan pencapaian siswa.
- Teknik pengumpulan data sesuai antara rencana dan pelaksanaan sebagai dasar interpretasi. Hal yang mesti diukur harus betul-betul diukur, penilaian harus authentic. Pengukuran kinerja individual siswa sama antar siswa, memperoleh kesempatan memadai untuk menunjukkan kemampuannya. Prosedur penilaian ajeg secara internal, adanya alur logis dan sistematis.



Beberapa tips yang dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan penilaian hasil belajar siswa (*National Science Education Standards.htm*).

Proses penilaian adalah upaya efektif untuk mengkomunikasikan harapan system pendidikan kepada semua orang yang peduli dengan pendidikan.

Materi dan bentuk penilaian hendaknya sesuai dengan hal yang akan diukur.

Alat ukur hendaknya dikembangkan semestinya, disusun dalam konteks siswa, tidak menunjuk keterampilan yang lain selain yang diukur (kosa-kata, membaca), diharapkan bebas dari bias.

Pilihan bentuk penilaian hendaknya ajeg dengan yang hendak diukur dan disimpulkan. Bila guru memperlakukan siswa sebagai pebelajar yang serius dan diberikan bimbingan memadai, siswa menjadi paham dan mampu melakukan aktivitas dengan baik

Hubungan yang jelas antara pengukuran dan hasil kerja siswa untuk mengevaluasi tujuan pendidikan adalah integral dalam rencana penilaian.

Membawa serta dan menganalisis eksplanasi siswa merupakan cara yang bermanfaat untuk mengukur pencapaian siswa.

Memberikan kesempatan siswa mendemonstrasikan mengurutkan pernyataan satu dengan yang lainnya secara logis dengan tidak ada yang hilang antara pernyataan sebelum dengan sesudahnya.

Memahami dan melakukan pencarian secara mandiri terhadap pemahaman konsep, prinsip, hukum, dan teori tentang.

Perubahan paradigma dalam penyelenggaraan penilaian hasil belajar siswa sangat penting dilakukan untuk menuju kepada pengukuran kemampuan berpikir tingkat tinggi pada siswa. Beberapa hal yang kontra produktif terhadap pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi dikurangi dan beberapa hal yang mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi ditingkatkan.

Hal-hal yang hendaknya mulai kita tinggal dalam mengevaluasi hasil belajar siswa, antara lain, mengukur hal-hal yang mudah diukur; mengukur pengetahuan terputus satu dengan lainnya; mengukur pengetahuan ilmiah saja; mengukur hal yang tidak dipelajari siswa; mengukur pencapaian siswa saja; dan pengukuran ditentukan guru tanpa negosiasi dengan siswa.

Hal-hal yang hendaknya kita upayakan dalam mengevaluasi hasil belajar siswa, antara lain, mengukur pencapaian siswa yang sulit diukur; mengukur pengetahuan yang terstruktur baik; mengukur pemahaman dan penalaran ilmiah; mengukur hal yang dipelajari siswa; dan mengukur pencapaian dan kesempatan belajar; serta siswa menentukan pengukuran dalam kerja praktikum.

Dikurangi



- Mengukur yang mudah diukur
- Mengukur pengetahuan terputus
- Mengukur pengetahuan ilmiah
- Mengukur hal yang tidak dipelajari siswa
- Mengukur hanya pencapaian siswa
- Pengukuran ditentukan guru

Mengarah



- Mengukur pencapaian yang sulit diukur
- Mengukur pengetahuan yang terstruktur baik
- Mengukur pemahaman dan penalaran ilmiah
- Mengukur hal yang dipelajari siswa
- Mengukur pencapaian dan kesempatan belajar
- Siswa menentukan pengukuran dalam praktek

Pengelolaan penilaian hasil belajar siswa, meliputi: perumusan tujuan, pengembangan alat ukur, pelaksanaan evaluasi, dan penganalisisan informasi yang diperoleh untuk merumuskan keputusan yang baik diharapkan dapat membantu mengarahkan profil pembelajaran yang sesuai dengan hakekat itu sendiri.

CONTOH ALAT UKUR DALAM PEMBELAJARAN

Secara umum penilaian hasil belajar siswa digunakan berbagai kepentingan, antara lain: mendiagnose kesulitan belajar siswa, menentukan tingkat pencapaian siswa (baik acuan norma maupun acuan kriteria), dan memperoleh balikan terhadap proses belajar yang dilaksanakan.

Untuk menentukan balikan terhadap proses belajar siswa, dapat digunakan juga format observasi kinerja pembelajaran IPA, antara lain *Science Teaching Observation Schedule* (STOS).

Format observasi terhadap pembelajaran di atas, terdiri atas dua kelompok besar, yaitu aktivitas siswa dan aktivitas guru, sebagai suatu proses transaksi intelektual yang sistematis dan terencana. Di samping itu, untuk menjangkau ada atau tidak ada aktivitas di luar aktivitas terencana, disertakan juga aspek aktivitas yang tidak berhubungan dengan pembelajaran.

Anatomi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Refleksi Pengelolaan Pendidikan di Bali

Periode waktu yang digunakan untuk mengisi pada format tersebut, dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Artinya, bila ingin menentukan secara kasar profil pembelajaran berpusat pada siswa atau guru, periode waktu dapat agak lebih lama. Disarankan, periode waktu yang digunakan adalah lima menit, sebagai sampel kegiatan dalam satuan waktu pembelajaran. Jika setiap aspek aktivitas dari kode A sd G dipetakan dalam grafik, didapat suatu profil pembelajaran.

		Uraian Kegiatan	Kode	Periode waktu	Jmlh	Ket.
Guru	Bertanya	Mengingat fakta dan prinsip	A1			
		Menerapkan fakta/ prinsip untuk memecahkan masalah	A2			
		Membuat hipotesis/spekulasi	A3			
		Merancang prosedur eksperimen	A4			
		Mengobservasi langsung	A5			
		Menginterpretasi data	A6			
		Membuat inferensi dari hasil observasi	A7			
	Menyuruh	Fakta dan prinsip	B1			
		Masalah	B2			
		Hipotesis atau spekulasi	B3			
	Membantu	Memperoleh fakta atau prinsip	C1			
		Mengidentifikasi atau memecahkan masalah	C2			
		Membuat inferensi, rumusan, atau menguji hipotesis	C3			
		Mencari bimbingan dalam prosedur eksperimentasi	C4			
Siswa	Membantu	Memperoleh fakta atau prinsip	D1			
		Mengidentifikasi atau memecahkan masalah	D2			
		Membuat inferensi, rumusan, atau menguji hipotesis	D3			
		Mencari bimbingan dalam prosedur	D4			
	Mengikuti	Memperoleh fakta atau prinsip	E1			
		Mencari bimbingan ketika mengidentifikasi atau memecahkan masalah	E2			
		Mencari bimbingan ketika membuat inferensi, rumusan, atau menguji hipotesis	E3			
		Mencari bimbingan dalam prosedur eksperimentasi	E4			
		Mempresentasikan hasil kegiatan	F			
		Aktivitas lain-lain (selain tersebut di atas)	G			

Contoh soal terstruktur dapat digunakan untuk merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa.

KESIMPULAN

Penilaian hasil belajar siswa mengikuti pakem penilaian yang sesuai dengan panduan dalam KTSP. Beberapa hal yang mungkin berbeda, terletak pada karakteristik dibandingkan pelajaran lain, hakekat meliputi: proses dan produk serta kontek dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan demikian, penilaiannya pun mengacu kepada karakteristik tersebut.

Inovasi yang mungkin dilakukan sebagai hasil kreativitas guru, antara lain terletak pada variabilitas pendekatan yang digunakan, yang berkonsekuensi pada penyesuaian pada struktur evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja siswa dalam belajar dan pencapaian pemahaman konsep serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian *authentic* dan *portofolio* merupakan upaya menyeluruh untuk mengungkap hal-hal yang dipelajari siswa dan hal yang telah dilakukan dalam “meniru” ahli mengungkap rahasia alam ini.

Upaya mengubah penyelenggaraan penilaian hasil belajar dari evaluasi yang hanya mengukur kemampuan berpikir tingkat rendah menuju kepada evaluasi yang memungkinkan mengungkap kemampuan berpikir tinggi terus dilakukan. Dengan terbiasanya siswa diajak mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi diharapkan terbiasa untuk melatih keterampilan itu dalam berbagai segi kehidupan siswa dalam masyarakat. Sehingga arah pendidikan menuju kepada masyarakat literasi dan teknologi dapat tercapai. Semoga!!!

Daftar Pustaka

- Alit Mariana, Made. 2007. *Pembelajaran Kreatif dan Inovatif*. Makalah Pengantar Diskusi di P4TK . Tidak dipublikasikan.
- Amabile, T.M. 1983. *The Social Psychology of Creativity (Springer series in social psychology)*. New York: Springer-Verlag New York Inc.
- DeBoer, George E. 1991. *A History of Ideas in Science Education: Implication for practice*. New York: teachers Colledge, Columbia University. Franklin
- (2003). *Creativity Theory*. Creativity Theory.htm Funderstanding - Portfolio Assessment.htm. *Portofolio Assessment*. Goldberf, N. (2000). <http://www.nataliegoldberq.com/>
- Mailto:info@jpb.com. 1996. *Ten Steps for Bossting Your Creativity.Htm*. Bangkok: JPB Creative Co. Ltd.
- Skogen, Kjell. 1997. *An Introduction to the Process of Innovation*. Chapter II in DSSI-project. Socrates Programme 25234-CP-1-96-NO-ODL (<http://www.uoc.es/dssi/>)
- Smith, Frederick W. (2000). webmaster@fedex.com
- Tuckman, BW. 1975. *Measuring Educational Outcomes: Fundamentals of Testing*. Harcourt Barce Jovanovich, Inc. USA.